

RINGKASAN

PENGARUH DAYA SAING REGIONAL TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA: ANALISIS DATA PANEL

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari sebuah proses pembangunan di seluruh negara, termasuk Indonesia. Untuk konteks Indonesia, peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama atau hasil akhir dari proses pembangunan jelas diamanahkan dalam konstitusi negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara tegas dijelaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum. United Nations Development Programme juga memiliki pandangan yang sama, bahwa tujuan dari pembangunan adalah mewujudkan peningkatan kesejahteraan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, peningkatan daya saing merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi. Berbagai literatur menyatakan bahwa peningkatan daya saing merupakan salah satu jalur atau cara yang dapat digunakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa salah satu jalur yang harus digunakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah melalui peningkatan daya saing daerah.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh daya saing regional terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan menganalisis kondisi capaian variabel determinan daya saing Indonesia dan antar regional di Indonesia.

Tulisan ini menggunakan metode analisis penelitian deskriptif dan metode Analisis Statistik Inferensial. Metode estimasi yang digunakan adalah *Random Effect Model* dengan menggunakan data sekunder berupa data panel dari (33) tiga puluh tiga provinsi dari 2010 sampai 2014.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa daya saing memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, yang diproksi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

PENGARUH DAYA SAING REGIONAL TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA: ANALISIS DATA PANEL

Robby A. Sirait¹ & Jesly Y. Panjaitan²

**The Impact of Regional Competitiveness To Public Welfare In Indonesia:
A Panel Data Analysis**

Abstract

This study aims to examine the effect of regional competitiveness for the welfare of society and analyze the achievements of the determinant variables Indonesia's competitiveness and inter-regional in Indonesia. The method used in this study is Random Effect Model by using secondary data, a panel of thirty-three provinces in Indonesia from 2010 to 2014. The result indicates that competitiveness has a positive and significant correlation to the welfare of society, which is proxied by the Human Development Index (HDI).

Keywords: Regional Competitiveness, Public Welfare, Random Effect Model

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari sebuah proses pembangunan di sebuah negara. Untuk konteks Indonesia, peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama atau hasil akhir dari proses pembangunan jelas diamanahkan dalam konstitusi negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara tegas dijelaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum.

United Nations Development Programme (UNDP) juga memiliki pandangan yang sama, bahwa tujuan dari pembangunan adalah mewujudkan peningkatan kesejahteraan. Dalam Human Development Report 2000, UNDP menyatakan:

“Development should begin with the fulfillment of the basic material needs of an individual including food, clothing, and shelter, and gradually reach the highest level of self-fulfillment. The most critical form of self-fulfillment include leading a long and healthy life, being educated, and enjoying a decent standard of living.”

Menurut UNDP, beberapa indikator peningkatan kesejahteraan yaitu peningkatan kondisi kesehatan, pendidikan dan merasakan standar hidup yang layak merupakan. Sehingga dapat dikatakan, kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau masyarakat yang hidupnya lebih lama dan sehat, lebih berpendidikan dan memiliki standar hidup yang layak.

¹ Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lt.5, Jln. Jend Gatot Subroto Senayan, Jakarta 10270, roddy.sirait@dpr.go.id

² Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lt.5, Jln. Jend Gatot Subroto Senayan, Jakarta 10270, jesly.panjaitan@dpr.go.id

Definisi yang lebih luas lagi terkait kesejahteraan tercantum di Undang-Undang (UU) No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Salah satu jalur yang harus digunakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah melalui peningkatan daya saing daerah. Hal senada juga disampaikan oleh Gardiner et.al (2004), yang menyatakan bahwa daya saing mempengaruhi produktivitas wilayah dan produktivitas tersebut akan mempengaruhi kinerja regional melalui Produk Domestik Bruto Regional (PDRB). Perbaikan kinerja regional yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB akan mempengaruhi capaian kualitas standar hidup masyarakat. Sedangkan, menurut Dunning dan Zhang (2008), dalam Curtis et.al, menyatakan tingkat daya saing negara akan mendorong *Foreign Direct Investmet* (FDI). Moe (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi sebuah negara akan mendorong pembangunan ekonomi, yang menyebabkan peningkatan/perbaikan standar hidup masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan peningkatan investasi juga akan akan meningkatkan kualitas standar kehidupan atau tingkat kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Human Development Report 2015 yang dirilis oleh UNDP, posisi *Human Development Index* (HDI) Indonesia masih berada pada *medium human development* dengan nilai HDI sebesar 0.684. Posisi Indonesia tersebut masih relatif jauh tertinggal dengan Singapura (*very high human development*) serta Malaysia, Thailand, Brazil dan China³ yang menduduki posisi *high human development*. Perbedaan posisi memberikan pesan bahwa pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar dapat sejajar atau lebih baik dari negara-negara lain, terutama negara kawasan ASEAN. Salah satu jalur yang dapat ditempuh adalah melalui peningkatan daya saing nasional.

Dari perspektif kebijakan makro, tujuan utama daya saing adalah kesejahteraan masyarakat sebuah negara, melalui pendapatan individu, standar hidup, pembangunan manusia atau keadilan sosial (Waheeduzzaman, 2002). Hal ini juga sesuai dengan UU No.23

³ Indonesia Malaysia, Thailand, Brazil dan China merupakan negara-negara yang karakteristik ekonomi dan demografinya relatif sama.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan salah satu jalur yang harus ditempuh untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui daya saing.

Peningkatan daya saing daerah secara kumulatif akan berdampak pada capaian daya saing nasional. Oleh karena itu, dalam kerangka meningkatkan daya saing nasional, peningkatan daya saing antar daerah atau regional menjadi sangat penting.

Untuk meningkatkan daya saing nasional, perlu dicermati variabel determinan daya saing nasional dan regional menjadi sangat penting bagi pemerintah. Meningkatkan atau memperbaiki variabel determinan daya saing merupakan langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk mengidentifikasi kondisi capaian variabel determinan daya saing serta mengidentifikasi variabel atau faktor apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga menguji pengaruh daya saing regional terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, permasalahan dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh daya saing regional terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana kondisi capaian variabel determinan daya saing Indonesia dan antar regional di Indonesia?

C. Tujuan Analisis

Tujuan utama analisis ini adalah menganalisis pengaruh daya saing regional terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan menganalisis kondisi capaian variabel determinan daya saing Indonesia dan antar regional di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Daya Saing

Dalam berbagai literatur ekonomi dan bisnis, daya saing dijelaskan melalui banyak pendekatan yang berbeda-beda (Waheeduzzaman, 2002). Daya saing tidak dapat didefinisikan secara kaku atau persisten dalam literatur ekonomi (Siggel, 2007). Tidak ada satu indikator pun yang bisa digunakan untuk mengukur daya saing, yang memang sangat sulit untuk diukur (Markovich, 2005).

Council of Competitiveness dalam Klara (2005), mendefinisikan daya saing adalah kapasitas bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya. *European Commission* (1999) menyebutkan bahwa daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

Definisi *Council of Competitiveness* dan *European Commission* tersebut, menekankan pada kemampuan atau kapasitas suatu negara di dalam persaingan pasar internasional, sebagai dasar mendefinisikan daya saing.

Tidak begitu berbeda, Siggel (2007) mendefinisikan bahwa ekonomi sebuah negara dapat dianggap berdaya saing, jika negara tersebut memiliki banyak perusahaan dan industri yang berdaya saing secara internasional, yang artinya ekspor negara tersebut harus kuat. Dengan kata lain, daya saing adalah konsep yang mengukur posisi dan kedudukan suatu negara di dalam sebuah pasar atau perdagangan.

Revealed Comparative Advantage (RCA) yang diperkenalkan oleh Ballasa (1965) bisa dijadikan salah satu titik awal dalam mendefinisikan daya saing. RCA merupakan ukuran yang merefleksikan keberhasilan ekspor sebuah negara secara relatif terhadap total ekspor dunia.

Siggel (2007) berpendapat bahwa ekspor dapat dihasilkan dari berbagai subsidi atau berbagai insentif yang ada, dan insentif-insentif tersebut dapat menjelaskan daya saing, bukan keunggulan komperatif. Oleh karena itu, indeks RCA yang dipopulerkan oleh Ballasa dapat dijadikan ukuran daya saing.

Definisi diatas secara substansi berbeda dengan definisi daya saing dalam laporan *The Global Competitiveness Report* (GCR) 2010–2011. Laporan tersebut mendefinisikan daya saing sebagai seperangkat institusi, kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat atau tingkat kemakmuran negara tersebut.

"We define competitiveness as the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of a country. The level of productivity, in turn, sets the sustainable level of prosperity that can be earned by an economy. In other words, more competitive economies tend to be able to produce higher levels of income for their citizens."

Dengan demikian, definisi daya saing menurut laporan tersebut adalah produktivitas, bukan keberhasilan suatu negara dalam persaingan pasar. Dalam laporan GCR, lebih tepat disebut sebagai definisi variabel determinan daya saing atau definisi iklim usaha yang baik daripada definisi daya saing. Hal ini senada dengan pendapat Siggel (2007), berbagai negara dapat bersaing untuk memperoleh *market share* atau *foreign investment*, tapi stabilitas, tata kelola pemerintah yang baik dan kesempatan peluang investasi, lebih baik diaggresasi sebagai suatu iklim bisnis yang baik.

Demikian juga indeks daya saing dari aggerasi 12 (dua belas) pilar pembentuk daya saing dalam laporan *The Global Competitiveness Report 2010–2011*, lebih tepat didefinisikan sebagai indikator iklim bisnis yang baik atau variabel determinan daya saing, ketimbang definisi daya saing. Ulegine et.al (2011) dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis* terhadap 45 (empat puluh lima) negara terpilih, menggunakan skor daya saing dari *World Economic Forum (WEF)*. *WEF* memberikan tiga pilar utama daya saing antara lain *Basic Requirements, Efficiency Enhancers dan Innovation and sophistication factors* sebagai input atau kekuatan daya saing sebuah negara.

B. Ukuran Daya Saling

Dalam bagian terdahulu sudah dijelaskan bahwa banyak konsep daya saing termasuk beberapa definisi daya saing. Perbedaan konsep tersebut pada akhirnya akan berimplikasi pada alat ukur atau indikator yang berbeda-beda. Tabel 1, menggambarkan beberapa alat ukur atau indikator daya saing yang telah disarikan oleh Siggel (2007) dalam karyanya yang berjudul “*The Many Dimension of Competitiveness*”.

Tabel 1. Alat ukur atau indikator daya saing

Proposing author or organization	Measurement criterion or Indicator
Macro concepts	
Lipschitz/McDonald (1991), Marsh, Tokarick (1994), IMF	real exchange rate, real effective exch.rate
Hatsopoulos, Krugman, Summers. (1988)	trade balance with rising real income
Markusen (1992),	real income growth with free balanced trade
Dollar/Wolff (1993)	productivity
Fagerberg (1988)	market share increase
Sharpe (1986)	market share
WEF/IMD (annual since 1995)	world compet. index
Micro concepts	
Balassa (1965)	revealed comp.advantage
Bruno (1965)	domestic resource cost
Buckley et al. (1992)	composite, multi-variable
Durand/Giorno (1987), OECD	price competitiveness
Helleiner (1989)	real effective exch. rate
Hickman (1992)	unit labour cost
Jorgenson, Kuroda (1992)	price competitiveness
Krugman, Hatsopoulos (1987)	market share, change
Mandeng (1991)	market share, change
Oral (1993)	indust. mastery, unit cost
Porter (1990)	composite, multi-variable
Siggel/Cockburn (1995)	full unit cost
Swann/Taghavi (1992)	price/product attribute
Turner/Gollub (1997)	relative unit labour cost

Sumber : The Many Dimensions of Competitiveness (Siggel, 2007).

C. Variabel Determinan Daya Saing

Daya saing sebuah daerah ditentukan oleh variabel pembentuknya atau faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing tersebut. Dalam sebuah negara, kekuatan daya saing sebuah negara ditentukan oleh pondasi dan terakhir ditentukan sejumlah pilar yang masing-masing memiliki daya saing sendiri (Tambunan, 2014). Pilar-pilar tersebut adalah:

1. Alam/fisik.

Secara alami Indonesia memiliki daya saing yang jauh lebih tinggi dari Singapura berdasarkan wilayahnya, sumber daya alam. Namun dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, Singapura dapat menciptakan/mengganti sumber daya alam tersebut.

2. Perusahaan.

Daya saing perusahaan ditentukan oleh daya saing dari pengusaha, pekerja dan input lainnya

3. Inovasi.

Inovasi ditentukan oleh kreativitas, keuletan dan pengetahuan dari *inventor*.

4. Pemerintah.

Kebijakan dan peraturan mendukung keberhasilan daya saing sebuah negara. Negara yang memiliki daya saing tinggi akan tercermin dari bentuk program, insentif, peraturan yang pro-bisnis dan juga infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang sangat baik di negara tersebut.

5. Masyarakat.

Negara yang memiliki daya saing tinggi tercermin dari masyarakatnya, seperti budaya, sikap/perbuatan atau hukum di negara tersebut.

Pada bagian terdahulu, sudah dijelaskan bahwa definisi daya saing dalam laporan GCR lebih tepat digunakan sebagai definisi variabel determinan daya saing. Artinya, pilar-pilar pembentuk indeks daya saing dalam laporan tersebut merupakan faktor atau variabel pembentuk atau yang mempengaruhi daya saing. Dalam laporan tersebut, daya saing sebuah negara ditentukan atau dibentuk dari 3 (tiga) pilar utama yakni:

1. Persyaratan Dasar (*Basic Requirement*), seperti kelembagaan, infrastruktur, stabilitas ekonomi makro dan kesehatan serta pendidikan dasar. Faktor inilah yang menjadi penggerak ekonomi.
2. Pendorong Efisiensi (*Efficiency Enhancer*), seperti pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang dan jasa, kecanggihan pasar keuangan, kesiapan teknologi dan luas pasar domestik. Faktor inilah yang menjadi pendorong efisiensi.
3. Faktor Inovasi dan Kepuasan (*Innovation and Sophistication Factors*), seperti kecanggihan bisnis dan inovasi.

Asia Competitiveness Institute (ACI) yang melakukan penilaian daya saing terhadap 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia, menggunakan 4 (empat) pilar pembentuk atau penentu daya saing sebuah daerah di Indonesia. Keempat pilar itu antara lain:

1. Stabilitas makro ekonomi, seperti keterbukaan pada perdagangan dan jasa, penanaman modal asing, dan kekuatan daerah.
2. Pemerintah dan Perusahaan, seperti kebijakan, kepemimpinan dan peraturan atau hukum yang berlaku.
3. Keuangan, bisnis dan kondisi sumber daya manusia, seperti efisiensi bisnis, pasar tenaga kerja dan kinerja produktivitas.
4. Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, seperti infrastuktur fisik, teknologi dan standar hidup, pendidikan dan stabilitas sosial.

D. Studi Empiris Tentang Pengaruh Daya Saing Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dalam literatur, hubungan daya saing dan pembangunan manusia tidak banyak dianalisis secara mendalam (Ulegine et.al, 2011). Akan tetapi, hubungan antara daya saing dengan pertumbuhan ekonomi atau investasi telah banyak dilakukan.

Daya saing sebuah negara atau daerah memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Gardiner et.al (2004) yang menyatakan bahwa daya saing mempengaruhi produktivitas wilayah dan produktivitas tersebut akan mempengaruhi kinerja regional melalui Produk Domestik Bruto Regional (PDRB). Perbaikan kinerja regional yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB akan mempengaruhi capaian kualitas standar hidup masyarakat. Sedangkan, menurut Dunning dan Zhang (2008), dalam Curtis et.al, menyatakan tingkat daya saing negara akan mendorong *Foreign Direct Investmet* (FDI). Moe (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi sebuah negara akan mendorong pembangunan ekonomi, yang menyebabkan peningkatan/perbaikan standar hidup masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan peningkatan investasi juga akan meningkatkan kualitas standar kehidupan atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Runtut pikir tersebut diatas, sedikit banyak menggambarkan hubungan kausalitas antara daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan daya saing sebuah negara atau daerah akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara atau daerah tersebut.

Penarikan kesimpulan tersebut diatas senada dengan Waheeduzzaman, (2002) yang menyebutkan tujuan akhir daya saing adalah meningkatkan standar hidup atau pendapatan riil masyarakat dan negara dapat mewujudkan itu dengan menawarkan barang dan jasa pada harga yang kompetitif secara internasional. Negara yang lebih kompetitif akan memberikan dampak pada peningkatan standar hidup atau pendapatan masyarakat, yang diperoleh dari perdagangan (Waheeduzzaman, 2002). Porters (1999) dalam Waheeduzzaman, mengkonfirmasi hal tersebut melalui analisis regresi terhadap sampel 58 negara. Sama halnya dengan Waheeduzzaman, Boltho dalam Ulegine et.al (2011) menyatakan bahwa dalam jangka panjang, daya saing bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat.

Konsep daya saing pada level negara adalah produktivitas. Tujuan utama sebuah negara adalah mewujudkan produksi yang tinggi dan meningkatkan standar hidup masyarakatnya, yang tergantung pada produktivitas. Produktivitas adalah determinan utama dari standar hidup dalam jangka panjang, melalui pendapatan per kapita nasional (Siggel, 2007).

Penelitian Waheeduzzaman (2002), dengan menggunakan data skor indeks daya saing dari laporan GCR dan human development index (HDI) pada 45 (empat puluh lima) negara, menunjukan ada hubungan positif dan signifikan antara daya saing dengan indeks pembangunan manusia. Akan tetapi, penggunaan HDI dan laporan GCR yang di dalamnya juga

variabel pendidikan dan kesehatan, akan berdampak pada hasil yang bias dan menjadi tidak valid.

III. METODOLOGI ANALISIS

A. Spesifikasi Model

Dalam menganalisis pengaruh daya saing terhadap kesejahteraan masyarakat, tulisan ini dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Waheeduzzaman (2002). Variabel yang digunakan untuk mengukur level kesejahteraan masyarakat dalam tulisan ini tidak berbeda dengan model Waheeduzzaman, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel proksi. Perbedaan utama dalam tulisan ini dengan model Waheeduzzaman adalah alat ukur yang digunakan dalam mengukur daya saing. Alat ukur daya saing dalam tulisan ini adalah rasio ekspor provinsi terhadap total ekspor keseluruhan provinsi.

Penggunaan alat ukur daya saing tersebut dalam tulisan ini mengadopsi atau mengikuti teori keunggulan komperatif, RCA, yang dipopulerkan oleh Ballasa (1965) dan definisi daya saing menurut Siggel (2007). Ada dua alasan, alat ukur daya saing dalam tulisan ini mengikuti pemikiran Ballasa dan Siggel. Pertama, tulisan ini memandang daya saing adalah sebuah konsep yang mengukur posisi relatif suatu negara atau daerah di dalam sebuah pasar. Kedua, definisi daya saing GCR yang digunakan oleh Waheeduzzaman lebih berhubungan dengan determinan ekonomi sebuah negara untuk memenangkan persaingan di dalam sebuah pasar. Artinya, indeks daya saing GCR adalah input pembentuk daya saing, bukan definisi dari daya saing.

Perbedaan lain dengan model Waheeduzzaman adalah tulisan ini memasukkan variabel kontrol lain yang mempengaruhi capaian kesejahteraan masyarakat yang diproksi dengan IPM. Spesifikasi model yang digunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 DS_{it} + \beta_2 PUSDEN_{it} + \beta_3 SMPDEN_{it} + \varepsilon \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

Berdasarkan persamaan (1), Indeks Pembangunan Manusia atau Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dipengaruhi oleh daya saing (DS), jumlah puskesmas per km (PUSDEN) dan jumlah sekolah menengah pertama dan MTs per km (SMPDEN). Variabel daya saing dalam persamaan (1) adalah nilai eksport provinsi j pada tahun t dibagi total eksport seluruh provinsi di Indonesia pada tahun t .

B. Jenis dan Sumber Data

Tulisan ini menggunakan data sekunder berupa data panel dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi⁴ dan kurun waktu dari 2010 sampai 2014. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan data time series untuk menganalisis kondisi capaian faktor atau variabel determinan daya saing Indonesia dan antar regional di Indonesia. Data-data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, WEF, UNDP dan ACI.

C. Teknis Analisis Data

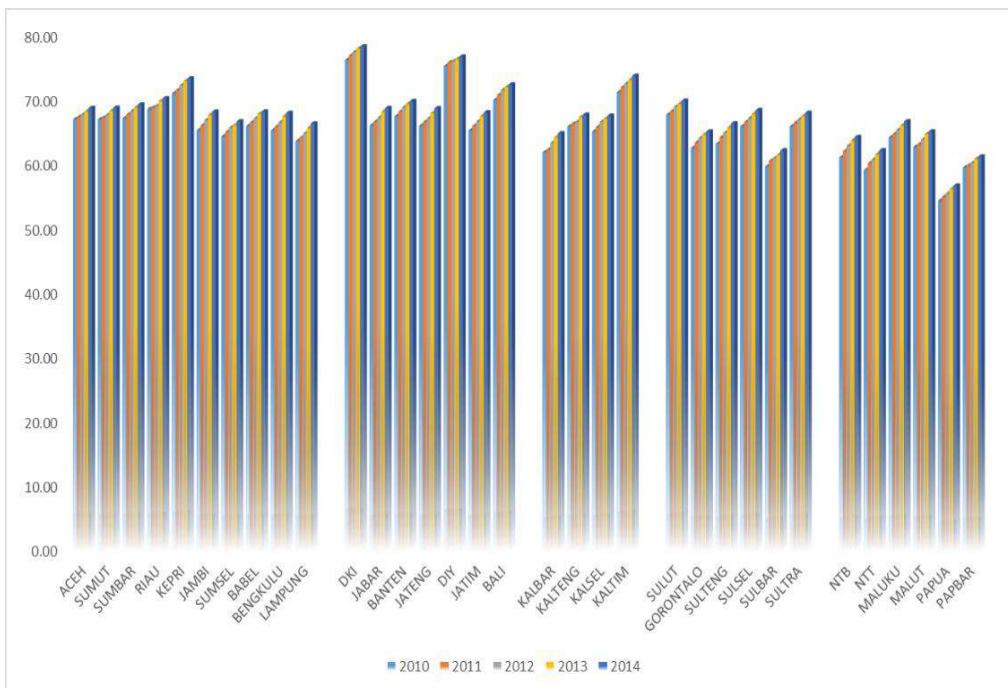
Setelah melakukan pengumpulan data, penelitian dilanjutkan dengan melakukan analisis data. Sekumpulan data yang ada dianalisis menggunakan metode analisis statistik inferensial. Dalam tulisan ini, metode estimasi yang digunakan adalah *Random Effect Model*. Sedangkan, untuk analisis kondisi capaian variabel determinan daya saing Indonesia dan antar regional di Indonesia, tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif terhadap beberapa variabel dan data terpilih.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif Tentang Kesejahteraan Masyarakat

Capaian IPM menurut provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dari 2010 sampai 2014 untuk keseluruhan provinsi. Untuk tahun 2014, IPM provinsi DKI Jakarta merupakan tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia sebesar 78,39, disusul DIY Yogyakarta sebesar 76,81 dan Kalimantan Timur sebesar 73,82. Sedangkan IPM terendah adalah provinsi Papua sebesar 56,75, Papua Barat sebesar 61,28 dan Sulawesi Barat sebesar 62,24.

⁴ Tidak termasuk Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 1. Capaian IPM Menurut Provinsi Tahun 2010 – 2014

Sumber : BPS, diolah.

Jika membandingkan capaian IPM menurut wilayah, capaian IPM provinsi-provinsi yang berada di wilayah timur Indonesia relatif lebih rendah dan tertinggal dibandingkan provinsi di barat Indonesia. Provinsi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang capaian IPM relatif jauh tertinggal dibandingkan provinsi di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali.

B. Hasil Estimasi

1. Uji *Likelihood Ratio Test* dan *Haussman Test*

Sebelum melakukan pengujian empiris pengaruh daya saing regional terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, model pengujian terlebih dahulu diuji melalui *Likelihood Ratio Test* dan *Hausman Test* untuk mengetahui pendekatan apa yang akan digunakan. Hasil test menunjukkan bahwa pendekatan model yang tepat digunakan adalah *Random Effect Model*.

2. Pembahasan

Hasil uji empiris pengaruh daya saing regional terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan *Random Effect Model* dan perangkat lunak Eviews 8.0 disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Hasil Estimasi Pengaruh Daya Saing Regional Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

IPM = 66,25 + 61,86*DS - 0,00*PUSDEN - 0,01*SMPDEN			
(0,00)	(0,00)*	(0,18)	(0,02)**
N = 33 R ² = 0,3585 Prob = 0.00			

Keterangan: * dan ** masing-masing signifikan pada level $\alpha = 1\%$ dan $\alpha = 5\%$

Hasil estimasi pada tabel 2 menunjukkan bahwa model yang digunakan telah valid secara statistik. Hal ini ditunjukkan dari F-Statistic (probabilita model 0,00) yang signifikan pada tingkat kepercayaan 1 persen. Model juga menunjukkan bahwa variabel daya saing, jumlah puskesmas per km dan jumlah SMP dan MTs per km secara bersama-sama signifikan mempengaruhi capaian IPM.

Daya saing sebuah negara atau wilayah/regional berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian negara atau wilayah tersebut. Peningkatan produktivitas negara tersebut, pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut, melalui peningkatan pendapatan per kapita. Siggel (2007) menyebutkan bahwa produktivitas adalah determinan utama dari standar hidup dalam jangka panjang melalui pendapatan per kapita nasional.

Berdasarkan tabel 2, hasil estimasi menunjukkan bahwa daya saing regional berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diproksi menggunakan IPM. Hasil studi ini sejalan dengan pernyataan Ulegine et.al (2011), Siggel (2007) dan hasil temuan Porters (1999) pada sampel 58 negara terpilih.

C. Analisis Kondisi Variabel Determinan Daya Saing

Pada bagian sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa daya saing memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur atau diproksi dengan IPM. Artinya, dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang merupakan amanah konstitusi UUD NRI 1945, maka peningkatan daya saing nasional maupun regional merupakan salah satu jalur yang harus ditempuh oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peningkatan daya saing dimaksud, dapat direalisasikan dengan melakukan perbaikan dan peningkatan pada variabel determinan atau pembentuk daya saing sebuah negara atau wilayah/region. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan berbagai variabel determinan

pembentuk daya saing, baik menurut *GCR*, Tambunan (2014) maupun *ACI*. Dalam studi ini, analisis faktor atau variabel determinan daya saing Indonesia menggunakan variabel dan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, *ACI* dan *GCR*.

Tabel 2. Capaian 12 pilar *GCR* Indonesia Tahun 2009 – 2015

PILAR/TAHUN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Institusi	4	4	3.8	3.9	4	4.1	4.1
Infrastruktur	3.2	3.6	3.8	3.7	4.2	4.4	4.2
Kondisi Makroekonomi	4.8	5.2	5.7	5.7	5.8	5.5	5.5
Kesehatan dan Pendidikan Dasar	5.2	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6
Pendidikan Tinggi dan Pelatihan	3.9	4.2	4.2	4.2	4.3	4.5	4.5
Efisiensi Pasar Barang	4.5	4.3	4.2	4.3	4.4	4.5	4.4
Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	4.3	4.2	4.1	3.9	4	3.8	3.7
Pengembangan Pasar Keuangan	4.3	4.2	4.1	4.1	4.2	4.5	4.2
Teknologi	3.2	3.2	3.3	3.6	3.7	3.6	3.5
Ukuran Pasar	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.7
Kualitas Dunia Usaha	4.5	4.4	4.2	4.3	4.4	4.5	4.3
Inovasi	3.6	3.7	3.6	3.6	3.8	3.9	3.9

Sumber : *GCR* berbagai tahun, diolah

Dari tabel 3, diketahui perbandingan capaian Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya di tahun 2009 dan tahun 2015, seluruh pilar atau variabel determinan daya saing Indonesia secara relatif mengalami tren perbaikan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih tertinggal dari capaian Singapura, Malaysia dan Thailand.

Tabel 3. Perbandingan Capaian Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya, Tahun 2009 – 2015

PILAR/TAHUN	Indonesia		Singapura		Thailand		Malaysia		Vietnam		Filipina	
	2009	2015	2009	2015	2009	2015	2009	2015	2009	2015	2009	2015
Institusi	4	4.1	6.2	6.0	4.0	3.7	4.5	5.1	3.9	3.7	3.2	3.8
Infrastruktur	3.2	4.2	6.4	6.5	4.6	4.6	5.1	5.5	3.0	3.8	2.9	3.4
Kondisi Makroekonomi	4.8	5.5	5.2	6.2	5.4	5.7	5.0	5.4	3.9	4.7	4.5	5.7
Kesehatan dan Pendidikan Dasar	5.2	5.6	6.2	6.7	5.5	5.8	5.9	6.3	5.3	5.9	5.1	5.5
Pendidikan Tinggi dan Pelatihan	3.9	4.5	5.6	6.2	4.3	4.6	4.5	5.0	3.5	3.8	3.9	4.5
Efisiensi Pasar Barang	4.5	4.4	5.8	5.7	4.5	4.7	4.8	5.4	4.2	4.2	3.9	4.2
Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	4.3	3.7	5.9	5.7	4.8	4.2	4.7	4.9	4.7	4.4	3.9	4.1
Pengembangan Pasar Keuangan	4.3	4.2	5.9	5.6	4.5	4.4	5.4	5.2	4.1	3.7	3.9	4.2
Teknologi	3.2	3.5	5.9	6.2	3.7	4.2	4.5	4.6	3.5	3.3	3.3	3.9
Ukuran Pasar	5.2	5.7	4.5	4.8	5.0	5.2	4.7	5.0	4.6	4.8	4.6	4.9
Kualitas Dunia Usaha	4.5	4.3	5.2	5.1	4.4	4.4	4.8	5.3	4.0	3.6	4.1	4.3
Inovasi	3.6	3.9	5.1	5.2	3.3	3.4	4.1	4.8	3.5	3.2	2.8	3.5
Overall	4.3	4.5	5.6	5.7	4.6	4.6	4.9	5.2	4.0	4.3	3.9	4.4
Rank	54	37	3	2	36	32	24	18	75	56	87	47

Sumber : *GCR* berbagai tahun, diolah

Jika melihat capaian dari seluruh pilar pembentuk, pilar infrastruktur merupakan salah satu pilar yang perlu mendapat perhatian lebih khusus untuk mendorong peningkatan daya saing Indonesia. Untuk pilar infrastruktur, sub pilar *quality of roads*, *quality of port infrastructure* dan *quality of electricity supply* harus menjadi prioritas. Capaian ketiga sub pilar

tersebut masih berada dibawah rata-rata capaian dunia. Pilar lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah pilar teknologi, efisiensi tenaga kerja, inovasi dan birokrasi.

Untuk variabel determinan daya saing antar provinsi di Indonesia, tulisan ini menggunakan angka indeks daya saing dalam laporan ACI. Dengan data tahun 2011, laporan ACI menunjukkan bahwa provinsi-provinsi yang berada di wilayah barat Indonesia (khususnya pulau Jawa) lebih berdaya saing dibandingkan dengan yang berada di timur Indonesia. Artinya, capaian variabel determinan daya saing provinsi di barat Indonesia secara agrerasi jauh lebih baik dibandingkan dengan yang berada di timur Indonesia.

DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan provinsi yang indeks daya saingnya tertinggi. Sedangkan terendah adalah Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Papua, NTT dan Maluku Utara. Dari laporan ACI tersebut, juga terlihat bahwa provinsi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat merupakan provinsi yang daya saingnya rendah dan jauh tertingal dibandingkan provinsi di pulau Jawa, bahkan cenderung sangat timpang.

Capaian yang relatif jauh atau timpang ini linear dengan beberapa variabel yang dapat dikategorikan variabel determinan daya saing, antara lain jumlah dokter, puskesmas, sekolah, rasio elektrifikasi, akses terhadap sanitasi dan air bersih serta ketersedian jalan yang juga timpang. Ketimpangan variabel-variabel tersebut terlihat pada tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan beberapa variabel determinan daya saing tahun 2014

WILAYAH	RASIO DOKTER/PUS KESMAS	PUSKESMAS DENSITY	SMP DESNSITY	RASIO ELEKTRIFIKASI	AKSES SANITASI LAYAK (%)	AKSES AIR MINUM LAYAK (%)	RASIO PANJANG JALAN DAN LUAS WILAYAH
Sumatera	2.29	205.30	41.80	81.46	51.08	61.49	0.37
Jawa dan Bali	2.22	34.12	6.13	87.15	72.74	77.15	0.81
Kalimantan	1.71	624.43	139.33	75.04	40.19	63.10	0.10
Sulawesi	2.07	161.47	35.46	74.11	63.57	64.65	0.39
Nusa Tenggara	1.30	124.61	22.22	59.69	36.06	58.29	0.48
Maluku	1.25	244.99	64.08	68.69	60.33	62.49	0.19
Papua	1.50	730.45	464.49	39.51	45.29	59.11	0.05

Sumber : BPS, Kementerian Kesehatan & Kementerian PUPR, diolah.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian yang telah dilakukan dalam tulisan ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, hasil estimasi menunjukkan bahwa daya saing berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diproksi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kedua, capaian determinan daya saing Indonesia sejak 2009 sampai dengan 2015 mengalami trend perbaikan. Namun, capaian tersebut masih tertinggal dengan Singapura, Thailand dan Malaysia.

Ketiga, prioritas variabel determinan daya saing Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing nasional adalah infrastruktur. Infrastruktur kualitas jalan, kualitas pelabuhan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan merupakan sub infrastruktur yang harus menjadi prioritas.

Keempat, teknologi, efisiensi tenaga kerja, inovasi dan birokrasi merupakan variabel determinan daya saing yang juga harus mendapatkan perhatian khusus dan prioritas.

Kelima, variabel determinan daya saing provinsi di wilayah timur Indonesia, khususnya Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, relatif tertinggal jauh dengan provinsi di barat Indonesia, khususnya pulau Jawa.

B. Rekomendasi

Capaian kinerja daya saing setiap provinsi secara kumulatif akan berdampak pada capaian daya saing nasional. Oleh karena itu, dalam kerangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional, peran pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan daya saing setiap provinsi menjadi penting. Regulasi dan kebijakan anggaran negara yang diarahkan pada upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat daya saing, baik regional maupun nasional, merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.

Upaya ini sangat penting untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang merupakan pesaing Indonesia di kawasan ASEAN, baik dari segi capaian daya saing maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya dimaksud hendaknya dijalankan sinergis dan simultan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing daerahnya masing-masing. Upaya yang sinergis dan simultan

tersebut harus terwujud, mengingat daya saing daerah sangat bergantung pada kualitas kinerja pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Bergesarnya rezim pemerintahan yang sentralisasi kepada rezim desentralisasi di Indonesia, meletakkan peran pelayanan publik lebih besar di tingkatan daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota. Artinya, perubahan rezim ini memberikan pengertian bahwa peningkatan daya saing daerah sangat bergantung pada pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusty, G.J., Damayanti, S.M., The Effect Of Foreign Direct Investment & Official Development Assistance To Human Development Index Of Developing Countries In 2009-2013, Journal Of Business And Management, Vol. 4, No.8, 2015: 882-889
- Badan Pusat Statistik (2014). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014. Jakarta: BPS.
- Curtis, T., Rhoades, D.L., & Griffin, T. (2013). Effects of Global Competitiveness, Human Development, and Corruption on Inward Foreign Direct Investment. Diakses pada 10 Februari 2016 dari http://commons.erau.edu/db/management/21/?utm_source=commons.erau.edu%2Fdbmanagement%2F21&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.
- Gardiner, Ben., Martin, Ron. & Tyler, Peter. (2004). Competitiveness, Productivity and Economic Growth across the European Regions. London: The Regional Studies Association's.
- Giap, Tan Khee, et al (2014). "Competitiveness Analysis and Development Strategies for 33 Indonesian Provinces". Singapore: World Scientific.
- Gujarati. D (1995). Basic Econometrics (3rd ed.). New York : Mc. Graw Hill
- Markovich, Klara. (2005). Competitiveness of Domestic Small and Medium Enterprises in the European Union, European Integration Studies. Diakses pada 9 februari 2016 dari www.uni-miskolc.hu/uni/res/.../markovics.doc.
- Midgley, James (1997). Social Welfare in Global Context, London: Sage Publications.
- Melliana, A. & Zain, I. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. Jurnal Sains Dan Seni Pomits, Vol. 2, No.2, 237-242.
- Moe, T. L. (2008). An empirical investigation of relationships between official development assistance (ODA) and human and educational development. International Journal of Social Economics, 35(3), 202-221
- Ogundaria, K. & Aromolaranb, A.B (2014). Impact of Education on Household Welfare in Nigeria. International Economic Journal, Volume 28, Issue 2, 2014, 345-364.
- Porter, Michael.E. (1990). "The Competitive Advantage of Nations". Harvard Business Review, March-April 1990, 73-91.
- Seldadyo, Harry. (2009). Pemekaran Daerah: Mencari Alternatif Ke Arah Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: UNDP-Bappenas.
- Siggel, Eckhard. (2007). "The Many Dimensions of Competitiveness". CESifo Venice Summer Institute.
- Soebagyo. D.. Triyono. Cahyono. Y.T.. Regional Competitiveness and Its Implications for Development. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14. Nomor 2. Desember 2013. hlm.160-171.
- Tambunan, Tulus (2014). Perekonomian Indonesia: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. TNP2K (2010). Indikator Kesejahteraan Rakyat : Pendidikan (Buku II). Jakarta: TNP2K
- TNP2K (2010). Indikator Kesejahteraan Rakyat : Kesehatan (Buku III). Jakarta: TNP2K

- Ulegin, Fusun. et.al. (2011). "The Competitiveness of Nations and Implication For Human Development". *Socio Economic Planning Sciences*, Vol.45, 16-27.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- United Nations Development Programme (2000). *Human Development Report 2000*. New York: United Nations Development Programme.
- United Nations Development Programme (2010). *Human Development Report 2010*. New York: United Nations Development Programme
- United Nations Development Programme (2014). *Human Development Report 2014*. New York: United Nations Development Programme
- Waheeduzzaman, A.N.M. "Competitiveness, Human Development and Inequality: A Cross National Comparative Inquiry. *Competitiveness Review*, Vol 12, No.2, 13-29.
- World Economic Forum (2009). *The Global Competitiveness Report 2009-2010*. Geneva: World Economic Forum.
- World Economic Forum (2013). *The Global Competitiveness Report 2013-2014*. Geneva: World Economic Forum.
- World Economic Forum (2015). *The Global Competitiveness Report 2015-2016*. Geneva: World Economic Forum. Badan Pusat Statistik (2014). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014*. Jakarta: BPS.

Ringkasan

Analisis Hubungan Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi, Neraca Perdagangan, Dan Nilai Tukar Rupiah

Pembangunan ekonomi tak pernah lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) karena pembangunan ekonomi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan melakukan perdagangan internasional yaitu kegiatan ekspor dan impor. Semua pembayaran dari hasil ekspor dan impor barang ataupun jasa dari dua negara rekanan dagang disebut neraca perdagangan. Neraca perdagangan ini akan menimbulkan perbedaan mata uang yang digunakan antar negara-negara yang bersangkutan. Akibat adanya perbedaan mata uang antar negara eksportir dan importir menimbulkan suatu perbedaan nilai tukar mata uang atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah nilai tukar atau kurs. Penelitian ini berguna untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan dengan nilai tukar atau kurs.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang akan diproduksi oleh masyarakat mengalami peningkatan. Neraca perdagangan adalah semua pembayaran dari hasil ekspor dan impor barang ataupun jasa dari dua negara rekanan dagang. Nilai tukar atau kurs adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Berdasarkan hasil analisis adalah: (1) Terdapatnya hubungan signifikan kausalitas timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dengan nilai tukar (2) Tidak ditemukannya hubungan signifikan kausalitas timbal balik antara neraca perdagangan dengan pertumbuhan ekonomi. (3) Tidak ditemukannya hubungan signifikan kausalitas timbal balik antara neraca perdagangan dengan nilai tukar.

Analisis Hubungan Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi, Neraca Perdagangan, Dan Nilai Tukar Rupiah

Martha Carolina⁵, Ade Nurul Aida⁶

Causality Between Economic Growth, Trade Balance and Exchange Rate

Abstract

This research is intended to examine the relationship between economic growth, trade balance and exchange rate. This type of research is a descriptive research with quantitative approach. Determination of the sample is based on time series data for a period of 30 years ranges from 1985 to 2015 period by using saturation sampling method, as many as 29 samples. This research was conducted by using secondary data, such as the Indonesian currency exchange rate against the US dollar published by BI and GDP data published by BPS. Based on Granger Causality Test, this result has shown that there is a significant positive correlation between economic growth and exchange rate, there was no positive correlation significantly between economic growth and net exports, and there was no positive correlation significantly between net exports and exchange rate.

Key words : *Economic growth, Trade Balance, Exchange Rate, Granger Causality Test*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada umumnya pembangunan pada negara berkembang seperti Indonesia lebih ditekankan pada pembangunan di bidang ekonomi, alasannya karena jika ekonomi mengalami pertumbuhan yang signifikan, hal ini akan membawa perubahan terjadinya kemajuan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya.

Pembangunan ekonomi tak pernah lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) karena pembangunan ekonomi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, dan

⁵ Lembaga : Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan. Alamat: Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI lt.5, Jln Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270. Alamat email penulis: tha_caroline03@yahoo.com

⁶ Lembaga : Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan. Alamat: Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI lt.5, Jln Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270. Alamat email penulis: dhena_adhe@yahoo.com

sebaliknya pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Menurut Sukarno (2009: 9), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang akan diproduksi oleh masyarakat mengalami peningkatan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis yang bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dibidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi.

Menurut teori klasik Adam Smith (dalam Suryana, 2000:53-54) terdapat 2 aspek utama penentu pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output GDP total dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan output GDP total dapat dicapai jika suatu negara memperoleh keuntungan dari kegiatan spesialisasi. Spesialisasi dapat terwujud jika tersedianya pasar yang luas untuk menampung hasil produksi. Menurut Smith, pasar yang luas dapat diperoleh dengan melakukan perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional itu sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis golongan kegiatan perdagangan yaitu kegiatan ekspor dan kegiatan impor.

Ekspor adalah upaya untuk melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada negara lain atau bangsa asing sesuai dengan peraturan pemerintah dengan mengharapakan pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komunikasi dengan bahasa asing (Amir 2001: 4). Ekspor sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti yang telah dijelaskan dalam teori Hecksher-Ohlin (dalam Appleyard, Field dan Cobb, 2008) bahwa suatu negara akan mengekspor produknya yang produksinya menggunakan faktor produksi yang murah dan berlimpah secara intensif. Kegiatan ini akan menguntungkan bagi negara tersebut, karena akan meningkatkan pendapatan nasional dan mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan, Impor merupakan pembelian atau pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian dalam negeri (Sukirno, 2006:203). Impor sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti yang telah dijelaskan dalam teori Hecksher-Ohlin (dalam Appleyard, Field dan Cobb, 2008) menyatakan bahwa suatu negara

akan mengimpor produk/barang yang menggunakan faktor produksi yang tidak atau jarang dimiliki oleh negara tersebut. Kegiatan ini akan menguntungkan bagi negara tersebut dibandingkan melakukan produksi sendiri namun tidak secara efisien. Semua pembayaran dari hasil ekspor dan impor barang ataupun jasa dari dua negara rekanan dagang disebut dengan neraca perdagangan.

Neraca perdagangan ini akan menimbulkan perbedaan mata uang yang digunakan antar negara-negara yang bersangkutan. Akibat adanya perbedaan mata uang antar negara eksportir dan importir menimbulkan suatu perbedaan nilai tukar mata uang atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah nilai tukar atau kurs. Bila suatu negara mengeluarkan uang lebih banyak untuk membayar negara rekan dagangnya daripada jumlah yang diterima sebagai pembayaran atas produk eksportnya, maka dikatakan negara tersebut mengalami defisit. Selanjutnya negara tersebut membutuhkan lebih banyak mata uang negara *partner* dagangnya yang berakibat pada melemahnya nilai tukar uang negara tersebut terhadap mata uang negara rekanan. Sedangkan kondisi banyaknya keuntungan yang diterima negara rekan bisnisnya disebut surplus, yaitu nilai tukar uang negara tersebut menguat dibandingkan mata uang negara rekanan.

Nilai tukar atau kurs adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk meperoleh 1 unit mata uang asing (Murni 2006 : 244). Nilai tukar merupakan salah satu variabel yang penting dalam suatu perekonomian terbuka, karena variabel ini berpengaruh pada variabel lain.

Berbagai studi telah dilakukan guna menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, dan nilai tukar atau kurs. Teori Mundell-Fleming (dalam Mankiw 2003: 306-307) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara kurs dengan pertumbuhan ekonomi, dimana semakin tinggi kurs maka ekspor neto (selisih antara eksport dan impor) semakin rendah, penurunan ini akan berdampak pada jumlah output yang semakin berkurang dan akan menyebabkan Produk Domestik Bruto (PDB) menurun namun juga ada ahli ekonomi yang berpendapat tidak ditemukannya hubungan kasualitas antar nilai tukar dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian Imam Mukhlis (2004) dijelaskan bahwa hubungan kausal antara nilai tukar mata uang Rp/US\$ dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1975-2004 bersifat *Undirectional causality* dari Ln (PDB) ke Ln (KURS). Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini memiliki hubungan secara tidak langsung terhadap nilai tukar Rp/US\$.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian analisa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, dan nilai tukar atau kurs. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hubungan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi dan Neraca Perdagangan Terhadap Nilai Tukar Rupiah"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan nilai tukar?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan neraca perdagangan?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan hubungan kasualitas antara neraca perdagangan dengan nilai tukar?

C. Tujuan Analisis

Tujuan yang ingin dicapai dari analisis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan nilai tukar
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan hubungan kasualitas antara pertumbuhan ekonomi dengan neraca perdagangan
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan hubungan kasualitas antara neraca perdagangan terhadap nilai tukar

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertumbuhan Ekonomi

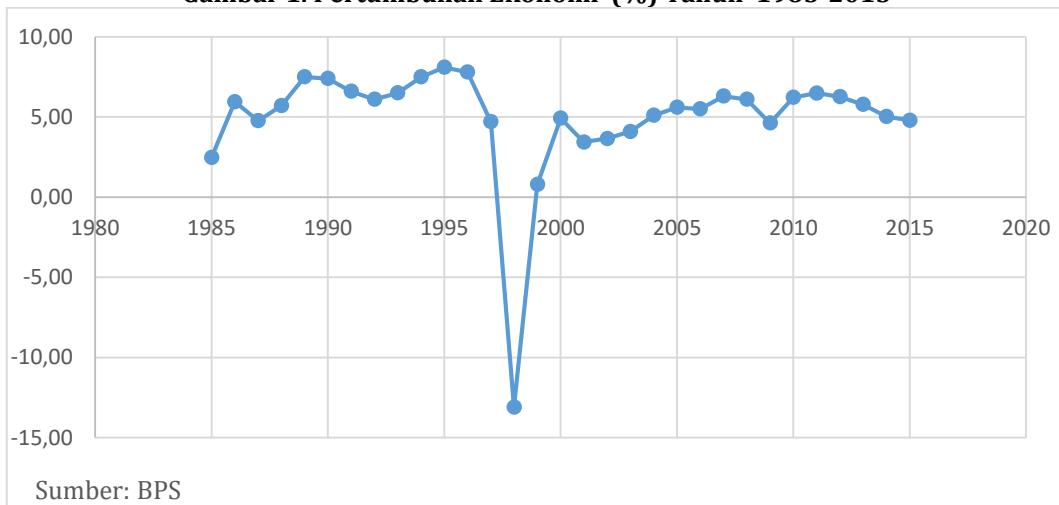
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Nanga (2005:273) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data PDB atau pendapatan per kapita.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kuznets (dalam Jhingan, 2000: 57), adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen yaitu: pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk, dan penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Dengan bahasa lain, Boediono (1999:8) menyebutkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang.

Menurut ahli-ahli ekonomi faktor yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, antara lain: Tanah dan kekayaan alam lainnya, Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, Barang-barang modal dan tingkat teknologi, serta Sistem sosial dan sikap masyarakat (Sadono Sukirno, 2004: 429-432).

Gambar 1, perkembangan trend pertumbuhan Indonesia sejak tahun 1985 – 2015 atas dasar harga konstan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi terjadi pada tahun 1993 sebesar 8,50% dan yang paling rendah adalah pada tahun 1998 sebesar -13,13% kondisi ini disebabkan penurunan sumbangan sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran sebagai efek krisis yang masih terjadi di Indonesia. Berdasarkan gambar 1 trend pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih stabil pada kondisi sebelum krisis ekonomi dibandingkan trend pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi karena salah satu indikator baiknya pertumbuhan ekonomi adalah stabilitas pertumbuhan ekonomi tersebut bukan besarnya laju pertumbuhan ekonomi dimaksud.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun 1985-2015

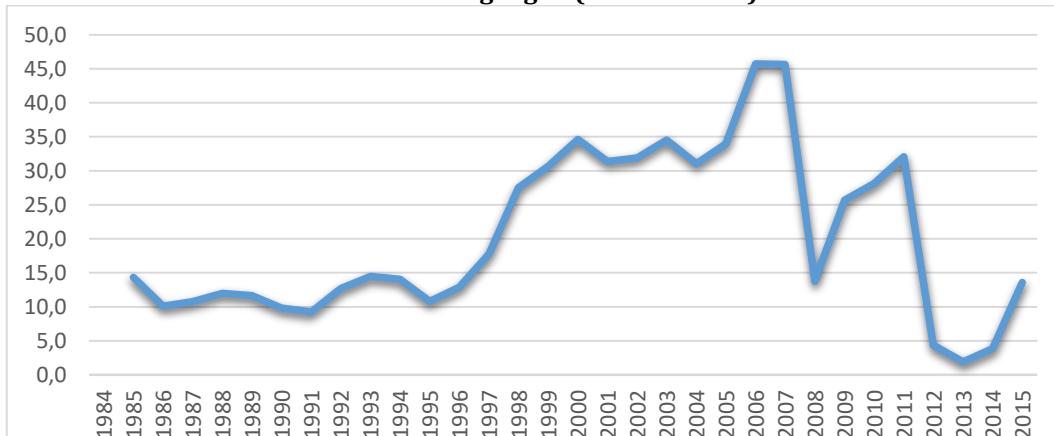
B. Neraca Perdagangan

Neraca Perdagangan atau *Ekspor Netto* adalah ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor (penjualan barang & jasa yang diproduksi di dalam negeri kepada negara asing) dan impor (pembelian barang & jasa) suatu negara kepada negara lain dalam jangka waktu tertentu. Neraca perdagangan suatu negara yang positif, artinya terjadi surplus perdagangan dan menunjukkan negara tersebut mengalami ekspor yang nilai moneternya melebihi impor. Sementara itu, neraca perdagangan suatu negara yang negatif artinya terjadi defisit perdagangan dan menunjukkan nilai moneter impornya melebihi nilai moneter ekspor.

Net ekspor merangsang meningkatnya pendapatan dan merangsang pertumbuhan ekonomi apabila jumlah ekspor lebih besar dari pada jumlah impor, sebaliknya apabila jumlah ekspor lebih kecil dari impor maka, net ekspor akan menurunkan pendapatan nasional. Berdasarkan gambar 2. trend neraca perdagangan Indonesia tahun 1985-2015 mengalami fluktuasi. Perkembangan surplus neraca perdagangan Indonesia tahun 2005-2007 selalu positif. Neraca perdagangan tahun 2007 sebesar 39.6 miliar dollar AS meningkat sebesar 11,7 miliar dollar AS. Neraca perdagangan Indonesia tahun 2008 menurun tajam pada surplus perdagangan total hal ini disebabkan oleh krisis keuangan global dan kondisi sektor perdagangan Internasional. Pada tahun 2009 neraca perdagangan terjadi peningkatan surplus dan membaik ke level 19.7 miliar dolar AS. Neraca perdagangan tahun 2010 kembali terjadi peningkatan. Neraca perdagangan tahun 2015 mengalami surplus merupakan yang tertinggi dalam periode 2011-2015 hal ini disebabkan naiknya surplus neraca perdagangan nonmigas dan menurunnya defisit neraca perdagangan migas. Perbaikan neraca perdagangan tahun 2015

semakin mendukung perbaikan kinerja transaksi berjalan Indonesia yang diperkirakan lebih baik dari tahun sebelumnya dan berada pada level yang lebih sehat.

Gambar 2. Neraca Perdagangan (Miliar Dollar) Tahun 1985-2015



Sumber: International Trade Centre

Menurut Adira (2013) neraca perdagangan sering menjadi faktor yang dapat mendorong naik atau turunnya kurs mata uang suatu negara. Kenaikan atau surplus dari neraca perdagangan akan diinterpretasikan sebagai indikasi awal kemungkinan terjadinya apresiasi suatu mata uang. Sebaliknya penurunan atau defisit neraca perdagangan akan diterjemahkan sebagai indikasi awal terjadinya depresiasi mata uang suatu negara.

C. Nilai Tukar (Kurs)

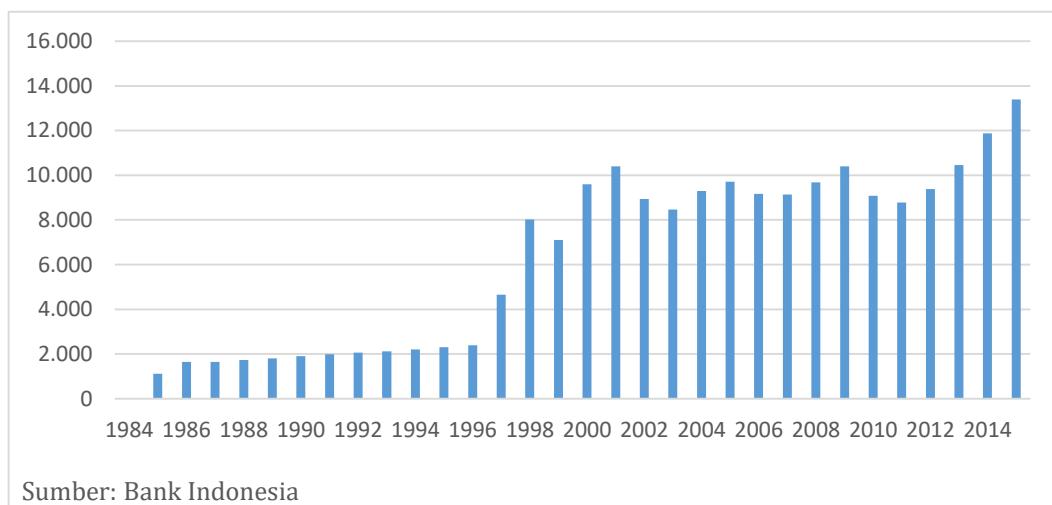
“Nilai tukar valuta asing adalah harga satu satuan mata uang dalam satuan mata uang lain. Nilai tukar valuta asing ditentukan dalam pasar valuta asing yaitu pasar tempat berbagai mata uang yang berbeda diperdagangkan” (Samuelson dan Nordhaus, 2004:305). Sementara menurut Sawaldo Puspoprano (2004:212) definisi kurs adalah: “Harga dimana mata uang suatu negara dipertukarkan dengan mata uang negara lain disebut nilai tukar (kurs).”

Menurut para ekonom, kurs dibedakan menjadi dua yaitu kurs nominal (*nominal exchange rate*), dan kurs riil (*real exchange rate*). Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara sedangkan kurs riil adalah harga relatif dari barang-barang kedua negara. Yaitu kurs riil menyatakan tingkat dimana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain. (N Gregory Mankiw, 2000:192).

Nilai tukar atau kurs mencerminkan kekuatan perekonomian sebagai akibat dari penetrasi dan efek dari perekonomian global. Semakin stabil nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, semakin menunjukkan kekuatan fundamental perekonomian negara tersebut. Dengan kata lain, pemerintah (otoritas moneter) mampu melakukan kebijakan moneter dan dari nilai tukar mata uang yang dapat mendorong peningkatan daya saing perekonomian suatu negara.

Berdasarkan gambar 2. memperlihatkan perkembangan nilai tukar atau kurs tahun 1985-2015 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Naik turunnya nilai tukar mata uang di pasar uang (apresiasi dan depresiasi) menunjukkan besarnya volatilitas yang terjadi pada mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain (Chou, 2000). Volatilitas yang semakin besar menunjukkan pergerakan kurs yang semakin besar (apresiasi/depresiasi mata uang). Hal ini memberikan gambaran terjadinya *overvalued* dan *undervalued* nilai tukar mata uang terhadap mata uang negara lainnya. Manakala nilai tukar mata uang mengalami volatilitas yang ekstrim, maka perekonomian akan mengalami ketidakstabilan baik dari sisi makro dan mikro.

Gambar 3. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 1985-2015



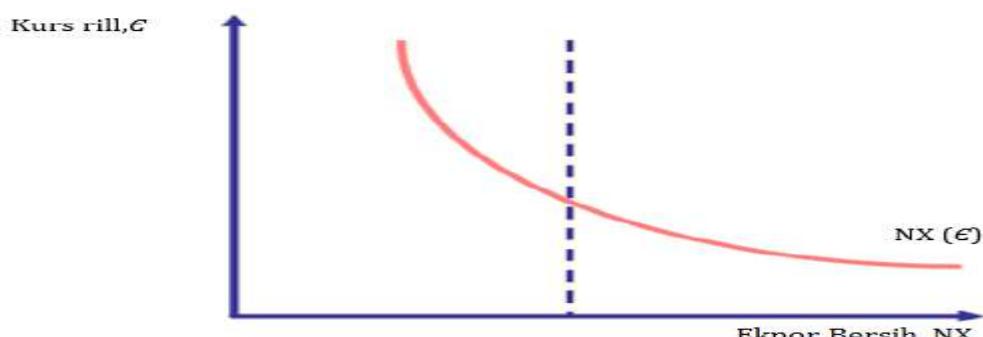
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perubahan nilai tukar suatu mata uang. Menurut Madura (2006:128), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar diantaranya tingkat inflasi relatif, suku bunga relatif, tingkat pendapatan relatif, pengendalian pemerintah, dan prediksi pasar. Sedangkan menurut Sukirno (2004: 402-403) faktor penting yang mempengaruhi perubahan kurs diantaranya yaitu perubahan dalam citarasa masyarakat,

perubahan harga barang ekspor dan impor, kenaikan harga umum (inflasi), perubahan suku bunga, tingkat pengembalian investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sarwono dan Warjiyo (1998:10) dalam perekonomian terbuka dengan *flexible exchange rate system*, gerakan nilai tukar dapat merubah harga relatif sehingga mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor. Selanjutnya gerakan nilai tukar tersebut akan mempengaruhi permintaan *aggregate*, laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Debelle dan Galati (2005) dalam penelitiannya terhadap perekonomian USD juga menyimpulkan bahwa perubahan dalam nilai tukar mata uang suatu negara akan menyebabkan perubahan dalam pertumbuhan outputnya.

Menurut Mankiw (2003:130) Nilai tukar riil suatu negara akan berpengaruh pada kondisi perekonomian makro suatu negara, khususnya dengan ekspor netto atau neraca perdagangan. Pengaruh ini dapat dirumuskan menjadi suatu hubungan antara nilai tukar riil dengan ekspor netto atau neraca perdagangan, dimana hubungan tersebut menunjukkan hubungan yang negatif antara neraca perdagangan dengan kurs riil.

Gambar 4. Ekspor Bersih dan Kurs Rill



Gambar 4. Ekspor Bersih dan Kurs Rill

Gambar 4 menunjukkan hubungan antara neraca perdagangan dan kurs riil. Semakin rendah kurs, semakin murah harga barang domestik relatif terhadap barang-barang luar negeri, dan semakin besar ekspor bersih.

III. METODOLOGI ANALISIS

A. Variabel Penelitian

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data PDB atau pendapatan per kapita. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDB dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) periode tahun 1985–2015 dalam satuan persen (%).

Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan merupakan selisih atau perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode tertentu yang diukur menggunakan mata uang yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data selisih antara nilai ekspor dan impor yang dikeluarkan oleh BPS periode tahun 1985–2015 dalam satuan USD.

Nilai Tukar

Nilai tukar (kurs) merupakan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Data nilai tukar dalam penelitian ini adalah nilai tukar mata uang Indonesia (Rupiah) terhadap mata uang Amerika Serikat (dollar) yang dinyatakan dengan IDR/USD (Indonesia Rupiah/Dollar AS). Data yang digunakan adalah kurs tengah (kurs yang disimpulkan berdasarkan hasil data kurs beli dan kurs jual) tahunan dalam perdagangan valuta asing yang dicatat oleh Bank Indonesia mulai tahun 1985-2015 dengan satuan Rupiah per Dollar AS.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter. "Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk, surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya" (Bungin, 2009:144).

C. Teknik Analisis

Penentuan Lag Optimum

Penentuan lag digunakan untuk menentukan panjang lag optimal yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya dan akan menentukan estimasi parameter untuk model VAR. Penentuan panjang lag dimanfaatkan untuk mengetahui lamanya periode keterpengaruhannya suatu variabel terhadap variabel masa lalunya maupun terhadap variabel endogen lainnya (Rosadi, 2012). Untuk menentukan panjang lag optimal pada model VAR dapat dilakukan dengan pendekatan antara lain *Akaike Information Criterion* (AIC). Lag optimal terdapat pada nilai terkecil yang didapat dari perhitungan AIC (Widarjono, 2007:378)

Uji Kausalitas Granger

Uji Kausalitas Granger pada intinya dapat mengindikasikan apakah suatu variabel mempunyai hubungan dua arah, atau hanya satu arah saja. Uji kausalitas Granger bertujuan untuk melihat pengaruh masa lalu dari suatu variabel terhadap kondisi variabel lain pada masa sekarang. Dengan kata lain, uji kausalitas Granger dapat digunakan untuk melihat apakah peramalan y dapat lebih akurat dengan memasukan lag variabel x .

Kausalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel endogen dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhannya antar variabel. Jika ada dua variabel y dan z , maka apakah y menyebabkan z atau z menyebabkan y atau berlaku keduanya atau tidak ada hubungan keduanya. Variabel y menyebabkan variabel z artinya berapa banyak nilai z pada periode sekarang dapat dijelaskan oleh nilai z pada periode sebelumnya dan nilai y pada periode sebelumnya.

Uji kausalitas dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya metode *Granger's Causality* dan *Error Correction Model Causality*. Pada penelitian ini, digunakan metode *Granger's Causality*. *Granger's Causality* digunakan untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara dua variabel. Kekuatan prediksi (*predictive power*) dari informasi sebelumnya dapat menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara y dan z dalam jangka waktu lama. Penggunaan jumlah lag (efek tunda) dianjurkan dalam waktu lebih lama, sesuai dengan dugaan terjadinya kausalitas.

Uji kausalitas Granger merupakan metode yang paling populer (Kuncoro, 2003). Uji ini dapat mengindikasikan apakah suatu variabel mempunyai hubungan dua arah atau hanya satu arah saja (Nachrowi dan Hardius, 2006). Dalam uji kausalitas Granger ini dapat dilihat adanya

pengaruh masa lalu terhadap kondisi sekarang, sehingga data yang digunakan adalah data runtut waktu (time series). Pada uji kausalitas Granger ada empat kemungkinan hasil yang diperoleh yaitu:

1. jika $\Sigma a_j \neq 0$ dan $\Sigma b_j = 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari x ke y.
2. jika $\Sigma a_j = 0$ dan $\Sigma b_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari y ke x.
3. jika $\Sigma a_j = 0$ dan $\Sigma b_j = 0$, maka tidak terdapat hubungan kausalitas antara x dan y.
4. jika $\Sigma a_j \neq 0$ dan $\Sigma b_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas dua arah antara x dan y.

Hipotesis pada uji kausalitas adalah sebagai berikut:

H_0 : suatu variabel tidak menyebabkan satu variabel lainnya.

H_a : suatu variabel menyebabkan satu variabel lainnya.

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, mempunyai hubungan kausalitas dengan Nilai tukar Rupiah. Penentuan jika nilai probabilitas dari kedua hipotesis di atas lebih kecil dari nilai kesalahan yang dapat ditolerir yaitu 0,05 maka keduanya diputuskan untuk menolak H_0 . Hal ini diinterpretasikan bahwa antara satu variabel dengan satu variabel lainnya saling mempengaruhi secara timbal balik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Lag Optimum

Pengolahan data dalam penulisan ini menggunakan program statistik yaitu eviews versi 8. Untuk melakukan uji kausalitas, perlu terlebih dahulu ditentukan panjang lag optimalnya, karena uji tersebut sangat peka terhadap banyak lag optimalnya. Dalam penelitian ini, penentuan panjang lag optimal dengan melihat nilai AIC yang paling rendah / minimum. Berikut hasil VAR Lag Order Selection secara lengkap:

Tabel 1. Var Log Order

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: LNNP LNNT LNPE

Exogenous variables: C

Date: 07/15/16 Time: 12:11

Sample: 1985 2015

Included observations: 29

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-81.09447	NA	0.066276	5.799619	5.941063	5.843917
1	-21.36269	102.9858	0.002014	2.300875	2.866652	2.478069
2	-2.877312	28.04677*	0.001072*	1.646711*	2.636822*	1.956802*

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

Dari hasil uji penentuan lag diatas, didapat lag optimal yang digunakan adalah lag 2 karena menghasilkan AIC terendah.

B. Uji Kausalitas (Granger) antara Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar, dan Neraca Perdagangan

Dalam uji ini, ingin melihat hubungan kausal antara Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar, dan Neraca Perdagangan. Hasil uji kausalitas dapat diketahui dengan melihat nilai probabilitasnya. Kriteria keputusan yang dipakai adalah H_0 ditolak jika nilai α kurang dari 5%. Jika H_0 ditolak, maka terdapat hubungan kausal. Adapun panjang lag yang digunakan adalah sesuai dengan hasil uji lag yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu lag 2

Tabel 2. Pairwise Granger Causality Tests

Null Hypothesis:	Obs	Statistic	F-	Prob.
LNNT does not Granger Cause LNNP	29	0.77863	0.4703	
LNNP does not Granger Cause LNNT		0.23465	0.7926	
LNPE does not Granger Cause LNNP	29	0.35371	0.7057	
LNNP does not Granger Cause LNPE		0.19293	0.8258	
LNPE does not Granger Cause LNNT	29	3.42327	0.0492	
LNNT does not Granger Cause LNPE		15.8130	4.E-05	

Keterangan: NT: Nilai Tukar Rupiah, NP: Neraca Perdagangan, PE: Pertumbuhan Ekonomi

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil uji granger dapat diketahui hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar, dan Neraca Perdagangan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi secara statistik signifikan mempengaruhi nilai tukar, begitupula sebaliknya variabel nilai tukar rupiah secara statistik signifikan mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi yang dibuktikan dengan nilai probabilitas masing-masing lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0492 dan 0,00004 (hasil keduanya adalah hipotesis nol (H_0) ditolak) sehingga disimpulkan bahwa terjadi kasualitas antara kedua variabel nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kazi Mohammed Kamal Udin dan Mohamad Morsehedur (2014) terdapat hubungan kasualitas antara nilai tukar dengan pertumbuhan ekonomi dengan variabel proksi GDP di Bangladesh selama 41 tahun.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel neraca perdagangan begitupula sebaliknya, variabel Neraca Perdagangan secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga H_0 dapat diterima yang dibuktikan dengan probabilitas masing-masing lebih besar dari 0,05 yaitu 0,7057 dan 0,8258 (hasil keduanya adalah terima H_0 sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi kasualitas apapun untuk kedua variabel hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Deny

Julian (2005) tidak ditemukannya hubungan kasualitas antar variabel neraca perdagangan dan GDP di Indonesia dengan menggunakan data runtun waktu (*time series*) periode 1970-2005. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif.

3. Variabel Neraca Perdagangan secara statistik tidak signifikan mempengaruhi nilai tukar rupiah dan begitupula sebaliknya variabel nilai tukar rupiah secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel neraca perdagangan. Hal itu berbeda dengan penelitian Ade Yulianti Rahayu (2011) dengan menggunakan tingkat probability (α) 5% hasil uji kausalitas Granger sebagaimana ditunjukkan memperlihatkan bahwa hubungan kasualitas antara pertumbuhan ekonomi dengan net ekspor hanya bersifat satu arah terjadi dengan pola perubahan nilai PDB di masa sekarang, namun perubahan PDB di masa lalu mempunyai pengaruh terhadap perubahan nilai net ekspor di masa sekarang. Arah hubungan kasualitas yang satu arah ini dikarenakan variabel yang digunakan adalah net ekspor yang merupakan pengurangan dari nilai ekspor dengan nilai impor. Hasil penelitian ini juga sangat jauh berbeda dengan teori yang seharusnya terjadi hubungan kasualitas antara variabel nilai tukar riil dan ekspor netto. Jika ekspor netto meningkat maka rupiah akan mengalami apresiasi, begitu pula jika ekspor netto menurun maka rupiah akan mengalami depresiasi. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri Muliasari (2015) tidak ada hubungan saling mempengaruhi antara variabel ekspor netto dan nilai tukar riil ekspor netto secara statistik tidak signifikan mempengaruhi nilai tukar riil dibuktikan dari probabilitas sebesar 0,9392 yang lebih besar dari 0,05. Hal serupa juga terjadi pada variabel nilai tukar riil yang secara signifikan tidak mempengaruhi ekspor netto dengan nilai probabilitas 0,9837 yang lebih besar dari 0,05.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uji granger, dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel pertumbuhan ekonomi secara statistik signifikan mempengaruhi nilai tukar begitupula sebaliknya variabel nilai tukar rupiah secara statistik signifikan mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel neraca perdagangan begitupula sebaliknya, variabel Neraca Perdagangan secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

3. Variabel Neraca Perdagangan secara statistik tidak signifikan mempengaruhi nilai tukar rupiah dan begitupula sebaliknya variabel nilai tukar rupiah secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel neraca perdagangan.

B. Rekomendasi

Pemerintah perlu memperhatikan mekanisme kebijakan moneter karena variabel pertumbuhan ekonomi secara statistik signifikan mempengaruhi nilai tukar begitupula sebaliknya variabel nilai tukar rupiah secara statistik signifikan mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi. Semakin efektif kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas kurs nilai tukar, maka stabilitas makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih terjaga dalam konstelasi perekonomian dunia yang semakin mengglobal dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Yulianti Rahayu. (2010). *Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment di Indonesia (Periode 1990-2010)*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Amir, M.S. (2001). *Eksport Impor Teori & Penerapannya*. PPM: Jakarta
- Appleyard, D. R., J.F. Field and S.L. Cobb. (2008). *International Economics*. New York: McGraw-Hill.
- Boediono. (1999). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE
- Debelle, G dan G. Galati. (2005). *Current Account Adjustment and Capital Flows*. BIS Working Paper, No.169, February
- Deny Julian. (2005). *Uji Kausalitas Granger Antara Nilai Tukar, GDP, Neraca Perdagangan di Indonesia Periode 1970-2005*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Jhingan. (2000). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : Rajawali Press Mada University Press
- Kamal Uddin, K. M., Rahman, M. M., & Ali Quaosar, G. A. (2014, November). Causality Between Exchange Rate And Economic Growth In Bangladesh. *European Scientific Journal, 10*.
- Mankiw, N. Gregory. (2003). *Teori Makro Ekonomi Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga
- Murni, Asfia. (2006). *Ekonomika Makro*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Nachrowi, D Nachrowi & Usman Hardius. (2006). Pendekatan Poluler dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: FEUI
- Nanga, Muana (2005). *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Putri Muliasari. (2013). *Hubungan Kausalitas Antara Nilai Tukar Rupiah, dan Ekspor Neto*. Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Rosadi, Dedi. (2012). *Ekonometrika & Analisis Rantun Waktu Terapan*. Yogyakarta: CV Andi Offset (Penerbit Andi).
- Sarwono, Hartadi A dan Perry Warjiyo. (1998). *Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter Dalam Sistem Nilai Tukar Fleksibel*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Buletin ekonomi Moneter dan Perbankan Volume 1, Nomor 1, Juli 1998. Bank Indonesia. Jakarta.
- Sukarno, Wirokartono. 2009. *Pembangunan Provinsi Gorontalo: Perencanaan dengan Indeks Pembangunan Manusia*. Gorontalo: BridGe
- Sukirno, Sadono. (2004). Makroekonomi : Teori Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono. (2006). Makroekonomi: Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.

Ringkasan

Analisis Pengaruh Belanja Negara Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Belanja negara menjadi motor utama penggerak perekonomian suatu negara yang tercermin melalui anggaran negara/APBN yang ditetapkan setiap tahunnya. Pemerintah selaku pelaksana (eksekutif) kebijakan memiliki peran besar dalam menentukan indikator perekonomian dalam batas-batas yang dapat berdampak positif bagi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama suatu perekonomian, meskipun tak dapat dihindari bahwa pergerakannya akan berkorelasi dengan tingkat inflasi. Menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah agar dalam waktu yang bersamaan perekonomian dapat terus tumbuh.

Peningkatan alokasi belanja negara setiap tahunnya diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi. Meskipun dalam kenyataannya, belanja pemerintah pusat – sebagai salah satu komponen terbesar dari belanja negara setelah transfer ke daerah – kontribusinya dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Hal inilah yang mendorong untuk dilakukan penelitian tentang pengaruh belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh satu arah yaitu belanja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan prioritas atas belanja yang secara langsung memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjaga atau meningkatkan daya beli masyarakat sebagai salah satu indikator inflasi.

Analisis Pengaruh Belanja Negara Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Slamet Widodo⁷ dan Dahiri⁸

Analysis Impact of State Expenditure Toward Inflation and Economy Growth

Abstract

State expenditure continue to increase every year. The increasing number is expected to boost the economic growth. However, it can not be ascertained whether it has a positive or negative influence to economic growth. They depends on government policy. The results of the analysis explained that state expenditure has one way effects to economic growth and inflation.

Keywords: State Expenditure, Inflation, Economic Growth

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

APBN memuat rencana kerja tahunan pemerintah sebagaimana tercermin dalam prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan setiap tahunnya. Prioritas pembangunan ini tentunya menuntut adanya alokasi anggaran yang bersumber dari penerimaan maupun dari pembiayaan. Sumber penerimaan negara ditentukan dari besaran asumsi makro yang melandasi penyusunan postur APBN yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya.

Ada beberapa faktor yang menentukan kondisi APBN, antara lain estimasi atau prediksi besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang secara langsung maupun tidak langsung menentukan besaran berbagai komponen APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, defisit APBN, maupun pembiayaan anggaran yang akhirnya dapat berpengaruh pada postur APBN secara keseluruhan. Asumsi ekonomi makro terdiri dari beberapa indikator yaitu : pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar US, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia's Crude Price/ ICP*), lifting minyak, dan lifting gas. Asumsi ekonomi makro tersebut dibahas oleh Pemerintah bersama DPR RI dengan tetap mempertimbangkan perkembangan ekonomi domestik maupun global agar asumsi yang digunakan dapat merepresentasikan kondisi perekonomian terkini.

⁷Lembaga : Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan. Alamat: Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI lt.5, Jln Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270

⁸Lembaga : Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan. Alamat: Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI lt.5, Jln Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270

Dalam pelaksanaan APBN, seiring dengan perkembangan ekonomi di tingkat global dan regional, asumsi dasar ekonomi makro seringkali mengalami perubahan signifikan sehingga perlu dilakukan perubahan agar APBN bisa berjalan dengan sehat dan sesuai dengan kondisi yang terjadi dan syarat perubahan APBN harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Perubahan asumsi ekonomi makro perlu mempertimbangkan banyak hal yaitu kondisi ekonomi global dan regional/domestik yang juga menentukan besaran pendapatan, belanja, defisit, dan pemiyaan.

Kebutuhan pemiyaan atas program-program prioritas pembangunan, selanjutnya menentukan besaran belanja. Kekurangan atau kelebihan penerimaan dalam membiayai kebutuhan prioritas pembangunan akan tercermin dalam besaran pemiyaan APBN. Komponen-komponen dalam APBN inilah yang kemudian membentuk postur APBN yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya dan yang menentukan apakah APBN mengalami kondisi surplus, defisit, atau berimbang.

Jika besaran Pendapatan Negara dan Hibah lebih besar dari besaran belanja negara maka APBN dikatakan surplus, namun sebaliknya APBN dikatakan defisit. Indonesia menerapkan sistem anggaran defisit dalam APBN dengan kata lain, fokus pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat menjadi salah satu tujuan pelaksanaan APBN dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, terutama pemiyaan dan utang.

Defisit anggaran bukanlah hal yang negatif dalam pengelolaan keuangan negara sepanjang batasannya dapat ditaati dan dikelola dengan penuh kehati-hatian. Tujuan defisit dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendapatan negara guna membiayai prioritas pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian, agar secara bertahap tujuan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Salah satu indikator dalam APBN yang dapat menentukan seberapa besar likuiditas APBN dalam mengelola defisit anggaran adalah keseimbangan primer.

Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan positif, yang berarti masih tersedia dana yang cukup untuk membayar bunga utang. Sebaliknya, jika total pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan negatif, yang berarti sudah tidak tersedia dana untuk membayar bunga utang. Dengan kata lain, sebagian atau seluruh bunga utang dibayar dengan penambahan utang baru (Kementerian Keuangan).

Kondisi defisit APBN ini menjadi salah satu problem utama penganggaran pembangunan nasional. Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto (PDB). Meskipun batasan defisit pembiayaan anggaran dan hutang telah ditetapkan, persoalannya bukan semata kuantitas besaran defisit namun bagaimana pemerintah dapat menjaga defisit anggaran dan hutang pada tingkat yang aman sehingga hal tersebut tidak membebani APBN setiap tahunnya. Dampak serius buruknya pengelolaan defisit adalah terjadinya akumulasi utang sebagai akibat pemerintah secara terus menerus menjual Surat Utang Negara, atau bahkan terganggunya kedaulatan Negara akibat ketergantungan yang tinggi atas sumber pembiayaan dari luar negeri.

Pengeluaran pemerintah/belanja negara menjadi salah satu komponen APBN yang menjadi roda penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai pos seperti belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, belanja subsidi dan bantuan sosial, serta belanja lain-lain. Pengeluaran pemerintah ini menjadi input bagi seluruh rumah tangga ekonomi yang terakumulasi dalam besaran pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa

$$Y = C + I + G + X - M.$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

C = Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga Konsumen (RTK)

I = Pengeluaran Investasi Rumah Tangga Produsen (RTP)

G = Pengeluaran pemerintah dari Rumah Tangga Pemerintah (RTG)

X = Ekspor

M = Impor

Dalam konsep ini, konsumsi umumnya menjadi komponen terbesar dalam membentuk pertumbuhan ekonomi (PDB) yaitu pengeluaran rumah tangga terhadap barang atau jasa. Sedangkan investasi merupakan pengeluaran investasi, seperti pembelian mesin dan perlengkapan pabrik. Pengeluaran pemerintah termasuk didalamnya belanja pemerintah terhadap barang atau jasa, belanja pegawai , dan pengeluaran investasi yang dilakukan oleh

pemerintah, tapi tidak termasuk pembayaran transfer seperti jaminan/tunjangan sosial. Ekspor menggambarkan ekspor bruto yang dihasilkan suatu negara, termasuk barang dan jasa bagi kepentingan konsumsi negara lain, sedangkan impor merupakan jumlah bruto atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri dari negara lain.

Mengingat peranan pengeluaran pemerintah sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tentunya ini juga membawa implikasi terhadap besaran inflasi yang terjadi dalam pelaksanaan tahun anggaran yang bersangkutan.

Pada prinsipnya tidak semua inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari tingkat keparahannya inflasi terbagi menjadi empat, yaitu :

1) Inflasi ringan (*creeping inflation*)

Adalah inflasi yang lajunya kurang dari 10 persen setahun, sehingga inflasi ini tidak begitu dirasakan. Inflasi ini sering disebut juga inflasi yang merayap, dan tidak begitu mengganggu perekonomian secara nasional.

2) Inflasi sedang

Adalah inflasi yang lajunya antara 10 - 30 persen setahun. Pada tingkatan ini mulai dapat dirasakan naiknya harga-harga meski tidak begitu signifikan, dan jika tidak segera diatasi akan menjadi inflasi berat.

3) Inflasi berat

Inflasi yang lajunya berada pada batas antara 30 - 100 persen setahun. Pada tingkat ini harga-harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Indonesia pernah mengalami inflasi berat pada tahun 1998. Pada waktu itu inflasi per Desember mencapai 77,63 persen .

4) *Hiperinflasi*

Jenis inflasi ini sangat dirasakan karena dapat terjadi secara besar-besaran dan jika diukur berada di atas 100 persen setahun. Di Indonesia pada tahun 1966 pernah mengalami inflasi sebesar 600 persen , hal ini disebabkan pencetakan uang baru secara besar-besaran untuk menutup defisit anggaran pada waktu itu.

Untuk menghindari inflasi yang dapat mencederai pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu mengelola pengeluarannya secara profesional dan penuh kehati-hatian tidak hanya dalam koridor menjaga besaran defisit keuangan negara namun juga implikasinya terhadap besaran inflasi yang dihasilkan dari pengeluaran pemerintah tersebut.

Oleh karena itu, optimalisasi belanja negara menjadi salah satu upaya bagi pemerintah untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penetapan prioritas pengeluaran negara secara selektif pada pos-pos yang memang mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan tetap menjaga dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Belanja negara merupakan penjumlahan dari alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Secara ringkas, masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut :⁹

1. Belanja Pemerintah Pusat, yang terdiri dari:

- a) Belanja pegawai, yaitu belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi, dalam bentuk uang atau barang, yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- b) Belanja barang, adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.
- c) Belanja modal, adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
- d) Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik yang berasal dari dalam negeri maupun utang luar negeri, rupiah ataupun valas, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.
- e) Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat

⁹ Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia Edisi II, Kemenkeu RI

terjangkau oleh masyarakat (Undang-Undang tentang APBN). Pos subsidi ini terdiri dari:

- 1) Subsidi BBM
 - 2) Subsidi Listrik
 - 3) Subsidi Pangan
 - 4) Subsidi Pupuk
 - 5) Subsidi Benih
 - 6) Subsidi/Bantuan PSO
 - 7) Subsidi Bunga Kredit Program
 - 8) Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)
- f) Belanja hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diteruskan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antar pemberi hibah dan penerima hibah.
- g) Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/Lembaga (Pemerintah) dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya "risiko sosial", meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.
- h) Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk membiayai keperluan lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran, keperluan yang bersifat *ad hoc* (tidak terus menerus), kewajiban Pemerintah berupa kontribusi atau iuran kepada organisasi/lembaga keuangan internasional yang belum ditampung dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga, dan dana cadangan risiko fiskal serta mengantisipasi kebutuhan mendesak.

2. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.
 - a) Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk *block grant*, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - b) Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ruang Lingkup dana Otsus terdiri dari (a) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (b) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh; dan (c) dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat .
 - c) Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan. Ruang lingkupnya terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), Dana insentif daerah (DID), dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Mulai APBN tahun 2016 nomenklatur dana penyesuaian diubah menjadi DAK Non Fisik.

- d) Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e) Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan

B. Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan bagian dari asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBN, sehingga perlu kecermatan dalam menentukan besaran ekonomi makro tersebut. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro dalam pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh besaran belanja Negara setiap tahunnya. Dalam rumusan masalah akan dikaji mengenai pengaruh belanja negara terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

C. Tujuan Analisis

Berdasarkan perumusan masalah di atas, secara garis besar analisis ini bertujuan untuk :

- 1. Menganalisis pengaruh belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi
- 2. Menganalisis pengaruh belanja negara terhadap inflasi

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Pasal 1 ayat (7), APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan instrumen untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Dalam menyusun APBN, perencanaan alokasi belanja negara diarahkan untuk mendorong alokasi sumber-sumber ekonomi agar dapat digunakan secara produktif, yaitu terjadinya realokasi faktor-faktor produksi yang akan digunakan secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi khususnya dalam stabilitas perekonomian nasional.

APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan adalah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mengarahkan perekonomian nasional dan menstimulus pertumbuhan ekonomi sehingga besarnya penyerapan akan berdampak pada semakin besarnya daya dorong terhadap pertumbuhan dan sebaliknya. Besaran postur APBN dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro, yang secara langsung maupun tidak langsung menentukan besaran berbagai komponen APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, defisit APBN, maupun pembiayaan anggaran yang akhirnya dapat berpengaruh pada postur APBN secara keseluruhan.
2. Kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagai *baseline* penyusunan APBN berikutnya berdasarkan capaian kinerja pemerintah pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Parameter-parameter yang sifatnya spesifik seperti jumlah wajib pajak dan tarif pajak, besaran volume BBM bersubsidi, jumlah rumah tangga sasaran untuk perhitungan subsidi raskin.
4. Kebijakan Pemerintah yang sifatnya untuk menstimulus perekonomian atau karena adanya mandat UU, seperti anggaran pendidikan, kesehatan, dan dana desa.

Keempat faktor tersebut secara umum akan menentukan kondisi postur APBN baik terhadap sisi komponen pendapatan maupun belanja negara. Selain itu, keempat faktor tersebut selanjutnya akan menentukan apakah postur APBN akan mengalami kondisi surplus, berimbang, atau defisit serta menentukan kebijakan dan besaran pada komponen pembiayaan anggaran.

Kebutuhan anggaran defisit menjadi tidak terelakan bila dilihat dari peran pemerintah dan fungsi APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. APBN dari tahun 2000 sampai APBN tahun 2016 selalu mengalami defisit. Menurut Rahardja dan Manurung (2004) defisit anggaran adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ($G > T$). Anggaran yang defisit ini ditempuh untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Meskipun dalam pelaksanaannya

berimplikasi pada besaran inflasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, dari target pertumbuhan ekonomi, perlu didukung oleh perkiraan besaran asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan dalam penyusunan postur APBN dan mempengaruhi besaran berbagai komponen APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, defisit APBN, maupun pembiayaan.

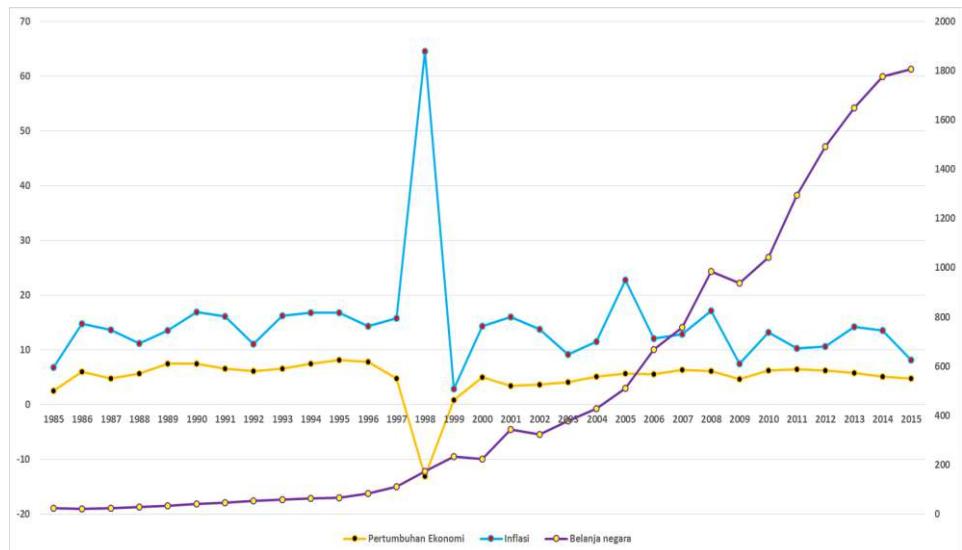
III. METODOLOGI ANALISIS

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *granger causality*. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kemudian untuk melihat arah hubungan belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi menggunakan regresi. Data yang digunakan adalah *time series* belanja negara, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi dari tahun 1985-2015.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Belanja negara setiap tahun hampir mengalami kenaikan. Kenaikan besaran belanja negara diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga tingkat inflasi dalam batas-batas yang dapat ditolerir oleh perekonomian.

Gambar 1. Perkembangan belanja negara, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi



Sumber : Kemenkeu, data diolah

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa belanja negara cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi mengalami fluktuasi. Fluktuasi yang terjauh terjadi pada tahun 1998 saat kondisi perekonomian mengalami krisis moneter.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh belanja terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hasil uji statistik untuk melihat hubungan antara belanja negara dan pertumbuhan ekonomi yaitu belanja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sebaliknya tidak berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan besaran belanja negara bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2. Uji Belanja negara dan pertumbuhan ekonomi

Pairwise Granger Causality Tests			
Date: 07/14/16 Time: 12:20			
Sample: 1985 2015			
Lags: 3			
Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
LNPE does not Granger Cause LNBLNJ	28	3.31933	0.0396
LNBLNJ does not Granger Cause LNPE		1.47623	0.2497

Arah hubungan belanja dan pertumbuhan ekonomi yaitu positif. Model regresi diperoleh yaitu: Pertumbuhan ekonomi=0,000407 belanja negara + 4,798398. Signifikansi dari variabel independent belanja 0,7387 dan variabel lain selain belanja 0,0000. R-squared dari model sebesar 0,004036 atau 0,0407 persen.

Kemudian hasil uji statistik untuk melihat hubungan antara belanja negara dan inflasi yaitu belanja mempengaruhi inflasi. Sedangkan sebaliknya tidak berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan besaran belanja negara bisa mendorong inflasi.

Gambar 3. Uji Belanja negara dan inflasi

Pairwise Granger Causality Tests			
Date: 07/14/16 Time: 12:48			
Sample: 1985 2015			
Lags: 3			
Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
INFLASI does not Granger Cause LNBLNJ	28	4.99918	0.0090
LNBLNJ does not Granger Cause INFLASI		2.16928	0.1218

Arah hubungan belanja dan inflasi yaitu positif. Model regresi diperoleh yaitu: Inflasi = 0,524309 belanja negara. Signifikansi dari variabel independent belanja 0,0000. R-squared dari model sebesar 0,242550 atau 24,2550 persen.

Belanja negara pada dasarnya diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat inflasi. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa belanja bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Belanja negara tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan koefisien determinasinya sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,0407 persen. Sedangkan belanja negara signifikan dalam mempengaruhi inflasi dan koefisien determinasinya cukup besar yaitu 24,2550 persen.

Faktor lain selain belanja negara, signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan postur belanja negara memiliki banyak komponen. Tidak semua komponen belanja negara berpengaruh langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh pada tahun anggaran. Misalnya proyek infrastruktur dampaknya setelah proyek selesai, proyek selesai juga belum bisa dipastikan pada tahun anggaran. Bahkan proyek infrastruktur berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu panjang. Selain itu, dalam penelitian ini hanya terbatas melihat hubungan belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlunya analisis ini karena belanja negara hampir setiap tahun terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan belanja tersebut belum bisa dipastikan memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kemudian pada inflasi hanya belanja negara yang signifikan dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar belanja negara bisa mendorong inflasi. Koefisien determinasi hanya sebesar 24,2550 persen. Dikarenakan belanja negara ada yang berhubungan langsung dengan inflasi dan ada yang tidak langsung.

Belanja negara tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun signifikan dalam mempengaruhi inflasi. Belanja negara dalam APBN terdiri dari belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, dan pembayaran bunga utang. Adapun belanja yang sifatnya tidak mengikat antara lain, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Dari seluruh komponen tersebut, kenaikan signifikan terjadi pada komponen belanja pegawai, yang dialokasikan untuk membayar gaji/honorarium PNS, tunjangan, kenaikan gaji berkala, dan pensiun. Meskipun belanja negara tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun kenaikannya dalam

tahun ke tahun dapat memicu terjadinya inflasi dalam bentuk kenaikan harga barang-barang. Komponen lain dalam belanja negara adalah besaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang juga turut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini sebagai *mandatory spending* yang harus dipenuhi pemerintah sesuai dengan mandat konstitusi.

Meskipun belanja negara tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, bila merujuk pada teori pendapatan nasional berdasarkan pada pendekatan pengeluaran pemerintah, maka dapat dipastikan bahwa kontribusi sektor-sektor di luar pemerintah seperti konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor dan impor secara akumulatif memberi sumbangan bagi peningkatan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Belanja negara signifikan dalam mempengaruhi inflasi. Kebijakan pemerintah dalam mengelola inflasi tercermin melalui besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah pada sektor-sektor yang menjadi penyumbang inflasi. Salah satu sektor yang menjadi komponen terbesar penyumbang inflasi adalah bahan makanan, dalam hal ini adalah beras. Besarnya alokasi anggaran untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan turut mempengaruhi seberapa besar inflasi yang dihasilkan. Kebijakan lainnya yang turut berpengaruh terhadap inflasi adalah kebijakan penetapan harga atas komoditas tertentu oleh pemerintah atau dikenal dengan Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*). Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah yaitu inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, diantaranya harga BBM bersubsidi, tarif listrik, dan tarif angkutan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Belanja negara merupakan upaya menggerakkan roda perekonomian nasional. Belanja negara setiap tahun hampir mengalami kenaikan. Namun kenaikan tersebut belum bisa dipastikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dari hasil analisis data diperoleh hubungan yang signifikan antara belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Arah hubungan keduanya yaitu linier positif dan signifikan, kecuali belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat alokasi belanja pegawai dan belanja barang baik dalam komponen belanja pemerintah pusat maupun dalam komponen transfer ke daerah, terutama Dana Alokasi Khusus, proporsinya lebih besar

dibandingkan dengan alokasi belanja modal dalam komponen belanja pemerintah pusat dan dana alokasi khusus dalam komponen transfer ke daerah.

B. Rekomendasi

Pengaruh langsung belanja negara terhadap tingkat inflasi yang memiliki hubungan linier dan signifikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan prioritas belanja dalam penyusunan APBN. Alokasi belanja pegawai yang kian meningkat dari tahun ke tahun dapat berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Mengingat penelitian ini memiliki keterbatasan pada tiga variabel yaitu belanja negara, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi dan tidak memperhatikan variabel selain belanja, pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dalam beberapa tahun belakangan ini bisa jadi didukung oleh investasi sektor swasta.

Data statistik menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja pemerintah pusat ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan kontribusinya terhadap pembentukan produk domestik bruto. Pemerintah harus fokus untuk memperbesar alokasi belanja modal guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran. 2014. Postur Apbn Indonesia
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran. 2014. Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia, Edisi II
- Lestari, Sri Rahayu. 2011. *Outlook Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga*. Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. 2004. *Teori ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suparmoko M.A. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Walpole, Ronal. 1993. Pengantar Statistika. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Ringkasan

Profil Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Wilayah Kota Palangka Raya di Provinsi Kalimantan Tengah

Kesenjangan antar wilayah merupakan salah satu tantangan pembangunan di Indonesia. Pembangunan berbasis kewilayahan yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi permasalahan kesenjangan antar wilayah. Menurut Diaan Yi – Lin, dengan melakukan pembangunan infrastruktur, maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Apabila pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan terjadinya pemerataan pertumbuhan ekonomi. Salah satu sumber pendanaan pembangunan adalah APBN. Mengingat terbatasnya dana APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis mengenai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pengetahuan tentang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, diharapkan pengalokasian dana APBN dapat dilakukan secara optimal dan menghasilkan manfaat yang maksimal.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang tengah berkembang di kawasan tengah Indonesia. Kota Palangka Raya merupakan ibu kota Kalimantan Tengah. Kondisi perekonomian di Kota Palangka Raya dapat menjadi akselerator pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Tengah. Besarnya pengaruh yang diberikan kota Palangka Raya terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah, maka tulisan ini disusun untuk mengetahui sektor unggulan perekonomian wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya sebagai bahan referensi dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kota Palangka Raya mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, namun tidak mendominasi perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah. Sektor yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya antara lain sektor jasa, perdagangan, komunikasi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Profil Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Wilayah Kota Palangka Raya di Provinsi Kalimantan Tengah

Handriyanto Setiadi dan Ratna Christiantianingrum¹⁰

Profile Economic Growth and Potential Areas of Palangkaraya City in Central Kalimantan Province

Abstrak

Trade area sector manifestly have important role in fostering and growth of economics in a region. Palangka Raya become one of the priority of Central Kalimantan development of its one program content is development of center industrial area, service area, and trade area. Research of regional potency analysis for the development aims to determine the characteristics of trading activity in Palangka Raya, find the relationship/linkages between Palangka Raya and surrounding areas.

Kata Kunci: Sektor Unggulan, Klassen Typology, Location Quotient dan Shift Share

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenjangan antar wilayah merupakan salah satu tantangan pembangunan di Indonesia. Selama 30 tahun terakhir, kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia mencapai 80 persen dari PDB (RPJMN,2015). Kawasan Barat Indonesia mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Pembangunan berbasis kewilayahan yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi permasalahan kesenjangan antar wilayah. Pembangunan berbasis kewilayahan dilakukan melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus (RPJPN,2008).

Menurut Diaan Yi – Lin, dengan melakukan pembangunan infrastruktur, maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Apabila pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan terjadinya pemerataan pertumbuhan ekonomi. Salah satu sumber pendanaan pembangunan adalah APBN. Mengingat terbatasnya dana APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis mengenai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pengetahuan tentang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, diharapkan pengalokasian dana APBN dapat dilakukan secara optimal

¹⁰ Penulis adalah Analis APBN pada Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI.

dan menghasilkan manfaat yang maksimal, khususnya dalam hal menstimulus pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan.

Sebagai contoh pada agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015–2019, terangkum arah kebijakan pengembangan kawasan strategis percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah yang selaras serta peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Perencanaan pembangunan ini kemudian dipergunakan pemerintah untuk menyusun strategi pembangunan, seperti misalnya pengembangan potensi ekonomi wilayah: Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, baik yang telah ada maupun yang baru sesuai dengan potensi unggulan tiap wilayah.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang tengah berkembang di kawasan tengah Indonesia. Perekonomian Kalimantan Tengah bergantung pada sektor pertanian, khususnya perkebunan. Pada tahun 2009 sektor perkebunan menyumbang 33 persen dari PDB Kalimantan Tengah dan menyumbang 1,49 persen dari total pertumbuhan ekonomi. Kota Palangka Raya merupakan ibu kota Kalimantan Tengah. Kondisi perekonomian di Kota Palangka Raya dapat menjadi akselerator pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Tengah. Besarnya pengaruh yang diberikan kota Palangka Raya terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah, maka tulisan ini disusun untuk mengetahui sektor unggulan perekonomian wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya sebagai bahan referensi dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

B. Rumusan Masalah

Sebagai dasar perlunya dilakukan analisis ini, masalah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana profil pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Apa yang menjadi sektor basis dan non basis dari Kota Palangka Raya sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah?
3. Bagaimana perubahan dan pergeseran antar sektor selama kurun waktu tertentu.
4. Potensi ekonomi dan sektor unggulan Kota Palangka Raya sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Analisis

Secara umum penelitian dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu untuk mengetahui gambaran pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor basis dan non basis hingga pergeseran-pergeseran yang terjadi pada kurun waktu tertentu di Provinsi Kalimantan Tengah dan secara khusus di Kota Palangka Raya. Sedangkan secara khusus penelitian dilakukan sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan arah dan strategi pembangunan, termasuk program-program prioritas yang akan dilihat dengan gambaran sektor-sektor unggulan yang menjadi potensi ekonomis bagi Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan daerah merupakan bagian yang integral dalam pembangunan nasional, karena itu diharapkan bahwa hasil pembangunan akan dapat terdistribusi dan teralokasi ke tingkat daerah. Keseimbangan antar daerah terutama dalam perkembangan ekonominya akan dapat dicapai jika beberapa kebijaksanaan dan program pembangunan daerah tersebut mengacu pada kebijaksanaan regionalisasi atau perwilayahannya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dapat dilihat melalui pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi (Tarigan, 2007: 46-47).

Pembangunan ekonomi secara nasional mempunyai definisi dan tujuan yang sama dengan teori pembangunan ekonomi daerah. Perbedaannya hanya terletak pada ruang lingkup wilayahnya, oleh sebab itu sebelum membahas masalah pembangunan daerah ada baiknya dibahas terlebih dahulu pengertian daerah (regional). Daerah adalah suatu areal geografis yang merupakan suatu kesatuan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa di Indonesia daerah administratif dikenal sebagai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan menentukan usaha pembangunan yang berkelanjutan dan tidak memusnahkan sumberdaya asli, manakala teori dan model pertumbuhan yang dihasilkan dijadikan panduan dasar negara. Konsep pembangunan ini dikupas dalam teori pertumbuhan dan pembangunan dan coba menganalisis secara kritikal dengan melihat kesesuaiannya dalam konteks negara.

A. Teori Pertumbuhan

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999:2).

Menurut Simon Kuznets dalam M.L Jhingan (2002:57) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi yang dibutuhkannya. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRB_t) dengan PDRB tahun sebelumnya (PDRB_{t-1}) x100%.

Teori Pembangunan Ekonomi Daerah Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999:108).

Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan (Adisasmita, 2005:19).

Salah satu teori yang dapat dipergunakan untuk memonitor berjalannya pembangunan adalah teori basis ekonomi. Teori ini mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintaan yang bersifat *exogenous* (tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal). Sedangkan kegiatan non basis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat.

Dengan demikian sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Atas dasar anggapan diatas, satu-

satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis. Oleh karena itu analisis basis dirujuk sebagai analisis yang sangat berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2004:27)

Dalam menggunakan pendekatan model basis ekonomi pada umumnya didasarkan atas nilai tambah maupun lapangan kerja. Namun menggunakan data pendapatan (nilai tambah) adalah lebih tepat dibandingkan menggunakan data lapangan kerja. Hal ini dikarenakan lapangan kerja memiliki bobot yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi neto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah.

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Dalam analisis pembangunan ekonomi daerah diartikan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah.

Laju Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penting sebagai berikut (Arsyad, 1999:214): akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal dan sumberdaya manusia (*human resources*), akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Akumulasi modal akan menambah sumberdaya-sumberdaya yang baru dan akan meningkatkan sumberdaya-sumberdaya yang telah ada.

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Secara teoritis pertumbuhan ekonomi wilayah diartikan sebagai penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut (Robinson Tarigan 2005 : 46). Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

C. Konsep Wilayah

Konsep wilayah dapat didasarkan atas pengertian bahwa :

- a. Wilayah yang didasarkan kepada batas-batas administrasi Pemerintah Daerah.
- b. Wilayah yang didasarkan kepada pengaruh-pengaruh lokasi dan keseimbangan-keseimbangan harga spasial.

Selain itu, wilayah juga dapat didasarkan pada pengertian: wilayah homogen (*homogenous regions*) yang memiliki sifat-sifat (*charateristics*) sama atau mirip (bersifat subjektif. Misalnya: SDA (iklim dan sumber mineral), sosial (Agama, suku dan budaya, dan ekonomi (mata pencaharian) dan wilayah heterogen (*nodal regions*) wilayah yang saling berhubungan secara fungsional yang disebabkan oleh *heterogenitas* (perbedaan komponen) atau terbentuk oleh pusat daya tarik, yang sifatnya saling tergantung diantara bagian-bagian wilayah yang berbeda, dan tidak memperhitungkan faktor jarak. Wilayah modal, salah satu tipe penting dari wilayah fungsional yang didasarkan pada sistem hirarkis dari hubungan perdagangan (sub wilayah pusat/*core*) dengan wilayah pinggiran (*periphery*). (Blair,1991). Selain itu wilayah juga dapat dikelompokkan menurut wilayah perencanaan (*planning regions*). Wilayah dalam kesatuan kebijakan atau administrasi. (Richardson, 1969).

III. METODOLOGI ANALISIS

A. Desain Penelitian

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pada pendekatan kuantitatif, data yang diperoleh dimasukkan dalam perhitungan dengan alat analisis *Location Quotient* (LQ). Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga akan diperoleh gambaran perkembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya.

Data yang digunakan adalah data sekunder selama 3 tahun, yaitu tahun 2013-2015. Data yang digunakan adalah data PDRB (berdasarkan harga konstan tahun 2010) meliputi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya. Data ini diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Kota Palangka Raya.

B. Variabel Pengukuran

Variabel Pengukuran adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto 1998:33). Variabel dalam penelitian ini meliputi:

a. Laju pertumbuhan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. Laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun yang dinyatakan dalam persen per tahun. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pembangunan daerah dilihat dari besarnya pertumbuhan PDRB setiap tahunnya.

b. Pertumbuhan sektor ekonomi

Pertumbuhan sektor ekonomi adalah pertumbuhan nilai barang dan jasa dari setiap sektor ekonomi yang dihitung dari angka PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 dan dinyatakan dalam persentase.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dalam penelitian ini dilihat menurut pendekatan produksi yaitu merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu wilayah) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini menurut edisi 2010, dimana dikelompokkan menurut lapangan usaha sebagai berikut :

Tabel 1. Sektor PDRB Seri 2010

Sektor PDRB Seri 2010
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian
C. Industri Pengolahan
D. Pengadaan Listrik dan Gas
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J. Informasi dan Komunikasi
K. Jasa Keuangan dan Asuransi
L. Real Estate
M,N. Jasa Perusahaan
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U. Jasa lainnya

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2016.

Penggunaan PDRB Seri 2010 dipergunakan dengan pertimbangan bisa lebih mewakili sektor-sektor yang menjadi pengamatan di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya. Dalam penyajian ini PDRB dihitung berdasarkan harga tetap (harga konstan), yaitu harga yang berlaku pada tahun dasar yang dipilih, yaitu tahun 2010. Perhitungan berdasarkan harga konstan ini dilakukan karena sudah disesuaikan dari perbedaan dimensi tahun dari unsur inflasi.

d. Sektor-sektor ekonomi

Sektor-sektor ekonomi yaitu sektor pembentuk angka PDRB yang berperan dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi.

e. Komponen *Share*

Komponen *share* adalah pertambahan PDRB suatu daerah seandainya pertambahannya sama dengan pertambahan PDRB daerah dengan skala yang lebih besar selama periode waktu tertentu.

f. Komponen *Net Shift*

Komponen *net shift* adalah komponen nilai untuk menunjukkan penyimpangan dari komponen *share* dalam ekonomi regional.

g. Komponen *Differential Shift*

Komponen *differential shift* adalah komponen untuk mengukur besarnya *shift netto* yang digunakan oleh sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dibandingkan daerah yang skalanya lebih besar.

h. Komponen *Proportional Shift*

Komponen *proportional shift* adalah komponen yang digunakan untuk menghasilkan besarnya *shift netto* sebagai akibat dari PDRB daerah yang bersangkutan berubah. Komponen bernilai positif apabila daerah yang diteliti berspesialisasi dalam sektor yang di tingkat daerah dengan skala lebih besar (provinsi/kabupaten/kota) tumbuh lebih cepat, sebaliknya bernilai negatif apabila daerah yang diteliti berspesialisasi pada sektor yang di tingkat daerah dengan skala lebih besar (provinsi/kabupaten/kota) tumbuh dengan lambat.

C. Metode Analisis

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisa kualitatif melalui pendekatan basis ekonomi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada analisis adalah sebagai berikut:

a. *Location Quotient (LQ)*

Location quotient adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangsih nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terhadap sumbangsih nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah

yaitu membaginya menjadi dua golongan yaitu sektor basis dan sektor non basis. Analisis *location quotient* dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan PDRB sebagai indikator pertumbuhan wilayah.

Pendekatan LQ juga merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk menentukan potensi spesialisasi produk (barang dan jasa) suatu daerah terhadap aktifitas ekonomi utama atau untuk menentukan sektor unggulan yaitu sektor yang dapat memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan daerah lain.

Location quotient dihitung dengan :

$$LQ = v_i/v_t : V_i/V_t$$

Dimana :

v_i = pendapatan sektor tertentu pada suatu daerah.

v_t = total pendapatan daerah tersebut.

V_i = pendapatan sektor tertentu secara regional atau nasional

V_t = total pendapatan regional atau nasional.

Berdasarkan formulasi di atas maka apabila :

$LQ > 1$ berarti daerah mempunyai basis pada sektor tersebut dan ada kelebihan hasil yang dapat dipasarkan ke daerah lain.

$LQ = 1$ berarti hasil sektor tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan.

$LQ < 1$ berarti daerah tidak mempunyai basis pada sektor tersebut dan ada kekurangan hasil yang harus didatangkan dari daerah lain.

b. Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh dibawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya. Analisis *shift share* merupakan teknik yang dipergunakan dalam menganalisis perubahan struktur

ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Analisis ini bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar.

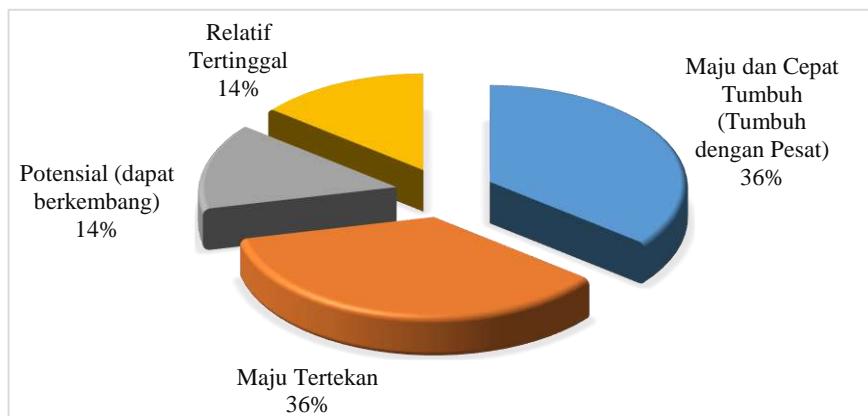
Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu dengan yang lainnya (Arsyad, 1999: 314), yaitu :

- i. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan penggeraan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.
- ii. Pergeseran proporsional (*proportional shift*) mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat daripada perekonomian yang dijadikan acuan.
- iii. Pergeseran diferensial (*differential shift*) membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya dari pada industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kalimantan Tengah adalah salah satu sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibukotanya adalah Kota Palangka Raya. Kalimantan Tengah memiliki luas 157.983 km². Berdasarkan sensus tahun 2010, provinsi ini memiliki populasi 2.202.599 jiwa, yang terdiri atas 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota.

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditunjukkan dengan table klasifikasi daerah menurut Tipologi Klassen, sebagai berikut :

Gambar 1. Klasifikasi Daerah

Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain masih terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kondisi di atas menghadapkan Kalimantan Tengah pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Kota Palangka Raya atau Palangkaraya adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Dahulu dikenal dengan Palangkaraja (1957-1972). Kota ini memiliki luas wilayah 2.400 km² dan berpenduduk sebanyak 220.962 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 92.067 jiwa tiap km² (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Sebelum otonomi daerah pada tahun 2001, Kota Palangka Raya hanya memiliki 2 kecamatan, yaitu: Pahandut dan Bukit Batu. Kini secara administratif, Kota Palangka Raya terdiri atas 5 kecamatan, yakni: Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sebangau, dan Rakumpit.

Kota ini dibangun pada tahun 1957 (UU Darurat No. 10/1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah) dari hutan belantara yang dibuka melalui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Palangka Raya merupakan kota dengan luas wilayah terbesar di Indonesia. Sebagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam serta hutan lindung Tangkiling. Dengan banyaknya kemacetan lalu lintas di Jakarta, pada akhir bulan Juli dan awal Agustus 2010, muncul beberapa wacana untuk memindahkan Ibukota Indonesia ke Palangkaraya (wikipedia,2016).

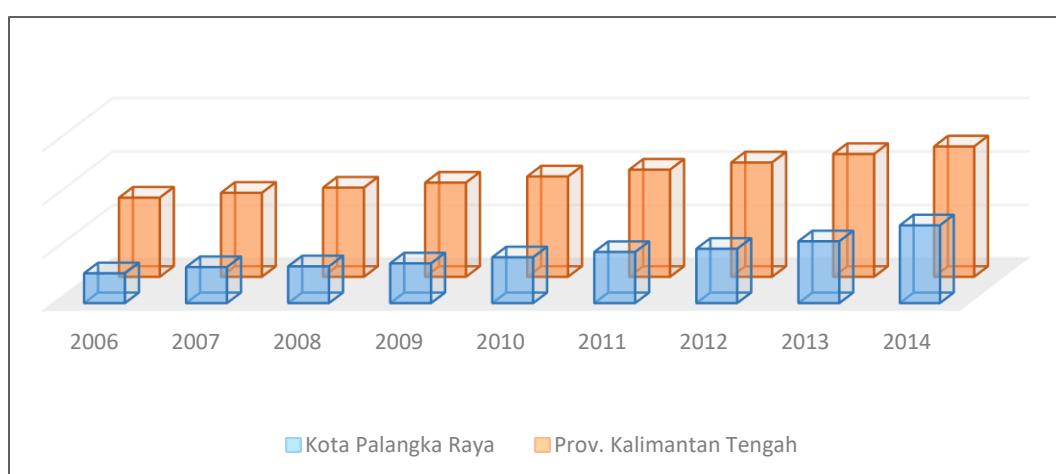
Untuk mengetahui potensi sektor-sektor ekonomi yang mendukung PDRB Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya digunakan alat analisis LQ yaitu untuk mengetahui apakah sektor ekonomi tersebut termasuk sektor basis atau non basis, juga digunakan metode *shift share* sebagai pendukung alat analisis LQ.

A. Analisis Perkembangan PDRB

Struktur perekonomian menggambarkan peranan atau sumbangan dari masing-masing sektor dalam pembangunan PDRB yang dalam konteks lebih jauh akan memperhatikan bagaimana suatu sektor perekonomian mengalokasikan sumber-sumber ekonomi di berbagai sektor. Dengan melihat data, tren PDRB di Kota Palangka Raya mengikuti PDRB Provinsi Kalimantan Tengah. Selama periode penelitian, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah nominalnya yang selalu meningkat. Hal ini berarti Kota Palangka Raya menjadi daerah yang ikut bertumbuh sejalan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagaimana teori ekonomi kewilayahan pusat pertumbuhan wilayah banyak ditentukan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana mampu mendukung percepatan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap di suatu wilayah juga bisa digunakan sebagai dasar dalam penetapan pusat pertumbuhan, karena hierarki suatu kota yang besar akan mempercepat wilayah lain untuk berkembang. Hierarki kota dapat menentukan jenjang pelayanan terkait dengan pusat pelayanan di kota.

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya (Tahun 2006 - 2014)



Sumber : BPS Kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (diolah).

Gambaran terhadap kontribusi sektor dari PDRB Kota Palangka Raya yang dapat dilihat pada Tabel 1, dimana kontribusi terbesar pertama adalah jasa pendidikan, diikuti oleh sektor industri perdagangan besar dan eceran, kemudian urutan ketiga dan keempat adalah sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi.

**Tabel 2. PDRB Kota Palangka Raya
Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 (harga konstan 2010)
dalam Juta Rp**

Sektor	2012	2013*	2014**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	192,337.95	199,360.87	211,743.74
Pertambangan dan Penggalian	83,047.64	91,756.85	94,696.70
Industri Pengolahan	778,978.19	807,669.14	837,579.17
Pengadaan Listrik dan Gas	17,737.58	18,834.01	22,278.26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,543.25	12,677.36	15,761.58
Konstruksi	697,231.56	760,470.51	815,159.98
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,256,831.91	1,342,124.46	1,436,768.85
Transportasi dan Pergudangan	192,337.95	199,360.87	211,743.74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	555,156.74	582,966.98	626,379.39
Informasi dan Komunikasi	303,755.43	338,790.75	350,665.93
Jasa Keuangan dan Asuransi	126,686.31	143,193.94	160,494.49
Real Estate	513,719.23	557,224.01	632,291.37
Jasa Perusahaan	207,918.35	220,740.44	233,401.03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,769.55	5,046.91	5,175.96
Jasa Pendidikan	1,408,680.19	1,534,896.52	1,641,801.48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	335,464.21	363,141.15	378,308.21
Jasa lainnya	146,030.60	156,171.82	165,566.82
PDRB	6,833,226.64	7,334,426.59	7,839,816.70

Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2016 (diolah).

Sementara kondisi yang berbeda dilihat pada gambaran terhadap kontribusi sektor dari PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yang dilihat pada Tabel 2, dimana kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman, kemudian urutan ketiga dan keempat adalah sektor jasa-jasa dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.

**Tabel 3 PDRB Provinsi Kaliman Tengah
Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 (harga konstan 2010)
Dalam Miliar Rp.**

Sektor	2012	2013*	2014**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,774,873.89	13,935,356.00	14,165,405.20
Pertambangan dan Penggalian	2,495,537.04	8,416,687.50	9,958,231.50
Industri Pengolahan	114,916.29	8,684,411.80	8,814,642.50
Pengadaan Listrik dan Gas	1,435,496.02	29,223.40	32,210.90
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,697,142.86	51,063.60	54,339.30
Konstruksi	2,030,799.32	4,821,353.90	5,074,439.30
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,728,521.71	6,199,823.50	6,578,235.90
Transportasi dan Pergudangan	3,356,218.96	3,425,844.60	3,555,877.20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,774,873.89	880,880.00	968,489.90
Informasi dan Komunikasi	2,495,537.04	599,071.50	658,886.60
Jasa Keuangan dan Asuransi	114,916.29	1,434,283.70	1,867,232.00
Real Estate	1,435,496.02	1,069,787.10	1,188,230.70
Jasa Perusahaan	4,697,142.86	20,609.20	22,704.60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,030,799.32	3,151,272.50	3,417,655.90
Jasa Pendidikan	1,728,521.71	2,350,787.50	2,552,682.50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,356,218.96	916,215.30	1,014,582.40
Jasa lainnya	6,774,873.89	544,352.50	569,082.00
PDRB	52,041,886.07	56,531,023.60	60,492,928.40

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (diolah).

Sementara gambaran data tentang pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Tengah yang dilihat pada Tabel 2, lebih bisa menjadi gambaran umum kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengandalkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, diikuti

oleh sektor pertambangan dan penggalian. Kemudian sektor penyediaan akomodasi makanan minuman, jasa-jasa dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebagai penunjang.

B. Analisis Potensi Pertumbuhan Sektor Ekonomi

a. Analisis Tipologi Sektoral dengan *Location Quotient (LQ)*

Hasil perhitungan LQ Kota Palangka Raya terhadap Provinsi Kalimantan Tengah selama 3 tahun (2012-2014) selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.
Hasil Perhitungan Nilai LQ Sektor Ekonomi Kota Palangka Raya

Sektor	2012	2013*	2014**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.22	0.11	0.11
Pertambangan dan Penggalian	0.25	0.08	0.07
Industri Pengolahan	51.63	0.71	0.72
Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	4.91	5.27
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	1.89	2.21
Konstruksi	2.61	1.20	1.22
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.54	1.65	1.66
Transportasi dan Pergudangan	0.44	0.44	0.45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.62	5.04	4.93
Informasi dan Komunikasi	0.93	4.31	4.05
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.40	0.76	0.65
Real Estat	2.73	3.97	4.05
Jasa Perusahaan	0.34	81.57	78.29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.02	0.01	0.01
Jasa Pendidikan	6.21	4.97	4.90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.76	3.02	2.84
Jasa lainnya	0.16	2.18	2.22

Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi manakah yang termasuk sektor basis atau berpotensi ekspor dan manakah yang termasuk bukan merupakan sektor basis. Hal tersebut dapat terlihat jika LQ menunjukkan angka lebih dari satu ($LQ > 1$) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Kemudian jika hasil

menunjukkan angka kurang dari satu ($LQ < 1$) berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor basis.

Berdasarkan tabel diatas, Provinsi Kalimantan Tengah setidaknya memiliki 11 sektor basis, dimana sektor-sektor tersebut mereferensikan posisi Kota Palangka Raya sebagai pusat Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 5. Sektor Basis Kota Palangka Raya

No.	Sektor Ekonomi menurut Lapangan Usaha
1	Jasa Perusahaan
2	Pengadaan Listrik dan Gas
3	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4	Real Estat
5	Informasi dan Komunikasi
6	Jasa Pendidikan
7	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
8	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
9	Konstruksi
10	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
11	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
12	Jasa Lainnya

Terdapatnya banyak kantor perusahaan-perusahaan yang bergerak diberbagai sektor di ibukota, industri pengolahan, jasa keuangan, dan asuransi dan perdagangan merupakan ciri khas suatu ibukota . Dimana saat ini fungsi dan posisi sebuah ibukota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, komunikasi dan jasa-jasa menjadi sangat dominan. Selain itu tentunya sektor pendidikan, kontribusi sektor pendidikan pada pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya dikarenakan keberadaan lembaga pendidikan baik pendidikan tinggi seperti Universitas Palangka Raya, Sekolah Tinggi Agama (STA) Hindu dan Politeknik. Kemudian keberadaan lembaga-lembaga pendidikan menengah dan dasar yang masih terpusat di Palangka Raya. Sedangkan industri perdagangan dan pengolahan serta konstruksi adalah sektor-sektor yang mengikuti perkembangan kebutuhan seiring perkembangan Palangka Raya sebagai pusat Provinsi Kalimantan Tengah. Walaupun sektor basis merupakan sektor yang paling potensial untuk dikembangkan dan untuk

memacu pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya, sektor non basis harus dikembangkan untuk menjadi sektor basis baru ditunjang dengan adanya sektor basis yang telah ada.

b. Indeks Spesialisasi Regional

Dari data PDRB Tahun 2012 – 2014 dari Kota Palangka Raya maupun Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh nilai :

Tabel 5. Nilai ISR

ISR 2012	0.01
ISR 2013	0.31
ISR 2014	0.43

Indeks spesialisasi regional kota Palangka Raya selama periode 2012 - 2014 tidak memiliki spesialisasi dengan wilayah referensinya (Provinsi Kalimantan Tengah) karena nilai indeks spesialisasinya mendekati 0, namun ada kecenderungan terjadinya spesialisasi regional sejalan dengan berjalanannya waktu. Hal ini kembali dikaitkan dengan posisi Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi.

c. Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Analisis ini bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar. Untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan menggunakan analisis *shift share* digunakan variabel penting seperti tenaga kerja, penduduk, dan pendapatan. Dalam penelitian ini digunakan variabel pendapatan yaitu PDRB untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya. Pertumbuhan PDRB total (G) dapat diuraikan menjadi komponen *shift* dan Komponen *share* yaitu:

- i. Komponen *National Share* (N) adalah banyaknya pertambahan PDRB seandainya pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi selama periode yang tercakup dalam studi.
- ii. Komponen *Proportional shift* (P) mengukur besarnya *net shift* Kota yang diakibatkan oleh perubahan komposisi sektor-sektor PDRB Kota. Apabila $Pj > 0$ artinya Kota yang

bersangkutan berspesialisasi pada sektor-sektor yang pada tingkat provinsi tumbuh lebih cepat dan apabila $Pj < 0$ berarti Kota yang bersangkutan berspesialisasi pada sektor yang ditingkat provinsi tumbuh lebih lambat atau bahkan sedang merosot.

- iii. Komponen *Differential shift* (D) mengukur besarnya *shift netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dibandingkan dengan tingkat nasional (provinsi) yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional *intern*. Daerah yang mempunyai keuntungan lokasional, seperti sumber daya yang baik akan mempunyai *differential shift component* positif ($Dj > 0$), sebaliknya daerah yang tidak memiliki keuntungan lokasional akan mempunyai *differential shift component* ($Dj < 0$).

Hasil analisis *Shift-share* selama tahun 2012-2014 dengan menganalisis perubahan struktur ekonomi Kota Palangka Raya dengan Provinsi Kalimantan Tengah dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 6. Pertumbuhan PDRB

Tahun 2012 - Tahun 2014		Pertumbuhan
Kota Palangka Raya (Absolute)		1.006.590 (Juta Rupiah)
Kota Palangka Raya (Persentase)		14.73 %
Provinsi Kalimantan Tengah (Absolute)		8.451.042 (Miliar Rupiah)
Provinsi Kalimantan Tengah (Persentase)		16.24 %

Tabel 7. Hasil Perhitungan *Shift Share*

Laju Pertumbuhan			Komponen			Pergeseran Struktur Ekonomi
Sektor i di Kota Palangka Raya	Sektor i di Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Pertumbuhan Kalimantan Tengah	Bauran Industri	Daya Saing	
r_{ij}	r_{in}	r_n	$N_{ij} = V'_{ij} \times r_n$	$M_{ij} = V_{ij} * (r_{in} - r_n)$	$C_{ij} = V_{ij} * (r_{ij} - r_{in})$	$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$
2.66	94.218	94,218	738,654,413	- 57858744	- 6422114	95845821

Hasil analisis *shift-share* menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2014, nilai PDRB sektoral Kota Palangka Raya telah mengalami perubahan atau perkembangan. Nilai PDRB

tersebut tumbuh naik sekitar Rp1 triliun atau sebesar 14,73 persen. Sementara perekonomian Kalimantan Tengah tumbuh sebesar Rp8.451.042 miliar atau sebesar 16,24 persen. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen-komponen pertumbuhan wilayah, bauran industri dan keunggulan kompetitif. Menurut perhitungan komponen pertumbuhan wilayah, pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Tengah telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya sebesar Rp485 miliar. Sementara Komponen bauran industri menunjukkan nilai sebesar negatif yang berarti secara agregat sektor-sektor Provinsi Kalimantan Tengah bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan di Kota Palangka Raya .

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kondisi perekonomi di Kota Palangka Raya selama tahun 2012-2014 mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan oleh jumlah nominalnya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan tersebut masih dibawah pertumbuhan ekonomi secara umum di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini merupakan kondisi bahwa kabupaten/kota yang lain di Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga mengurangi dominasi Kota Palangka Raya sebagai Ibukota provinsi.
- b. Sektor-sektor yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya adalah sektor-sektor utama yang menunjang posisinya sebagai ibukota provinsi, seperti sektor jasa, perdagangan, komunikasi, pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- c. Sektor-sektor basis diatas merupakan sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk dijadikan spesialisasi bagi perekonomian Kota Palangka Raya. Hal ini dikarenakan posisi Kota Palangka Raya yang sangat strategis sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Saran

- a. Berdasarkan pemahaman terhadap potensi yang dimiliki Kota Palangka Raya, maka pemerintah kota ini diharapkan merumuskan strategi pengembangan wilayah yang paling menguntungkan untuk diterapkan sebagai prioritas atau program unggulan bagi Pemerintah Kota. Kota Palangka Raya harus tetap menjaga momentumnya sebagai

pusat pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini mengingat adanya program-program unggulan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah di provinsi dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

- b. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Palangka Raya perlu mulai memperhatikan juga sektor-sektor basis non basis, karena dengan meningkatkan peran dari sektor non basis diharapkan sektor tersebut dapat tumbuh menjadi sektor basis dan pada akhirnya semua sektor ekonomi dapat secara bersama-sama mendukung peningkatan potensi pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya.
- c. Adanya bandar udara Tjilik Riwut seharusnya bisa menjadi potensi sektor angkutan dan komunikasi terbesar di Kota Palangka Raya dan memiliki tingkat potensial yang signifikan. Hal tersebut harus dapat dipertahankan karena dengan adanya sarana pengangkutan yang baik Kota Palangka Raya memiliki aksesibilitas yang baik dan semakin terbuka dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah, lintas provinsi maupun daerah-daerah lain di seluruh Indonesia bahkan manca negara, sekaligus dapat menunjang berbagai kegiatan perekonomian kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2005). Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta
- Arsyad, Lincoln. (1999). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- _____. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Boediono. (1999). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE
- Dumairy.(1997). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga
- Irawan, (2002). Ekonomika Pembangunan. Jogjakarta: BPFE
- Glasson, John.1990. Pengantar Perencanaan Regional. Terjemahan Paul Sihotang. Jakarta: LPFEUI.
- <http://www.bappeda.co.id>
- <http://www.seputarekonomi.blogspot.com>
- <http://www.waspada-online.com>
- Jhingan, M.L. 2002. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lemhamnas. 1997. Pembangunan Nasional. Jakarta: PT Balai Pustaka
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin. 2004. Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES
- Wikipedia (2016). Profil Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya dari sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palangka_Raya.
- Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. PT. ... *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Baduose Media, Cetakan. Pertama ... *Tarigan, Robinson, 2007*.

Ringkasan

Depresiasi Rupiah Terhadap Dolar AS dan Pengaruhnya Terhadap Ekspor dan Impor

Depresiasi rupiah terhadap dolar AS memberi implikasi positif dan negatif terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi dari sistem perekonomian yang terbuka dan sistem devisa bebas yang dianut. Tulisan ini membahas implikasi depresiasi rupiah terhadap perdagangan luar negeri, pinjaman luar negeri, dan cadangan devisa negara dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analisis. Tulisan ini didukung dengan data dan referensi yang relevan dengan topik yang dibahas. Disimpulkan, dengan kondisi depresiasi rupiah yang cukup besar dan relatif lama, seharusnya pemerintah mendorong ekspor dan mengurangi impor guna mencapai surplus neraca ekspor-impor dan surplus neraca transaksi berjalan. Depresiasi rupiah merupakan momen untuk meningkatkan devisa dari hasil ekspor yang surplus. Semakin besar surplus neraca perdagangan, depresiasi rupiah justru menguntungkan perekonomian. Namun, tantangannya adalah impor yang tidak terhindarkan karena hilirisasi industri belum optimal. Depresiasi rupiah juga akan meningkatkan daya saing produk sejenis di pasar internasional.

Depresiasi Rupiah Terhadap Dolar AS dan Pengaruhnya Terhadap Ekspor dan Impor

Juli Panglima Saragih¹¹

**Rupiah Depreciation Comparing to US Dollar Currency and
Its Influence on Export and Import**

Abstract

The depreciation of rupiah against US dollar will make positive and negative implications on the economy of Indonesia. This is a consequence of the open economy system and embraced free foreign exchange system. This paper aims to discuss and analize some implications of the depreciation of Indonesian rupiah upon foreign trade, foreign loans, and government reserve money. This paper uses a qualitative approach with a descriptive-analysis method supported with relevant data and references to the above topic discussed. It was concluded that condition of high depreciation of the rupiah in-mid and long-term should have to encourage surplus of foreign trade balance and decreasing import. This is a constraint on condition of rupiah's depreciation. Moreover, depreciation of rupiah will be a benefit in competing similar products traded in international market. Depreciation of rupiah also can increase foreign direct investment to finance overall of businesses, as well as finance for development.

Keywords: Depreciation of Rupiah, Balance of Trade Surplus, Export-Import.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perekonomian terbuka yang diterapkan berbagai negara di dunia seperti Indonesia, membawa konsekuensi terjadinya peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan orang atau negara lain. Peningkatan hubungan ekonomi luar negeri, juga disebabkan dan didorong oleh perkembangan ekonomi dalam negeri negara tersebut, khususnya perkembangan dan kemajuan sektor industri pengolahan baik migas maupun non-migas.

Hubungan ekonomi Indonesia dengan negara lain, khususnya perdagangan luar negeri, investasi, pariwisata, dan lain-lain dilakukan melalui transaksi atau pertukaran mata uang seperti rupiah dengan dolar AS dan mata uang asing lainnya. Transaksi pertukaran mata uang rupiah terhadap dolar AS ini dilakukan di pasar uang melalui perkembangan nilai kurs (exchange rate) mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain, khususnya terhadap dolar AS.

¹¹Peneliti di Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Jln. Jend Gatot Subroto Senayan, Jakarta 10270, saragihjulipanglima@yahoo.co.id atau julipsaragih@gmail.com

Besaran nilai kurs rupiah terhadap mata uang negara lain seperti dolar AS menentukan posisi tawar mata uang rupiah di pasar uang (money market) yang disebut dengan apresiasi dan depresiasi. Apabila selisih perbedaan nilai kurs rupiah terhadap dolar AS sangat tipis/kecil, maka hal ini mengindikasikan rupiah cenderung mengalami apresiasi terhadap dolar AS, dan diprediksi nilainya akan dapat mendekati sama dengan nilai dolar AS dan dolar AS mengalami depresiasi terhadap rupiah Indonesia. Sebaliknya, apabila selisih perbedaan nilai kurs rupiah terhadap dolar AS sangat besar/tinggi, maka hal ini menggambarkan rupiah cenderung semakin melemah atau mengalami depresiasi terhadap dolar AS dan dolar AS mengalami apresiasi (penguatan) terhadap rupiah.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya apresiasi rupiah terhadap dolar AS, yakni jumlah peredaran dolar AS di pasar Indonesia cenderung semakin berkurang/sedikit. Artinya dolar AS semakin sulit diperoleh. Supply dolar AS yang semakin sulit dan sedikit di pasar valuta asing, maka mengakibatkan harga dolar AS (nilai kurs) cenderung naik terhadap rupiah. Kelangkaan dolar AS di Indonesia menyebabkan dolar AS mahal, sehingga nilai rupiah secara perlahan terdepresiasi atau melemah. Selain itu, kebijakan bank sentral AS (the US Federal Reserve) menaikkan suku bunganya, sehingga pemegang dolar AS cenderung akan menyimpan dolar di bank, baik di negara AS maupun di bank negara lain. Depresiasi rupiah juga disebabkan oleh depresiasi berantai terhadap mata uang negara Asia terhadap dolar AS.

Saat ini kurs rupiah terhadap dolar AS diperdagangkan Rp14.000-, dari sebelumnya Rp13.000. Artinya nilai dolar AS tetap, sedangkan nilai rupiah turun dan pembeli harus menambah nominal Rp1.000 untuk mendapatkan 1 dolar AS. Perekonomian Indonesia yang semakin terbuka dan bergantung kepada luar negeri khususnya impor barang dan jasa, menyebabkan kebutuhan dolar AS meningkat tajam. Tanpa diimbangi dengan ekspor yang meningkat juga maka dolar AS cenderung semakin langka di pasar. Apalagi kebutuhan sektor ekonomi lain terhadap dolar AS juga tinggi, seperti pembayaran pinjaman luar negeri pokok yang jatuh tempo dan bunganya setiap tahun, serta defisit transaksi berjalan (*current account*) maka turut memperlemah rupiah karena dibutuhkan mata uang dolar AS untuk pembayarannya.

Sebagai gambaran tahun 2012, neraca perdagangan luar negeri mengalami defisit sebesar USD1.670,2 juta. Defisit perdagangan luar negeri ini sebagian besar disumbang oleh defisit neraca ekspor-impor minyak dan gas bumi (migas) yang sejak tahun 2008 mengalami

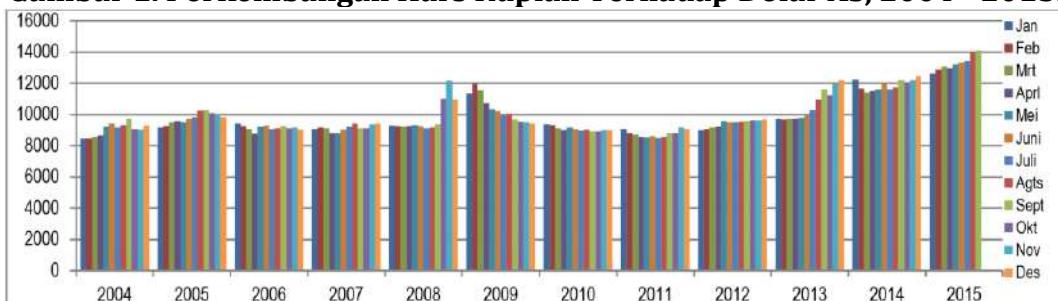
defisit. Defisit ekspor-impor Migas tahun 2012 lalu mencapai USD5.587,0 juta. Neraca perdagangan tahun 2013 dan 2014 masing-masing defisit sebesar USD4.070,0 juta dan USD1.886,3 juta. Defisit neraca perdagangan luar negeri tersebut juga disebabkan defisit ekspor-impor Migas, kecuali Non-Migas. Apabila tahun 2015 dan 2016, neraca perdagangan luar negeri masih defisit maka hal ini dapat mengakibatkan nilai rupiah semakin merosot karena kebutuhan dolar AS semakin besar. Defisit neraca perdagangan luar negeri ini jelas memicu terjadinya depresiasi rupiah terhadap dolar AS sebagai akibat dari kebutuhan akan dolar AS untuk membayar impor barang semakin besar.

Sejak 2004 sampai 2009, kurs rupiah sudah diperdagangkan di atas Rp9.000 per dolar AS. Walaupun secara rata-rata masih berkisar antara Rp9.300 – Rp9.800 per dolar AS, tetapi rupiah sempat menyentuh level Rp11.120 pada Triwulan IV tahun 2008. Pada Triwulan I/2009 terjadi kembali depresiasi rupiah menjadi Rp11.700 per dolar AS atau mengalami penurunan nilai 5,21% dibanding triwulan IV/2008. Sejak September 2009 sampai Desember 2012 kurs rupiah relatif stabil pada kisaran rata-rata Rp9.100 – Rp9.600 per dolar AS. Bulan Januari 2013 terjadi depresiasi rupiah di mana kurs rupiah tercatat Rp9.700 per dolar AS. Sejak Januari 2013, nilai rupiah terdepresiasi sampai Januari 2014. Pada bulan Desember 2013 kurs rupiah diperdagangkan sebesar Rp12.190 per dolar AS. Nilai ini merosot tajam dibandingkan kurs rata-rata Februari 2013 sebesar Rp9.667 per dolar AS atau nilainya turun sebesar 26,09% selama 10 bulan. Sedangkan pada Januari 2014, rupiah diperdagangkan di level Rp12.210 per dolar AS, atau melemah 0,33% dibandingkan dengan akhir Desember 2013, lebih kecil dari pelemahan pada Desember 2013 sebesar 1,71%. Secara rata-rata, nilai rupiah Januari 2014 diperdagangkan Rp12.075 per dolar AS, melemah 0,7%. Selama bulan Desember 2014 nilai rupiah kembali melemah (depresiasi) rata-rata diperdagangkan sebesar Rp12.440 per dolar AS atau merosot sebesar 3,02%.

Memasuki Januari 2015, nilai rupiah kembali merosot dengan kurs rata-rata Rp12.625 per dolar AS. Bahkan pada Maret 2015, rupiah terdepresiasi jauh diperdagangkan pada kisaran Rp13.000 s/d Rp13.085 per dolar AS. Merosotnya nilai rupiah tersebut merupakan tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan. Bahkan pada akhir Agustus 2015, rupiah sempat diperdagangkan pada level Rp14.050 per dolar AS. Artinya, dalam selama tiga tahun terakhir (Agustus 2012 s/d Agustus 2015), nilai rupiah menurun tajam sebesar 46,44% dari Rp9.650 menjadi Rp14.050 per dolar AS. Hal ini merupakan depresiasi nilai rupiah yang luar biasa.

Apabila pemerintah tidak segera melakukan pengurangan depresiasi rupiah, maka diprediksi rupiah akan menembus ke level Rp15.000 per dolar AS pada Desember 2015.

Gambar 1. Perkembangan Kurs Rupiah Terhadap Dolar AS, 2004 - 2015.



Sumber: Kemendag, BI, data diolah.

B. Rumusan Masalah

Dalam pengelolaan perekonomian saat ini, khususnya menjaga stabilitas rupiah pemerintah perlu belajar dari dua krisis yakni: *pertama*, krisis ekonomi-moneter tahun 1998 dimana bulan Januari 1998 rupiah merosot tajam ke level Rp16.650 per dolar AS dari sebelumnya Rp5.000 (196%). *Kedua*, krisis ekonomi tahun 2008—walau tidak separah krisis ekonomi-moneter tahun 1998, rupiah juga mengalami depresiasi yang cukup besar (34,86%). Pada November 2008, rupiah sempat diperdagangkan Rp12.150 per dolar AS. Namun, nilai rupiah kembali menguat (terapresiasi) dengan rata-rata nilai kurs Rp10.950 per dolar AS.¹² Dalam sistem devisa bebas yang diterapkan pemerintah, nilai atau kurs rupiah terhadap mata uang asing didasarkan dan ditentukan oleh mekanisme pasar (pasar uang).

Depresiasi rupiah mengakibatkan mahalnya harga barang impor, karena pembeli harus menambah rupiah Rp1.000 – Rp2.000 untuk setiap 1USD untuk membayar impor. Dampaknya akan terjadi inflasi yang disebabkan depresiasi rupiah terhadap dolar AS karena terjadi penambahan nominal rupiah untuk membayar impor barang dari luar yang cenderung meningkat setiap tahun (*import/cost push inflation*). Dampaknya, pembeli akan menaikkan harga barang impor yang dipasarkan di dalam negeri.

Depresiasi rupiah juga mempengaruhi pembayaran pinjaman pokok LN dan bunganya setiap tahun, kecuali sudah disepakati nilai kurs tetap (*fixed rate*). Sebaliknya, apabila tidak ada kesepakatan ketetapan kurs valuta asing dalam pembayaran cicilan utang luar negeri dan bunganya dan diserahkan pada mekanisme pasar yang berlaku, maka fenomena depresiasi rupiah akan berdampak negatif terhadap peningkatan pembayaran utang luar negeri pokok

¹²Rupiah tembus Rp12.599 per dolar, terendah sejak 26 November 2008, dalam <http://fokus.news.viva.co.id>. diakses 31 Agustus 2015.

dan bunga utang. Sebagaimana diketahui pinjaman (*outstanding foreign debt*) luar negeri pemerintah juga berdenominasi dalam dolar AS. Semakin terdperesiasi rupiah, semakin bertambah jumlah nominal pembayaran cicilan utang LN pokok dan bunganya yang jatuh tempo.

Di samping depresiasi rupiah memiliki implikasi negatif terhadap perekonomian, khususnya defisit neraca ekpor-impor dan pinjaman luar negeri, tetapi di sisi lain memberikan dampak positif dari investasi asing langsung (*foreign direct investment*) dan ekspor non-migas. Semakin meningkat nilai investasi asing langsung ke Indonesia, maka cenderung semakin menambah arus masuk mata uang dolar AS (*capital inflow*) ke dalam negeri, baik untuk disimpan di lembaga perbankan dalam negeri maupun untuk dibelanjakan/dipergunakan membangun industri. Demikian juga dengan meningkatnya ekspor non-migas. Depresiasi rupiah akan menguntungkan eksportir dengan semakin murahnya harga barang ekspor non-migas di pasar internasional. Depresiasi rupiah juga akan meningkatkan daya saing komoditas ekspor non-migas Indonesia dengan komoditas sama di pasar dunia.

Dari tabel di atas dapat dilihat pelemahan atau depresiasi rupiah terhadap dolar AS terjadi sejak pertengahan tahun 2013 sampai September 2015. Sejak 2004 sampai 2012, nilai rupiah relatif stabil dan rata-rata diperdagangkan di bawah Rp10.000 per dolar AS. Depresiasi yang terjadi sejak akhir 2008 sampai awal 2009 merupakan gejolak sesaat dan cenderung stabil kembali sampai Juni 2013. Sejak Juli 2013 sampai September 2015 rupiah terdepresiasi dan diperdagangkan diatas Rp11.000 per dolar AS. Sepanjang tahun 2014, kurs rupiah rata-rata mencapai Rp12.000 per dolar AS dan sejak Januari 2015, rupiah terus merosot di atas Rp13.000 per dolar AS. Depresiasi rupiah sejak Juli 2013 sampai Agustus 2015 mencapai 40-45%. Kemerosotan rupiah terhadap dolar AS, tanpa dimbangi dengan upaya lain seperti masuknya investasi asing, peningkatan ekspor non-migas dan peningkatan cadangan devisa BI (*reserve*), maka akan berdampak buruk pada perekonomian dan pelaku usaha, terutama sektor industri (manufaktur) yang masih bergantung pada impor.

Momen depresiasi rupiah seharusnya juga dapat menguntungkan ekonomi, dari sisi ekspor dan pariwisata. Dengan depresiasi rupiah harga barang ekspor lebih kompetitif di pasar internasional dibandingkan barang yang relatif sama/sejenis dari negara lain, kecuali tidak terjadi depresiasi mata uang negara importir terhadap rupiah dan dolar AS.

Bulan April-September 2013, neraca ekspor-impor minus. Dan sejak Juli 2013, rupiah sudah mendekati Rp11.000 per dolar AS di mana level tertinggi depresiasi rupiah yang cukup besar pada Nopember-Desember 2013 menjadi Rp12.000 per dolar AS (gambar 2). Merupakan suatu ironi, bahwa di saat rupiah mengalami depresiasi, neraca ekspor-impor minus atau defisit, karena perekonomian masih sangat bergantung pada impor yang membutuhkan dolar AS untuk transaksi pembayarannya. Defisit neraca ekspor-impor justru memperburuk dan memperlemah rupiah karena semakin besar permintaan dolar AS di pasar uang dalam negeri untuk membiayai impor, tetapi tidak diimbangi laju pertumbuhan eksportnya. Defisit neraca ekspor-impor sebagian besar memang disumbang oleh impor minyak mentah dan hasil olahan minyak mentah termasuk bahan bakar minyak (*oil products*) yang setiap tahun meningkat sejak tahun 2005.

Pada 2014 lalu, neraca ekspor-impor juga mengalami defisit sebesar USD1.890 juta. Pada 2011, neraca perdagangan luar negeri masih positif dengan peningkatan ekspor non-migas cukup besar. Tetapi, dalam periode 2012-2014, neraca perdagangan luar negeri mengalami defisit cukup besar. Artinya, importir membutuhkan banyak dolar AS untuk membayar barang-barang impor. Semakin besar defisit neraca perdagangan luar negeri maka semakin besar kebutuhan terhadap mata uang dolar AS. Defisit neraca ekspor-impor tidak hanya memperlemah rupiah tetapi juga dapat mengurangi cadangan devisa negara di Bank Indonesia. Hal ini disebabkan neraca perdagangan luar negeri turut mempengaruhi kondisi neraca pembayaran (*balance of payment*) yang selalu dimonitor oleh bank sentral.

C. Tujuan Analisis

Tulisan utama penulisan ini menganalisa hubungan implikasi depresiasi Rupiah terhadap dolar Amerika (USD) perdagangan luar negeri, pinjaman luar negeri, dan cadangan devisa negara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Nilai Tukar

Dalam teori ekonomi, terdapat beberapa sistem nilai tukar suatu mata uang. Menurut Mudrajad Kuncoro, Ph.D., ada beberapa sistem nilai tukar mata uang yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu:¹³

¹³SistemNilaiTukar, (*online*) dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/>, dikasestgl.8 September 2015.

Pertama, Sistem kurs mengambang (floating exchange rate). Sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal dua macam kurs mengambang, yaitu : a)Mengambang bebas (murni) di mana kurs mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar uang, tanpa ada campur tangan pemerintah. Sistem ini sering disebut *clean floating exchange rate*. Di dalam sistem ini cadangan devisa tidak diperlukan karena otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau memanipulasi kurs. b)Mengambang terkendali (*managed or dirty floating exchange rate*) di mana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs mata uang pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa suatu negara biasanya dibutuhkan karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual valuta asing untuk mempengaruhi pergerakan kurs.

Kedua, Sistem kurs tertambat (pegged exchange rate). Dalam sistem ini, suatu negara mengaitkan nilai mata uangnya dengan suatu mata uang negara lain atau sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama. Menambatkan atau menetapkan nilai kurs ke suatu mata uang berarti nilai mata uang tersebut bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Jadi, sebenarnya mata uang yang ditambatkan tidak mengalami fluktuasi tetapi hanya berfluktuasi terhadap mata uang lain mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya.

Ketiga, Sistem kurs tertambat merangkak (crawling pegs). Dalam sistem nilai tukar ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih lama dibanding sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat menghindari kejutan-kejutan (*shocks*) terhadap perekonomian akibat revaluasi atau devaluasi mata uang yang tiba-tiba dan tajam.

Keempat, Sistem sekeranjang mata uang (basket of currencies). Banyak negara terutama negara sedang berkembang menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang dimasukkan dalam “keranjang” umumnya ditentukan oleh peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Mata uang yang berlainan diberi bobot yang berbeda

tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi, sekeranjang mata uang bagi suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata uang yang berbeda bobot dan nilainya.

Kelima, Sistem kurs tetap (fixed exchange rate). Dalam sistem ini, suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya terhadap mata uang negara lain dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli valuta asing dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya tetap atau diperbolehkan berfluktuasi, tetapi dalam batas yang sangat sempit.

Sedangkan yang dimaksud dengan kurs merupakan harga atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang negara lain. Kurs merupakan instrumen penting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruhnya yang cukup besar bagi neraca transaksi berjalan (*current account*) dan neraca pembayaran, maupun variabel-variabel makro yang lainnya. Oleh karena itulah, kurs juga mata uang merupakan sebuah harga aktiva atau harga asset (*asset price*), sehingga prinsip-prinsip pengaturan harga asset-asset lainnya juga berlaku dalam pengaturan kurs. Nilai tukar suatu mata uang terbagi atas nilai tukar riil (*real exchange rate*) dan nilai tukar nominal (*nominal exchange rate*). Nilai tukar riil adalah nilai tukar yang digunakan untuk menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lain. Sedangkan nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan untuk menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain.¹⁴

Nilai tukar suatu mata uang juga dapat dianalisa dengan pergerakan inflasi dan perubahan tingkat suku bunga di suatu negara dalam teori *International Fisher Effect (IFE)*. Teori *International Fisher Effect* menjelaskan bahwa; *the appreciation or depreciation of currency prices is proportionally related to differences in nominal rates of interest. The International Fisher Effect theory suggests that currency of any country with a relatively higher interest rate will depreciate because high nominal interest rates reflect expected inflation* (Madura, 2010).¹⁵

Teori di atas menjelaskan hubungan nilai tukar dan inflasi yaitu teori *International Fisher Effect (IFE)*. Sedangkan jika teori *Purchasing Power Parity* menekankan bahwa nilai tukar suatu mata uang akan berubah seiring dengan daya beli mata uang suatu negara yang dipengaruhi oleh inflasi, maka teori IFE menekankan pada hubungan suku bunga dan nilai tukar. Menurut teori ini, nilai tukar mata uang suatu negara akan dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga di kedua negara tersebut. Nilai tukar mata uang suatu negara dengan suku bunga

¹⁴ Analisis pengaruh nilai tukar, SBI, inflasi dan pertumbuhan (GDP) terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di bursa efek Indonesia (BEI), oleh Hismendi; Abu bakar Hamzah dan Said Musnadi, dalam Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.1. Nomor 2, Mei 2013, Penerbit Program Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Aceh, hlm.20.

¹⁵ *A Test of the International Fisher Effect in Selected Asian Countries*, by Maurice K. Shalishali-Columbus State University United States of America (USA), dalam, *the International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 2 No. 4, Special Issue – February 2012/<http://www.ijhssnet.com/journals/>, hlm.86-87., diakses 15 September 2015.

lebih tinggi, akan melemah terhadap mata uang negara lain dengan suku bunga lebih rendah. Hal ini terjadi karena negara dengan suku bunga yang tinggi cenderung memiliki laju inflasi yang juga tinggi. Dan sebaliknya, nilai tukar suatu mata uang dengan tingkat suku bunga relatif tinggi, akan cenderung menguat dengan mata uang negara lain dengan tingkat suku bunga yang relatif lebih rendah.¹⁶

B. Sistem Nilai Tukar Rupiah dari Masa ke Masa

Sebelum tahun 1970, Indonesia menganut rezim devisa kontrol, sedangkan kebijakan rezim devisa bebas diawali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1970 tanggal 17 April 1970, transaksi devisa dilakukan di bursa valuta asing dan melalui bank devisa. Kemudian pada Agustus 1971, terjadi perubahan penetapan nilai tukar rupiah yaitu nilai tukar tidak lagi ditetapkan berdasarkan transaksi di bursa valuta asing, melainkan ditetapkan pemerintah (Bank Indonesia) dengan mengaitkan nilai tukar rupiah pada dollar AS. Tujuan perubahan kebijakan tersebut untuk mendorong ekspor dan meningkatkan investasi dalam negeri dan investasi asing.¹⁷

Periode tahun 1970-1978, Indonesia menerapkan sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate system*) dengan melakukan 3 (tiga) kali devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar AS. Devaluasi rupiah dilakukan karena nilai rupiah yang ditetapkan tidak lagi sesuai dengan nilai riilnya. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 1964, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ditetapkan dengan kurs resmi Rp250 per satu dollar AS.¹⁸

Kemudian pada 15 November 1978, pemerintah melakukan kebijakan devaluasi rupiah terhadap dolar AS sebesar 33,6% yaitu dari Rp415 menjadi Rp625. Pada 30 Maret 1983 pemerintah kembali melakukan devaluasi rupiah dari Rp702 menjadi Rp970 per USD. Selain melakukan devaluasi nilai rupiah, pemerintah juga menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed floating exchange system*), dengan mengaitkan nilai tukar rupiah terhadap sekeranjang mata uang mitra dagang utama. Dalam sistem ini—sejak 1978 s/d Juli 1997, ditetapkan nilai tukar rupiah indikasi dan membiarkan nilai tukar rupiah bergerak dalam kisaran tertentu. Pemerintah melakukan intervensi, apabila nilai tukar rupiah bergerak melebihi batas atas atau batas bawah. Tujuan diterapkannya sistem nilai tukar terkendali adalah untuk mencegah nilai rupiah mengalami *over-valued* atau *under-valued*, dibandingkan

A. ¹⁶Pilih Rupiah atau Dollar, (*online*), dalam <http://www.kompasiana.com/>, diakses 15 September 2015.

¹⁷Laporan Tim Analis dan Evaluasi Hukum tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, (*online*), <http://www.bphn.go.id/data/documents/>, diakses 9 September 2015

¹⁸*Ibid.*

dengan nilai tukar yang sebenarnya (*real exchange rate*) yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan pasar.¹⁹

Sejak 1992 sampai Agustus 1997, fleksibilitas nilai tukar rupiah semakin dikembangkan dengan penerapan *crawling band*. Fleksibilitas rupiah dengan *crawling band*, ternyata ampuh bertahan selama beberapa dekade, karena dapat mempertahankan stabilitas nilai rupiah dan memberikan ruang gerak berupa fleksibilitas guna merespon keadaan pasar dengan adanya band intervensi yang merupakan kewenangan BI sebagai otoritas moneter. Setiap tahun rata-rata nilai rupiah mengalami depresiasi sekitar 4-5% terhadap dolar AS.²⁰

Memasuki tahun 1998, pemerintah memilih dan menetapkan sistem nilai tukar rupiah yang *flexible* sejak pertengahan tahun 1997. Implikasinya kemungkinan melebarnya rentang fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sangat besar. Sejak krisis 1998 sampai pertengahan 1999, depresiasi rupiah terhadap dolar AS masih lebih besar dibanding negara tetangga yang juga menganut sistem nilai tukar yang *flexible*, seperti Thailand dan Filipina. Keberhasilan memperkecil rentang fluktuasi nilai tukar rupiah kiranya dapat pula menjadi ukuran pemulihan ekonomi suatu negara, sebagaimana tercermin pada perkembangan nilai tukar Bath-Thailand dan Won-Korea Selatan.²¹

Sejak tahun 1999 hingga saat ini, pemerintah menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange system*). Sistem ini membiarkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing bergerak sesuai dengan mekanisme pasar bebas. Walaupun terjadi depresiasi rupiah terhadap mata uang dagang utama seperti dolar AS, maka otoritas moneter melakukan intervensi yang relatif terbatas sesuai dengan kebijakan moneter yang ditempuh pada saat itu.

C. Pendekatan Moneter

Pendekatan moneter (*monetary approach*) dalam analisis pergerakan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang negara lain juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan. Pendekatan moneter biasanya dilakukan oleh otoritas moneter bank sentral di suatu negara. Pendekatan ini menjelaskan bahwa, kurs devisa sebagai harga relatif dari dua jenis mata uang ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran (*supply* dan *demand*) uang. Pendekatan moneter pada dasarnya terdiri dari dua versi, yaitu *pertama*, versi harga fleksibel (*flexible price version*) dan *kedua*, versi harga kaku (*sticky price version*). Versi harga

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹Pilihan Sistem Nilai Tukar dan Pengendalian Arus Modal oleh Bobby Hamzar Rafinus, Makalah diakses online, <http://www.bappenas.go.id/files>, tgl. 9 September 2015, hl.6.

fleksibel muncul akibat adanya kritik terhadap anggapan adanya fleksibilitas harga dari suatu mata uang di pasar uang. Menurut versi ini, anggapan adanya kekakuan harga lebih realistik bila menyangkut jangka waktu yang pendek. Sedangkan versi harga kaku—sering disebut pendekatan Keynesian adalah karena anggapan bahwa adanya variabel jumlah uang beredar yang endogen. Kedua anggapan tersebut tidak mengakui efektifitas mekanisme pasar dalam menyelesaikan ketidakseimbangan pasar uang yang terjadi dalam jangka pendek.²²

Pendekatan moneter lain adalah melalui pengelolaan tingkat suku bunga BI. Perubahan suku bunga *BI Rate* juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), karena investor akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal asing yang masuk ke dalam negeri pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif, sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian.²³

III. METODOLOGI ANALISIS

Tulisan ini membahas implikasi depresiasi rupiah terhadap USD dan hubungannya terhadap perdagangan luar negeri, pinjaman luar negeri, dan cadangan devisa negara dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analisis. Tulisan ini didukung dengan data-data dan referensi yang relevan dengan topik yang dibahas.

²²Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS, oleh Muhammad, Universitas Muhammadiyah Malang, (*online*) dalam www.directory.umm.ac.id, diakses 8 September 2015.

B. ²³Transmisi Kebijakan Moneter, (*online*) dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/transmisi-kebijakan/Contents/>, diakses 14 September 2015.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Depresiasi Terhadap Ekspor-Impor

Suku bunga (*interest rate*) dan nilai mata uang suatu negara memiliki hubungan yang searah, di mana kenaikan suku bunga suatu negara akan menyebabkan nilai mata uang negara tersebut menguat terhadap mata uang negara lain. Hal tersebut dikarenakan, kenaikan suku bunga biasanya akan diikuti oleh kenaikan suku bunga pinjaman, termasuk pinjaman luar negeri dan tabungan bank umum atau bank konvensional di negara bersangkutan. Sebagai ilustrasi misalnya, saat ini suku bunga ringgit Malaysia sebesar 3,25% dan peso Filipina sebesar 4%. Bank Sentral Malaysia menaikkan suku bunga sebesar 0,25% sehingga suku bunga ringgit Malaysia menjadi sebesar 3,5%. Asumsikan suku bunga peso Filipina adalah tetap.

Kenaikan suku bunga ringgit Malaysia tersebut akan menyebabkan investor mengalihkan modalnya ke Malaysia karena ingin memanfaatkan kenaikan suku bunga tersebut, sehingga permintaan terhadap ringgit Malaysia meningkat. Dengan demikian, mata uang ringgit Malaysia akan menguat (terapresiasi) terhadap mata uang peso Filipina. Jika suku bunga negara lain tetap atau tidak berubah, maka nilai tukar ringgit Malaysia pun akan menguat pula terhadap mata uang negara lain. Analog dengan hubungan antara dolar AS dan rupiah.

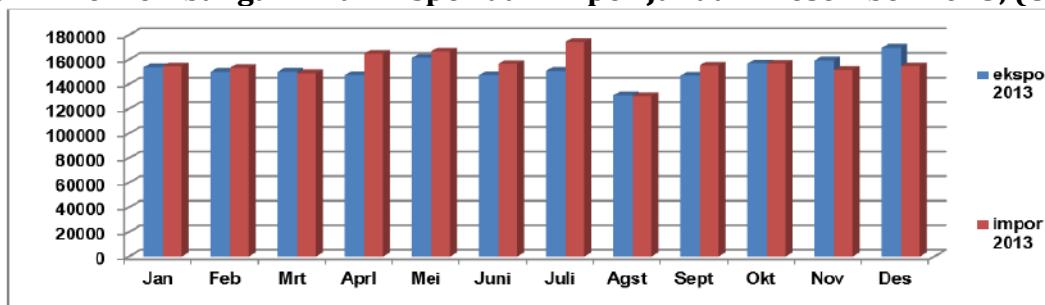
Jika pemerintah Indonesia tidak segera mengantisipasi naiknya suku bunga perbankan di AS, maka rupiah akan melemah karena pemilik dolar AS akan beralih menyimpan uang dolarnya pada bank baik di Indonesia maupun di AS yang menyebabkan jumlah dolar AS yang beredar di pasar (*domestic*) semakin sedikit. Implikasi depresiasi rupiah terhadap perekonomian, dijelaskan di bawah ini.

Secara garis besar terdapat tiga variabel yang mempengaruhi stabilitas ekonomi makro Indonesia dalam kaitan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yaitu *Pertama*, berhubungan dengan keseimbangan antara permintaan dan penawaran (*supply-demand*) atas mata uang rupiah dan dolar AS di dalam negeri. Merosotnya (depresiasi) nilai tukar rupiah merefleksikan menurunnya permintaan masyarakat terhadap rupiah karena menurunnya peran atau aktivitas perekonomian nasional. Di samping itu, meningkatnya nilai mata uang dolar AS di pasar internasional sebagai alat pembayaran internasional karena kebutuhan dolar AS bertambah. Sehingga biaya impor mengalami kenaikan karena kebutuhan akan dolar AS sebagai alat pembayaran semakin meningkat. *Kedua*, adalah tingkat suku bunga sebagaimana dijelaskan di atas.

Ketiga adalah terjadinya inflasi. Tekanan depresiasi terhadap rupiah harus diimbangi dengan instrumen kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk mewujudkan nilai tukar rupiah, seperti menaikkan suku bunga simpanan/tabungan perbankan. Depresiasi rupiah menyebabkan kebutuhan terhadap mata uang rupiah bertambah untuk mendapatkan dolar AS karena mahal dan langkanya mata uang dolar AS. Karena dolar AS dibutuhkan untuk membayar impor. Peningkatan kebutuhan akan dolar AS bisa menyebabkan inflasi yang didorong oleh impor barang karena harga barang impor akan meningkat di pasar domestik²⁴

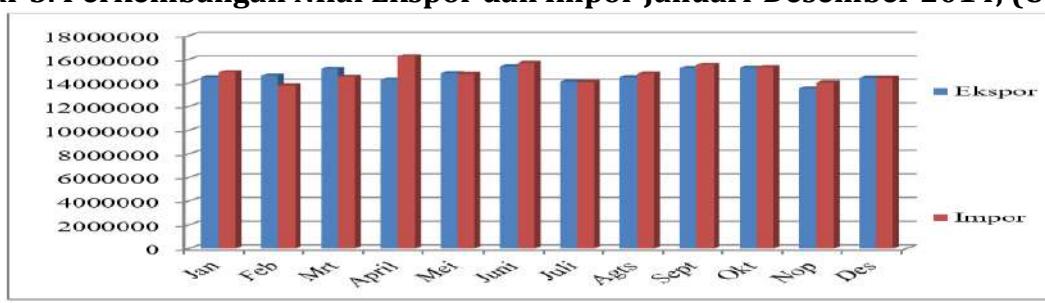
Pada saat Indonesia sudah menjadi negaranet-importer minyak, khususnya impor bahan bakar minyak (BBM), maka depresiasi rupiah akan meningkatkan harga jual bahan bakar minyak di pasar domestik. Di samping itu, impor non-migas termasuk impor barang konsumsi yang cenderung meningkat setiap tahun akan meningkatkan inflasi. Hal ini lah salah satu yang mengakibatkan terjadinya defisit neraga perdagangan luar negeri sejak tahun 2012.

Gambar 2. Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Januari-Desember 2013, (USDJuta)



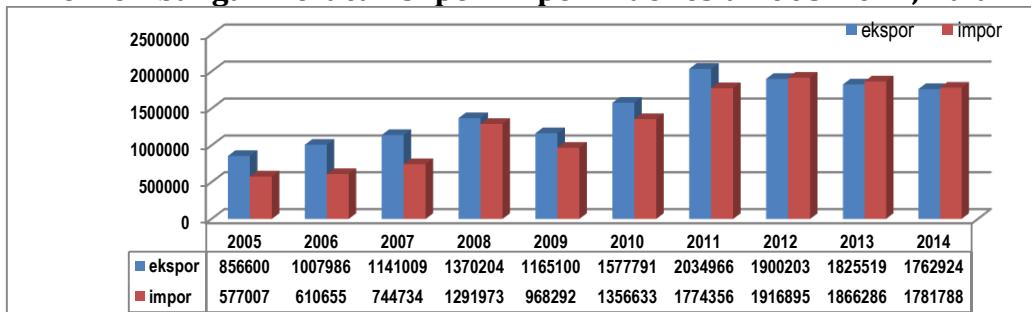
Sumber: Indikator Ekonomi, Juni 2014, Penerbit BPS Jakarta.

Gambar 3. Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Januari-Desember 2014, (USD Juta)



Sumber: Ekspor-Import, (online), <http://www.bps.go.id>, diakses 9 September 2015

D. ²⁴Melemahnya Nilai Tukar Rupiah Masalah atau Rezeki Nomplok, (online), dalam <http://www.kompasiana.com>, diakses 8 September 2015.

Gambar 4. Perkembangan Neraca Eskpor-Impor Indonesia 2005-2014, Dalam USD Juta.

Sumber: Indikator Ekonomi, Juni 2014, BPS, Jakarta (<http://www.bps.go.id>. diakses 7 September 2015)

Dari gambar 3 di atas, terjadi defisit neraca ekspor-impor selama 7 bulan yakni dari Januari 2014 sampai November 2014. Sedangkan pada 2013, defisit neraca ekspor-impor berlangsung selama 10 bulan, kecuali November dan Desember 2013 yang mengalami surplus. Walaupun terjadi surplus neraca perdagangan luar negeri, tetapi apabila laju kenaikan eksport tidak terlalu signifikan, maka dapat menyebabkan inflasi di dalam negeri karena pertumbuhan impor masih cukup tinggi. Belum lagi defisit yang terjadi sepanjang tahun 2012.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih mengatakan, meski ada depresiasi kurs rupiah tetapi belum mampu memperbaiki neraca perdagangan luar negeri, mengingat 60% eksport nasional berupa barang non-migas atau barang komoditas yang harganya sedang jatuh. Artinya, tidak banyak yang dapat dijadikan sebagai langkah untuk meredam depresiasi rupiah karena di tengah kondisi perekonomian global yang masih belum pulih.

Sedangkan dari sisi industri manufaktur yang berorientasi eksport, mayoritas bahan bakunya berasal dari impor juga sehingga depresiasi rupiah tidak banyak menguntungkan bagi Indonesia dan tidak dapat membantu neraca perdagangan luar negeri. Oleh karenanya jika memang pemerintah ingin memanfaatkan momen depresiasi rupiah lebih menguntungkan, maka pendekatan yang harus dibuat pemerintah adalah bagaimana mendorong agar industri hilir dan industri menengah bisa berkembang agar impor bahan baku dan impor barang modal bisa ditekan setiap tahun.²⁵ Hal inilah yang menjadi kelemahan dalam struktur industri nasional karena bahan baku dan barang modal untuk proses produksi masih bergantung pada impor dari luar.

E. ²⁵Mengancam deficit perdagangan: Tekanan depresiasi rupiah berkelanjutan, Selasa, 24/02/2015, (online), <http://www.neraca.co.id/article>, diakses 11 September 2015.

B. Dampak Defisit Ekspor-Impor Terhadap PDB

Dengan terjadinya defisit neraca ekspor-impor yang relatif besar, maka berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB), di mana pertumbuhan ekonomi (PDB) juga dipengaruhi besaran ekspor minus impor (PDB=konsumsi masyarakat © + investasi (I) + pengeluaran pemerintah (G) + (ekspor-impor). Artinya depresiasi rupiah seharusnya dapat mendorong ekspor lebih besar lagi, tetapi karena sebagian besar ekspor merupakan komoditas hasil sumber daya alam (SDA), pertanian, dan perkebunan. Karena struktur ekspor Indonesia juga masih mengandalkan ekspor komoditas yang rata-rata belum diolah. Hal ini menggambarkan industri hilir belum berkembang, termasuk dengan berkembangnya issuedilirisasi industri mineral sebagaimana yang amanatkan dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Harga komoditas ekspor terutama komoditas perkebunan saat ini cenderung turun. Sehingga tidak dapat menutupi laju naiknya impor. Di sisi lain impor pangan yang cenderung meningkat turut mempengaruhi laju pertumbuhan.

Pada saat defisit neraca perdagangan barang terus terjadi, maka akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB). Oleh karena itu dalam lima tahun terakhir (2011-2015), pertumbuhan ekonomi nasional sebagian besar disumbang oleh sektor konsumsi dan investasi domestik. Pada 2015 lalu memang terjadi susplus neraca perdagangan barang sebesar USD7.670,7 miliar. Tetapi terjadi defisit neraca ekspor-impor minyak sebesar USD8.038,9 miliar.²⁶ Defisit neraca ekspor-impor minyak turut menyumbang depresiasi rupiah karena kebutuhan dolar AS tinggi di sektor ini, termasuk impor minyak mentah untuk kebutuhan kilang minyak di dalam negeri.

Penurunan ekspor dan peningkatan impor akan menurunkan cadangan devisa. Sebaliknya surplus neraca ekspor-impor akan meningkatkan jumlah cadangan devisa. Di samping itu, besarnya pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dan bunga juga turut mengurangi jumlah cadangan devisa.

Sebaliknya peningkatan jumlah wisatawan manca negara ke Indonesia dan investasi asing langsung (*foreign direct investment*) akan menambah jumlah cadangan devisa. Bank Indonesia pernah mengintervensi nilai tukar rupiah untuk mengurangi volatilitas nilai rupiah di pasar spot dengan menggunakan sebagian cadangan devisa. Sejak 2009 sampai 2014, jumlah wisatawan luar negeri berkunjung ke Indonesia terus bertambah. Penerimaan devisa dari wisatawan luar negeri tersebut juga meningkat setiap tahun sejak 2009. Pada 2009 devisa yang

²⁶Neraca Perdagangan Indonesia, <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance>, diakses 24 Agustus 2016.

masuk dari wisatawan luar negeri berjumlah USD6.297,99 juta dan pada 2014 sudah mencapai USD11.166,13 juta.²⁷

C. Solusi Kebijakan

Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (*foreign currency*) merupakan salah satu kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Tugas dan kewenangan BI dalam menstabilkan nilai tukar rupiah didasarkan kepada UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 2004 di atas ditegaskan,

tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada ayat (2) ditegaskan bahwa: *untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.*

Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2009 disebutkan bahwa, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: a.menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b.mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sedangkan yang dimaksud sistem nilai tukar berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Sistem nilai tukar berdasarkan ketentuan di atas ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk diajukan kepada pemerintah.

Tujuan BI dalam mengupayakan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing antara lain adalah menjaga kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan (*over-valued*), bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.²⁸

²⁷Infrastruktur Pariwisata Dibenahi, *Harian Bisnis Indonesia*, Selasa, 15 September 2015.

F. ²⁸Tujuan Kebijakan Moneter, dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/>, diakses 14 September 2015.

Secara teoritis dan praktis, meningkatnya ekspor dan arus investasi asing langsung akan menambah *supply hard currency*, khususnya Dolar AS di pasar domestik. Namun kenyataannya devisa yang diperoleh terbatas hanya berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah dan sebagian kecil ekspor diantaranya ekspor non-migas. Kondisi ini cukup mengenaskan mengingat potensi devisa yang benar-benar dapat masuk ke Indonesia untuk memupuk cadangan devisa sangat besar. Namun ironisnya, peningkatan cadangan devisa Indonesia lebih banyak berasal dari aliran modal asing jangka pendek (*hot money*) yang memiliki potensi pembalikan devisa keluar secara tiba-tiba (*sudden reversal*).²⁹

Dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, BI telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, tertanggal 30 September 2011. Inti dari peraturan BI di atas antara lain adalah bahwa dalam rangka memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan ekonomi Indonesia dari gejolak ekonomi global, maka Indonesia sangat berkepentingan terhadap peran eksportir dalam mendukung stabilitas perekonomian nasional. Bank Indonesia memandang, sudah saatnya ekonomi kita lebih didukung melalui devisa hasil ekspor dan devisa dari pinjaman luar negeri. Pasokan modal yang bersumber dari devisa hasil ekspor (DHE) akan lebih menjamin kesinambungan kecukupan cadangan devisa yang dikelola Bank Indonesia (*reserve money*) yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan menjaga ketahanan ekonomi domestik dari goncangan ekonomi global dan dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya bagi pengembangan ekonomi nasional. Oleh karenanya Bank Indonesia berkepentingan untuk mengatur lalu lintas devisa yang berasal dari ekspor dan utang luar negeri. Aturan Bank Indonesia yang diterapkan sejak Januari 2012, mewajibkan transaksi atas devisa yang diterima dari hasil ekspor dan utang luar negeri harus melalui bank devisa di dalam negeri.³⁰ Meskipun harus melalui bank devisa di dalam negeri tidak terdapat kewajiban eksportir untuk menyimpan devisa tersebut di bank tersebut atau dengan perkataan lain, setelah ditransaksikan melalui bank di dalam negeri eksportir diperkenankan memindahkan devisanya ke bank dimana saja pada saat itu juga.

Di samping itu, tidak ada kewajiban eksportir harus mengkonversikan devisanya ke dalam mata uang rupiah. Aturan ini sesuai dengan prinsip lalu lintas devisa bebas yang dianut, dimana Bank Indonesia hanya ingin memahami nilai sebenar-benarnya dari ekspor dan utang luar negeri yang selama ini terjadi. Dengan demikian, kekuatan devisa Indonesia

²⁹Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah Melalui Arus Masuk Devisa, (*online*), dalam http://www.bi.go.id/id/publikasi_diakses 7 September 2015.

³⁰Saat ini terdapat sebanyak 35 bank devisa nasional.

nantinya secara psikologis dapat menjadi benteng pertahanan terhadap munculnya goncangan nilai tukar rupiah. Kebijakan baru pengaturan lalu lintas devisa hasil ekspor dan utang luar negeri di Indonesia, sebenarnya lazim diterapkan oleh sebagian besar negara, khususnya *emerging countries*.

Beberapa negara ASEAN yang sudah menerapkan kebijakan hasil ekspor wajib masuk ke bank domestik diantaranya adalah Malaysia, Thailand, dan Filipina. Bahkan di India kewajiban masuk ke bank domestik diikuti dengan kewajiban konversi ke mata uang negaranya. Aturan pemakaian bank domestik bagi lalu lintas devisa ekspor di beberapa negara, juga memiliki makna nasionalisme untuk memanfaatkan hasil penjualan dari ekspor atas produksi domestik bagi keuntungan negeri sendiri dan dapat dipergunakan untuk investasi domestic.

Kebijakan moneter Bank Indonesia lainnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di pasar domestic adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683). Untuk melaksanakan ketentuan dalam PBI di atas, BI mengeluarkan surat edaran. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tertanggal 1 Juni 2015 ditegaskan, adanya kewajiban penggunaan mata uang rupiah di Wilayah Indonesia yang menganut asas teritorial. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah NKRI, baik dilakukan penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai, dan transaksi non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah Indonesia wajib menggunakan rupiah.

Kekecualian dari ketentuan di atas yang mengharuskan menggunakan valuta asing yakni kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah yang meliputi antara lain: a)kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya; b)pasar uang antar-bank (PUAB) dalam valuta asing; c)obligasi dalam valuta asing; d)*sub-debt* dalam valuta asing; e)jual beli surat berharga dalam valuta asing; f)transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya.

Di samping itu, kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku bagi setiap transaksi seperti: a)transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); b)penerimaan atau pemberian hibah dari/atau ke luar negeri yang dilakukan

oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri; c)transaksi perdagangan internasional; d)simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, seperti tabungan valuta asing atau deposito valuta asing; e)transaksi pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri seperti pemberian kredit oleh bank di luar negeri kepada nasabah di Indonesia.

Untuk mengurangi tekanan depresiasi rupiah, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan moneter antara lain: 1)Melakukan intervensi di pasar valuat asing untuk mengendalikan volatilitas nilai tukar rupiah; 2)Melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dengan tetap memperhatikan dampaknya pada ketersediaan SBN bagi *inflow* dan likuiditas pasar uang; 3)Menyesuaikan frekuensi lelang *Foreign Exchange Swap* dari 2 kali seminggu menjadi 1 x seminggu dan mengubah mekanisme lelang Term Deposit (TD) Valas dari variable rate tender menjadi *fixed rate* tender, menyesuaikan *pricing*, dan memperpanjang tenor sampai dengan tiga bulan; 4)Menurunkan batas pembelian valuta asing dengan pembuktian dokumen *underlying* dari yang berlaku saat ini sebesar USD100 ribu menjadi USD25 ribu per nasabah per bulan dan mewajibkan penggunaan NPWP; 5)Melakukan koordinasi dengan pemerintah dan bank sentral negara lain untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia; 6)Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT), guna mengalihkan likuiditas harian ke tenor yang lebih panjang.³¹

Dalam konteks perekonomian global yang sangat terbuka dan saling ketergantungan antar-negara saat ini, Indonesia tidak mungkin kembali kepada sistem perekonomian tertutup. Seperti yang dijelaskan dalam kebijakan moneter Bank Indonesia dalam stabilisasi nilai tukar rupiah, bank sentral tidak bertujuan untuk mematok nilai rupiah terhadap dolar AS atau mata uang asing lainnya pada nilai tertentu (*fixed value*). Bank Indonesia menjaga pergerakan atau volatilitas mata uang rupiah di pasar yang terkendali dengan tetap menjaga tingkat fluktuasi sekecil mungkin. Upaya menjaga volatilitas rupiah yang tidak terlalu besar dan relatif kecil merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah dengan sistem devisa bebas. Hal ini menjadi dilemma, pada saat sistem divisa bebas terus berkembang, tetapi di sisi lain bank sentral relatif sulit mengontrol pergerakan rupiah yang bisa setap saat terdepresiasi.

Dalam konteks rupiah yang terdepresiasi saat ini, Bank Indonesia masih belum menaikkan tingkat suku bunga Bank Indonesia (*BI-Rate*). Bahkan Bank Indonesia dapat menurunkan tingkat suku bunga untuk menggerakkan sektor riil sebagai dampak lesunya

G. ³¹Tiga Kebijakan BI Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah, (*online*), <http://jateng.tribunnews.com/>, diakses 10 September 2015.

perekonomian global. Tetapi instrumen stabilisasi rupiah sudah dilakukan seperti mewajibkan eksportir untuk melaporkan nilai ekspornya (devisa hasil ekspor), serta mewajibakan untuk menyimpannya pada bank devisa nasional di dalam negeri. Solusi kebijakan ini sesuai ketentuan dalam UU tentang Lalu Lintas Devisa dan beberapa Peraturan Bank Indonesia, yang juga mengharuskan setiap transaksi ekonomi dan keuangan di dalam negeri mewajibkan menggunakan rupiah sebagai alat tukar atau alat pembayaran, baik *cash* maupun secara *online*(*e-transaction* atau *e-commerce*).

Solusi lain untuk mengurangi depresiasi atau volatilitas rupiah tidak terlalu besar dan tidak terlalu fluktuatif adalah dengan mendorong ekspor, terutama ekspor non-migas, serta mengurangi impor bahan baku dan barang modal dengan mengembangkan industri hilir dan industri menengah (*industri substitusi impor*). Kejatuhan nilai rupiah terhadap dolar AS tidak selamanya merupakan efek berantai dari kejatuhan nilai tukar mata uang di Asia. Upaya mendorong masuknya investasi asing langsung juga merupakan strategi yang penting untuk mencapai penguatan rupiah karena semakin banyaknya uang dolar AS yang masuk ke dalam negeri untuk membiayai investasi di berbagai sektor.

Publik dan pelaku ekonomi masih menunggu apakah Bank Indonesia akan menaikkan tingkat suku bunga BI (*BI-Rate*) sebagai alternatif kebijakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah di pasar. Dengan naiknya suku bunga Bank Indonesia, maka rupiah akan semakin sedikit di pasar sehingga rupiah secara perlahan akan menguat karena jumlah rupiah yang beredar cenderung berkurang dengan masuknya rupiah ke perbankan. Tetapi dengan asumsi Bank Sentral AS (*the Fed Reserve*) belum menaikkan suku bunganya (*Fund Rate*).

V. PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan sistem nilai tukar mata uang yang dianut oleh Indonesia—sistem nilai tukar mengambang bebas, ketika sebelum terjadi krisis ekonomi-moneter (1997/1998) memberikan gambaran relatif stabilnya pergerakan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS. Hal ini juga dapat dijelaskan dengan kecenderungan rupiah mengalami sedikit apresiasi (penguatan) rupiah terhadap dolar AS.

Volatilitas nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS mangalami puncaknya pada saat terjadi krisis ekonomi-moneter tahun 1997/1998 dengan menguatnya dolar AS terhadap

beberapa mata uang Asia, termasuk rupiah. Ketidakstabilan perekonomian domestik sebagai akibat dari goncangan ekonomi (*shock*) eksternal yang terjadi hampir di berbagai negara khususnya Asia menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami *over-estimate* atau *under-valued*. Akibatnya, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang cukup tajam sehingga mempengaruhi kinerja fundamental perekonomian domestik yang lain.

Depresiasi rupiah tidak hanya membawa pengaruh positif tetapi juga berdampak negatif. Salah satu risiko depresiasi rupiah yang terjadi sampai saat ini—terutama pada periode 2011-2014 terjadinya defisit neraca eksport-impor barang menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan dan pada akhirnya mempengaruhi neraca pembayaran.

Pergerakan atau volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tersebut pada sisi lain, juga dapat meningkatkan penerimaan negara yakni meningkatnya daya saing eksport sangat tinggi sehingga hasil devisa eksport (DHE) yang diperoleh juga sangat besar. Namun, eksport non-migas tidak dapat meningkat pesat karena sebagian besar harga komoditas eksport non-migas seperti pertanian dan perkebunan cenderung turun karena lesunya kondisi perekonomian negara-negara importir barang dari Indonesia. Dalam perekonomian dunia yang tidak stabil dan lesu, tentunya sangat sulit untuk meningkatkan kinerja eksport non-migas Indonesia untuk menambah cadangan devisa dari hasil eksport (DHE) karena daya beli masyarakat luar negeri akan terganggu dan menurun sebagai dampak dari terganggunya kegiatan ekonomi di masing-masing negara dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi (PDB) di negara importir.

B. Rekomendasi

Bagi importir dalam negeri depresiasi rupiah terhadap dolar AS tersebut juga berdampak pada kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*), di mana komponen produksi utamanya harus diimpor dari luar negeri, seperti bahan baku dan barang modal untuk kebutuhan industri dalam negeri. Kenaikan biaya produksi karena pergerakan kurs rupiah ini, pada akhirnya akan dibebankan pada harga barang yang diproduksinya. Dalam situasi perekonomian yang masih cenderung melambat, daya beli masyarakat dalam negeri juga tentunya mengalami penurunan. Hal ini berarti *output* yang dihasilkan produsen tersebut juga akan mengalami kesulitan dalam memasarkan produksinya di pasar. Solusi lain yaitu meningkatkan investasi domestic dan asing untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi (PDB).

Pasca krisis ekonomi 1998, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan volatilitas yang semakin sering terjadi. Perekonomian Indonesia memiliki tingkat keterbukaan dan sensitivitas yang semakin besar, seiring dengan penggunaan mata uang asing (valuta asing) dalam transaksi ekonomi domestic yang dilakukan pelaku ekonomi nasional dan internasional. Di samping itu, pembentukan kawasan/blok perdagangan antarnegara seperti; AFTA, CAFTA, MEA, atau dalam skala yang lebih luas APEC dan WTO memberikan ruang perdagangan dunia yang lebih luas bagi semua negara. nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan terus mengalami volatilitasnya sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran (*supply-demand*) mata uang rupiah dan dolar AS di pasar uang. Walaupun otoritas moneter Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar uang dalam rangka menjaga stabilitas kurs rupiah pada level wajar agar tidak *under-valued*, tetapi relatif belum mengurangi depresiasi rupiah terhadap dolar AS.

Jika pergerakan nilai tukar rupiah sudah *over-valued/under-valued* dan ekspektasi masyarakat sudah tidak rasional, maka intervensi bank sentral dalam bentuk pembelian mata uang asing khususnya dolar AS atau penjualan mata uang asing (US\$) menjadi sebuah instrumen yang kurang berarti. Dalam upaya meredam dampak gejolak nilai tukar rupiah tidak terdepresiasi jauh, maka kebijakan untuk mendorong kegiatan ekspor non-migas dan menarik investasi asing langsung menjadi langkah mendesak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (PDB) nasional. Kegagalan meredam gejolak nilai tukar rupiah yang sudah terdepresiasi jauh, dapat membawa perekonomian kembali pada kondisi krisis ekonomi-moneter tahun 1997/1998.

DAFTAR PUSTAKA

- Bramantyo Djohanputro, (2006), *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*, Pusat Pendidikan Manajemen (PPM) Institut, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik RI, *Statistik Indonesia 2012*, Penerbit BPS Jakarta.
- , *Statistik Indonesia 2013*, Penerbit BPS Jakarta.
- , *Statistik Indonesia 2014*, Penerbit BPS Jakarta.
- , *Indikator Ekonomi Juli 2014*, Penerbit BPS Jakarta.
- Bank Indonesia, *Statistik Keuangan Indonesia*, Berbagai Edisi, Penerbit Bank Indonesia, Jakarta.
- Didik J. Rachbini, (2001), *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan RI, *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2010*.
- , *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2011*.
- , *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2012*.
- , *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2013*.
- , *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2014*.
- , *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2015*.
- , *Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2016*.
- Mudrajad Kuncoro, (2011), *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, (Edisi 5), Penerbit UPP STIM YKPN.
- Paul A. Samuelson, (1985), William Nordhaus, *Economics*, Terjemahan A.Q Khalid, PT.Erlangga, Jakarta.
- R.Gregory Mankiw, (2014), *Brief Principles of Macroeconomics*, 7th Edition, Published by South- Western College Publication, USA.
- , (2007), *Makroekonomi*, Edisi bahasa Indonesia, Cetakan Ke-enam, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, (2011), *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syari'ah*, Penerbit CV.Alfabeta, Bandung.
- Steveen Pressman, (2000), *Fifty Major Economists*, Terjemahan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Solikin, (2002), *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, Jakarta.
- Analisis pengaruh nilai tukar, SBI, inflasi dan pertumbuhan (GDP) terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di bursa efek Indonesia (BEI), oleh Hismendi; Abubakar Hamzah dan Said Musnadi, dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.1.Nomor 2, Mei 2013, Penerbit Program Pascasarjana Universitas Syah Kuala Aceh,hlm.20.

A Test of the International Fisher Effect in Selected Asian Countries, by Maurice K Shalishali-Columbus State University United States of America (USA), dalam, the International Journal of Humanities and Social Science, Vol.2 No.4, Special Issue-February 2012/, hlm.86-87.

Infrastruktur Pariwisata Dibenahi, *Harian Bisnis Indonesia*, Selasa, 15 September 2015.

Sriyanto,SE.,MM.,Ekonomi Moneter,(2014), **Makalah**, Penerbit Universitas Gunadarma, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan lalu-lintas devisa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang LN korporasi non-bank.

Surat Edaran BI, Nomor 17/11/DKSP tertanggal 1 Juni 2015.

BI Intervensi Rupiah, Cadangan Devisa Melorot US\$3,9 Miliar,(online),<http://finansial.bisnis.com/read/>, diakses 11 September 2015.

Ekspor Impor Indonesia, (online) dalam www.kemendag.go.id, diakses 15 September 2015.

Mengancam defisit perdagangan: Tekanan depresiasi rupiah berkelanjutan, (online), <http://www.neraca.co.id/article>, diakses 11 September 2015.

Neraca Perdagangan Indonesia Total, (online) dalam <http://www.kemendag.go.id>, diakses 31 Agustus 2015.

Nilai Tukar Mata Uang Asing Terhadap Rupiah, (online), dalam <http://www.kemendag.go.id>, diakses 31 Agustus 2015.

Statistik Utang LN Indonesia, Agustus 2015, (online),dalam <http://www.bi.go.id/en/iru/economic-data/external-debt/Documents/>, diakses 14 September 2015

Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah Melalui Arus Masuk Devisa, (online), dalam <http://www.bi.go.id/id/publikasi>, diakses 7 September 2015.

Tiga Kebijakan BI Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah, (online), <http://jateng.tribunnews.com/>, diakses 10 September 2015.

Tujuan Kebijakan Moneter, (online), dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/>, diakses tgl.14 September 2015.

Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI pada 15 Agustus 2014, pada Rapat Paripurna DPR RI Jakarta

Ringkasan

Trade-off Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran

Penelitian ini menguji teori kurva Phillips dan hukum Okun di Indonesia, apakah terdapat kesesuaian atas 2 teori tersebut dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Dari penelitian beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa pengangguran memiliki hubungan searah dengan tingkat inflasi dimana hal tersebut tidak sejalan dengan teori kurva Phillips. Begitu pula dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa dalam jangka pendek terdapat hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan hukum Okun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran apakah terjadi hubungan dua arah, searah atau bahkan tidak berhubungan. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan Uji Granger Causality yang berguna untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel.

Trade-off Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran

Marihot Nasution³², Hafidz Huzaifah³³

Abstract

This study examined the Phillips curve theory and Okun's Law in Indonesia, whether there is an agreement on two theories to the real conditions that occur in the field. Some previous studies found that unemployment has a unidirectional relationship with inflation where it is not in line with the Phillips curve theory. Similarly, the relationship between economic growth and unemployment. Earlier studies suggested that in the short term, there is a negative relationship between unemployment and economic growth. This condition is not in accordance with Okun's law. The purpose of this study was to determine the relationship between inflation, economic growth and the unemployment rate. The study will be conducted using the Granger Causality Test to look at the causal relationships between variables.

Keywords: *Phillips curve, Okun's Law, inflation, economic growth and the unemployment rate*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja perekonomian terutama untuk mengetahui hasil pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Seiring dengan hal tersebut, tujuan negara membangun adalah kesejahteraan rakyat, maka masalah pengangguran yang tinggi merupakan kondisi yang sangat tidak dikehendaki oleh suatu negara dimanapun.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat, karena kontribusi penduduk yang bekerja dalam menghasilkan barang dan jasa akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih baik. Hukum Okun (Okun's Law) menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Adanya

³² Lembaga: Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan. Alamat: Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI lt.5, Jln Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270. Alamat email penulis: marihot.nasution@gmail.com

³³ Lembaga: Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan. Alamat: Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI lt.5, Jln Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270. Alamat email penulis: hafidz_huzaifah@yahoo.com

pertumbuhan dalam *Gross Domestic Product* (GDP) yang mendekati 3 % akan mengurangi pengangguran sebesar 1% (Prachowny, 1993).

Tak hanya pertumbuhan ekonomi, inflasi juga memiliki hubungan erat dengan tingkat pengangguran. Terdapat hubungan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Hubungan tersebut pertama kali dilaporkan oleh A. W. Phillips pada tahun 1958-dan dinyatakan sebagai kurva Phillips. Intuisi sederhana di balik trade-off ini adalah bahwa ketika tingkat pengangguran jatuh, pekerja diberdayakan untuk mendorong upah yang lebih tinggi. Perusahaan mencoba untuk meningkatkan biaya upah yang lebih tinggi bagi para konsumen, sehingga memunculkan kondisi peningkatan harga dan penumpukan inflasi dalam perekonomian. Trade-off yang disarankan oleh kurva Phillips menyiratkan bahwa para pembuat kebijakan dapat menargetkan tingkat rendah inflasi atau pengangguran yang rendah, tetapi tidak keduanya (Vasudevan, 2006³⁴).

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengangkat hal terkait fenomena Kurva Phillips dan Hukum Okun di Indonesia. Studi tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pengangguran dan tingkat inflasi dan juga mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.

Fenomena menarik di Indonesia mengenai pengangguran dan inflasi adalah tidak terdapatnya hubungan yang berlawanan antara keduanya. Kondisi tersebut terutama terjadi di tahun 2005 dimana ketika angka pengangguran tinggi juga diikuti dengan kenaikan inflasi³⁵. Hal ini akan menjadi bertentangan dengan teori Kurva Phillips yang menyatakan bahwa pengangguran yang tinggi cenderung mengurangi inflasi. Sejalan dengan hal tersebut, dalam jangka pendek terdapat hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Hukum Okun menyatakan bahwa setiap penurunan pengangguran 1% akan diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi.

³⁴ Ramaa Vasudevan, Ask Dr. Dollar <http://www.dollarsandsense.org/archives/2006/0906drdollar.html>

³⁵ Gambar 2. Tingkat Pengangguran dan Inflasi Tahun 1986-2015

C. Tujuan Analisis

Tujuan analisis ini adalah:

1. Untuk menganalisis hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran melalui uji teori Kurva Phillips.
2. Untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan tingkat pengangguran melalui uji teori Hukum Okun.
3. Untuk mengetahui hubungan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran apakah terjadi hubungan dua arah, searah atau bahkan tidak berhubungan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran

Pengertian inflasi secara umum diartikan sebagai kenaikan harga-harga umum secara terus menerus selama dalam suatu periode tertentu. Dengan demikian beberapa unsur dalam pengertian inflasi perlu diketahui bahwa: (1) inflasi merupakan proses kecenderungan kenaikan harga-harga umum barang-barang dan jasa secara terus menerus, (2) kenaikan harga barang-barang ini tidak berarti harus naik dengan persentase yang sama, namun terdapat kenaikan harga-harga umum barang secara terus menerus (dalam dimensi waktu tertentu), (3) jika kenaikan harga hanya sekali saja dan bersifat sementara atau secara temporer (sekalipun dalam persentase yang besar) tetapi tidak berdampak meluas bukanlah merupakan inflasi (Prasetyo, 2009).

Makro ekonomi suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Kondisi pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong

peningkatan keresahan sosial dan kriminal yang dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang (Blanchard, 2009).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Alghofari, 2010).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan suatu negara, khususnya dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk lingkup nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk lingkup wilayah. Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dipengaruhi faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Secara internal, tiga komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

B. Kurva Phillips

Hubungan terbalik (*trade-off*) antara pengangguran dan inflasi disebut kurva Phillips. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Dalam hal ini pengangguran sebagai output dan menerjemahkan inflasi sebagai perubahan harga. Kondisi dimana secara simultan pengangguran tinggi dan diikuti inflasi yang tinggi disebut sebagai *stagflasi* (Dornbusch, 2008).

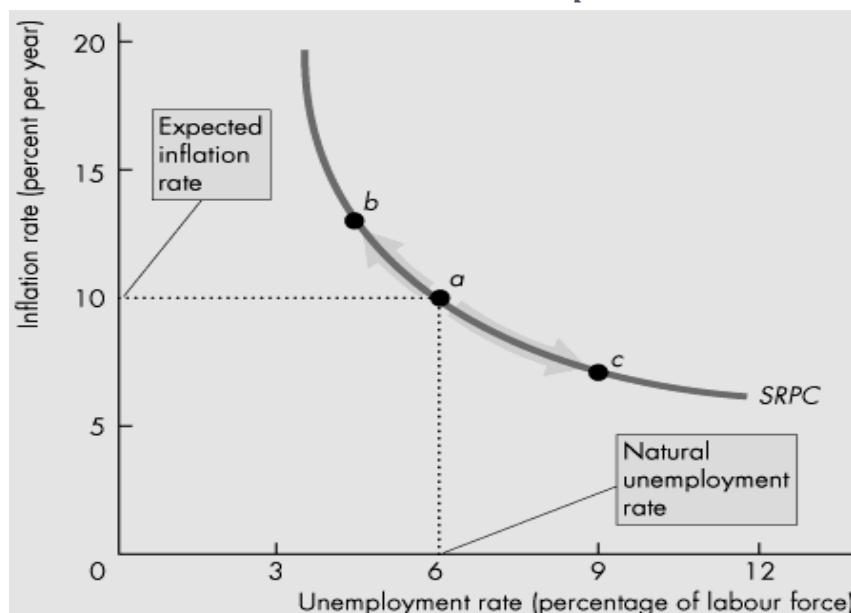
Kurva tersebut menyarankan bahwa perubahan tingkat pengangguran memiliki efek langsung dan dapat diprediksi pada tingkat inflasi harga. Penjelasan yang diterima selama tahun 1960-an adalah bahwa stimulus fiskal, dan peningkatan permintaan agregat, akan memicu beberapa tanggapan berikut:

1. Peningkatan permintaan tenaga kerja sebagai belanja pemerintah menghasilkan pertumbuhan.
2. Kolam pengangguran akan jatuh.

3. Perusahaan harus bersaing untuk pekerja yang lebih sedikit dengan menaikkan upah nominal.
4. Pekerja memiliki daya tawar yang lebih besar untuk mencari kenaikan upah nominal.
5. biaya upah akan naik.
6. Dihadapkan dengan meningkatnya biaya upah, perusahaan membebankan kenaikan biaya ini di harga yang lebih tinggi.

Adapun gambar kurva Phillips adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kurva Philips



A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang (Doornbusch, 2008).

C. Hukum Okun

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran telah dianalisa sebelumnya di tahun 1962 oleh Arthur Melvin Okun yang kemudian hasil analisa tersebut

sering disebut sebagai Hukum Okun. Dari hukum tersebut diamati hubungan antara pengangguran dan kerugian dalam produksi suatu negara secara empiris. Stabilitas dan kegunaan hukum telah diperdebatkan. Hukum Okun lebih akurat disebut "aturan praktis Okun" karena merupakan pengamatan empiris yang berasal dari teori. Hukum Okun merupakan perkiraan karena tidak menguji faktor lain selain tingkat pengangguran yang juga mempengaruhi output misalnya produktivitas. Hukum Okun menyatakan bahwa peningkatan satu poin dalam tingkat pengangguran siklis dikaitkan dengan dua poin persentase pertumbuhan negatif pada GDP riil. Hubungan tersebut bervariasi tergantung pada periode negara dan waktu yang digunakan dalam pengujian.

Teori lainnya, Prachowny (1993) memperkirakan penurunan sekitar 3% dalam output untuk setiap kenaikan 1% pada tingkat pengangguran. Namun, ia berpendapat bahwa mayoritas dari perubahan dalam output sebenarnya karena perubahan faktor selain pengangguran, seperti pemanfaatan kapasitas dan jam kerja. Jika faktor-faktor lainnya konstan, maka dapat mengurangi hubungan antara pengangguran dan GDP menjadi sekitar 0,7% untuk setiap perubahan 1% dalam tingkat pengangguran (Prachowny, 1993). Besarnya penurunan tampaknya menurun dari waktu ke waktu di Amerika Serikat. Menurut Abel dan Bernanke (2005), perkiraan berdasarkan data dari tahun-tahun terkini memberikan sekitar penurunan 2% dalam output untuk setiap kenaikan 1% pengangguran.

Sementara itu, di Indonesia, dengan adanya hubungan antara kedua variabel ini dijadikan dasar dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan salah satu sasarnya adalah penurunan jumlah pengangguran. Pemerintah Indonesia berupaya agar pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mampu mengurangi jumlah pengangguran. Target daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran ini dipertegas dalam batang tubuh Undang-Undang APBN di tiap tahunnya (Gambar 1). Komitmen penurunan jumlah pengangguran ini berubah sesuai kondisi ekonomi yang terjadi di tahun berjalan. Di tahun 2011 hingga 2013, dalam UU APBN tercantum bahwa Pemerintah Indonesia mengupayakan agar penyerapan tenaga kerja per 1% pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun tersebut berkisar di 400.000-450.000 tenaga kerja dalam setahunnya. Namun di 2014 dan 2015, target penyerapan tenaga kerja per 1% pertumbuhan ekonomi tersebut diturunkan menjadi 200.000 di tahun 2014 dan 250.000 tenaga kerja di tahun 2015.

Gambar 2. Target Pemenuhan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

2011	2012	2013	2014	2015
<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2011 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: <ul style="list-style-type: none"> penurunan kemiskinan menjadi sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) sampai dengan 12,5% (dua belas koma lima persen); dan Pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 400.000 (empat ratus ribu) tenaga kerja. [Pasal 39 UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011] 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2012 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: <ul style="list-style-type: none"> penurunan kemiskinan menjadi sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) sampai dengan 11,5% (sebelas koma lima persen); pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) tenaga kerja; dan Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 6,4% (enam koma empat persen) sampai dengan 6,6% (enam koma enam persen). [Pasal 45 UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012] 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2012 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: <ul style="list-style-type: none"> penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) sampai dengan 10,5% (sebelas koma lima persen); pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) tenaga kerja; dan Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) sampai dengan 5,9% (lima koma sembilan persen); dan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2014 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: <ul style="list-style-type: none"> penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) sampai dengan 10,5% (sepuluh koma lima persen); pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 200.000 (dua ratus ribu) tenaga kerja; dan Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,6% (lima koma enam persen) sampai dengan 6,1% (enam koma satu persen). [Pasal 36 UU No. 19 tahun 2012 tentang APBN 2013] 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2015 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: <ul style="list-style-type: none"> penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9% (sembilan persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen); pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) tenaga kerja; tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,5% (lima koma lima persen) sampai dengan 5,7% (lima koma tujuh persen); dan penurunan Gini Ratio, peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan, dengan tetap mempertimbangkan faktor yang mempengaruhinya, baik eksternal maupun internal. [Pasal 32 UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015]

Sumber: UU APBN 2011-2015, Kementerian Keuangan

III. METODOLOGI ANALISIS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif melalui uji teori, yaitu penelitian didasarkan pada fakta yang ada kemudian dilakukan uji kesesuaian dengan teori yang ada. Metode kuantitatif dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Penelitian ini akan menggunakan uji akar unit untuk melihat stasionaritas data. Uji derajat integrasi juga akan dilakukan jika data belum stasioner pada derajat nol, dan yang terakhir adalah menggunakan Uji Granger Causality yang berguna untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel.

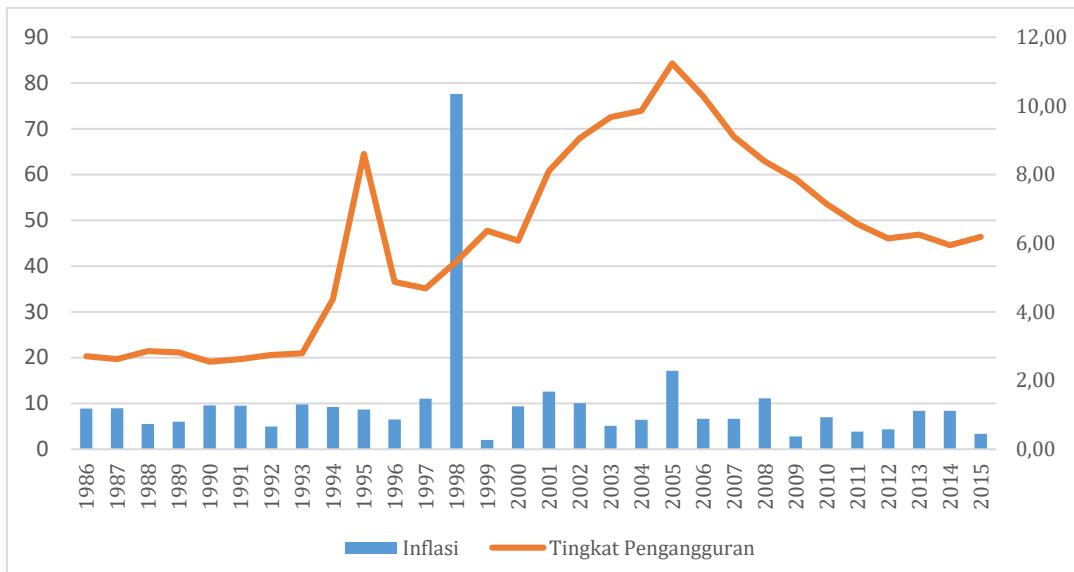
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Inflasi dan Tingkat Pengangguran

Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus menerus membengkak. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen seperti tampak di gambar 3. Pada tahun 1998 tingkat pengangguran mulai di atas 5%

hingga tahun 2015. Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (*gap*) yang makin membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi hingga tahun 2005 kemudian mulai menurun hingga tahun 2015.

Gambar 3. Tingkat Pengangguran dan Inflasi Tahun 1986-2015 (dalam persen)



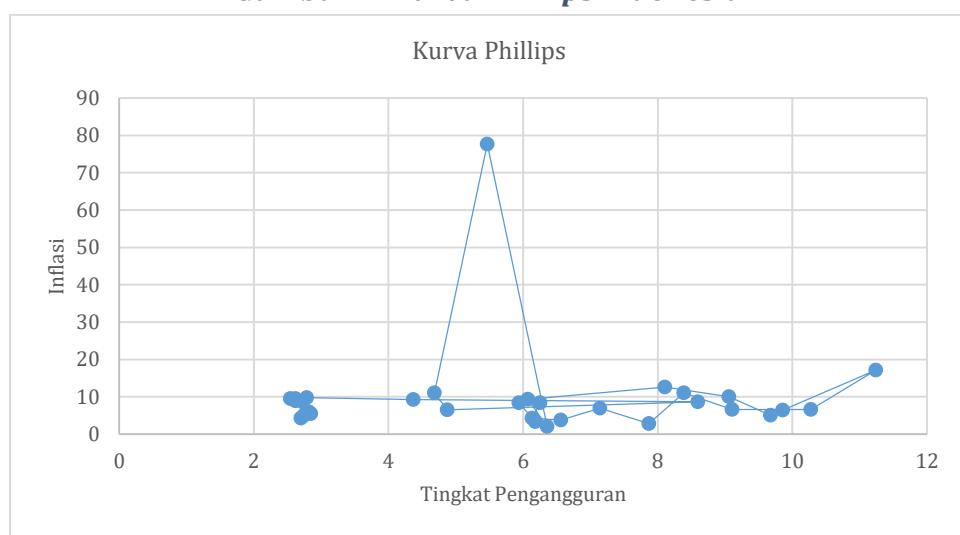
Sumber: BPS, Diolah

Inflasi Indonesia dari tahun 1986 hingga 2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 77,63% dan inflasi terendah pada tahun 1999 sebesar 2,01%. Tingkat inflasi yang tinggi merupakan indikasi awal memburuknya perekonomian suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong bank sentral menaikkan tingkat suku bunga sehingga menyebabkan kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor riil. Lebih jauh lagi akan menyebabkan pengangguran yang makin meningkat. Dalam jangka pendek kenaikan inflasi menunjukkan pertumbuhan perekonomian namun dalam jangka panjang kenaikan inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak buruk. Tingginya tingkat inflasi menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga barang impor. Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor dibandingkan barang domestik. Hal ini berakibat nilai ekspor cenderung turun dan nilai impor naik. Kurang bersaingnya harga produk domestik menyebabkan rendahnya permintaan produk dalam

negeri. Produksi menjadi berkurang karena sejumlah pengusaha akan mengurangi produksi. Produksi berkurang menyebabkan sejumlah pekerja kehilangan pekerjaannya sehingga pengangguran meningkat.

Bentuk kurva Phillips³⁶ memiliki kemiringan menurun, yang menunjukkan hubungan negatif antara perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran, yaitu saat tingkat upah naik, pengangguran rendah, ataupun sebaliknya. Kurva Phillips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan, yang berarti bahwa jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi/tingkat pengangguran rendah, sebagai konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. Adapun bentuk kurva Phillips Indonesia dengan adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Kurva Phillips Indonesia



Sumber: BPS, Diolah

Kurva Philips³⁷ di atas menunjukkan bahwa di Indonesia hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran bukan lagi sebuah *tradeoff* melainkan berjalan searah, artinya inflasi yang tinggi juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri Amir dengan data inflasi dan pengangguran Indonesia tahun 1980 hingga 2005 yang juga menunjukkan hubungan yang positif antara pengangguran dan inflasi. Inflasi sebagai bentuk kenaikan harga-harga di semua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawai atau tenaga kerja. Akibatnya, angka pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari dan berakibat perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Oleh

³⁶ Kurva Phillips dibuat dengan membuat plot titik koordinat antara pengangguran dan inflasi

³⁷ Data yang digunakan untuk membuat kurva Phillips di atas adalah data dari tahun 1985 hingga 2015

karena itu, inflasi sangat berkaitan erat dengan tingkat pengangguran. Adanya kenaikan harga-harga atau inflasi pada umumnya disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan karena kenaikan permintaan. Kenaikan harga BBM ini pada akhirnya akan meningkatkan harga akibat kelangkaan pasokan dan gangguan distribusi di berbagai daerah. Dengan alasan inilah maka hubungan antara perubahan tingkat pengangguran dengan inflasi di Indonesia menyimpang dari teori kurva Phillips. Alasan lainnya adalah bahwa dalam kurva Phillips hanya terjadi dalam jangka pendek tetapi tidak dalam jangka panjang. Karena pada jangka pendek masih berlaku harga kaku "*sticky price*" sedangkan pada jangka panjang berlaku harga fleksibel. Dengan kata lain pengangguran akan kembali pada tingkat alamiahnya sehingga hubungan yang terjadi antara inflasi dan pengangguran akan positif.

Tiga masalah utama dan mendasar dalam perekonomian Indonesia secara makro ekonomi adalah persoalan ketenagakerjaan atau pengangguran dan inflasi yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah dan belum berkualitas. Penanggulangan atau kebijakan pada dua masalah ini pun tidak dapat diprioritaskan mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu, semuanya bergantung pada kondisi struktural perekonomian³⁸.

Kurva Phillips tidak berlaku di Indonesia karena inflasi di Indonesia tidak disebabkan oleh permintaan agregat melainkan kenaikan harga, misalnya akibat kenaikan BBM. Selain itu kebanyakan perusahaan di Indonesia menerapkan padat modal bukan padat karya, sehingga pertumbuhan lapangan kerja lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Suatu perekonomian negara dikatakan baik jika pada suatu ketika tingkat inflasi dan pengangguran yang terjadi lebih rendah dibanding tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk memecahkan masalah inflasi sebagai penyebab terjadinya ketidakstabilan harga dan untuk memecahkan masalah pengangguran. Jadi kebijakan ekonomi makro harus dapat mencapai sasarnya, yaitu menciptakan stabilitas harga dan dalam waktu bersamaan menciptakan kesempatan kerja.

Penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional sesuai pasal 27 ayat 2 UUD 1945 bahwa setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang artinya produktif dan remuneratif. Untuk itu diperlukan dua kebijakan yaitu kebijakan makro dan mikro. Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan penanganan pengangguran antara lain kebijakan moneter terkait uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank

³⁸Dr. Hendri Saparini dalam diskusi dengan pakar tanggal 16 Juli 2014.

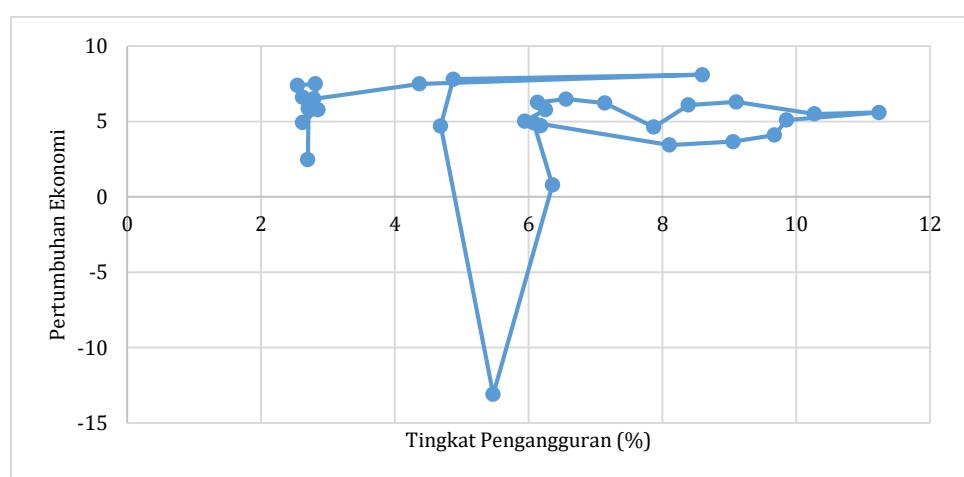
Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya dalam setiap rapat-rapat kabinet harus lebih fokus pada masalah penanggulangan pengangguran. Kebijakan mikro (khusus) yang berkaitan erat dengan penanganan pengangguran antara lain:

- Pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia memiliki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal.
- Segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi.
- Segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok.

B. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran

Perubahan tingkat pengangguran di Indonesia lebih tepat jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari adanya peningkatan kapasitas produksi yang merupakan turunan dari peningkatan investasi. Dengan meningkatnya investasi pasti permintaan tenaga kerja akan bertambah, sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan adanya peningkatan investasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran. Adapun grafik hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran adalah sebagai berikut.

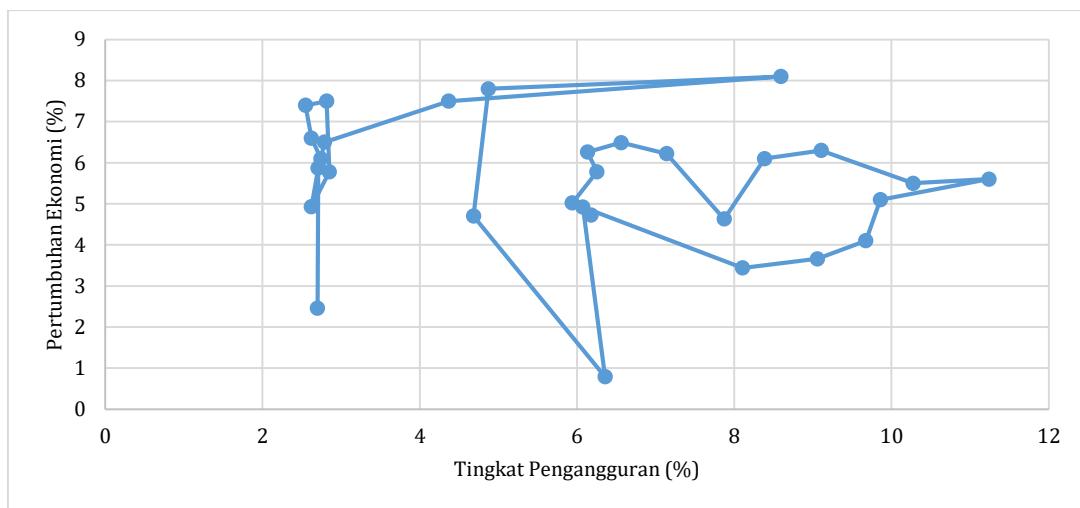
Gambar 5. Kurva Diagram Sebaran Antara Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1985-2015



Sumber: data diolah

Dengan menggunakan data antara pengangguran dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti yang digunakan dalam membuat kurva Phillip (data tahun 1998 tidak digunakan karena mempunyai nilai ekstrim) akan dapat digambarkan bagaimana kurva hubungan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran.

Gambar 6. Kurva Diagram Sebaran Antara Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1985-2015 Tanpa Memasukkan Data Tahun 1998



Sumber: data diolah

Dari hasil penggambaran diagram sebaran antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia, terlihat bahwa hasilnya menunjukkan kecenderungan yang sesuai dengan hukum Okun yaitu memiliki hubungan yang negatif, meskipun angka perbandingan yang dihasilkan tidak tepat bahwa setiap penurunan tingkat pertumbuhan 2% akan diikuti kenaikan pengangguran 1%.

C. Kaitan Antara Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Inflasi yang meningkat berdampak pada penurunan investasi. Hal ini dikarenakan kenaikan inflasi akan mendorong naiknya tingkat suku bunga yang pada akhirnya akan menurunkan investasi yang kemudian mampu menurunkan kapasitas produksi. Lebih lanjut, kapasitas produksi yang menurun akan menurunkan penyerapan tenaga kerja, disisi lain jumlah tenaga kerja terus bertambah sehingga hal ini mengakibatkan naiknya tingkat pengangguran.

Pengangguran yang meningkat menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang sehingga konsumsi pun menurun. Konsumsi, sebagai salah satu faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan menurunnya permintaan agregat konsumsi akan berakibat

menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Ketika anggaran guna belanja atau konsumsi turun, namun pemerintah ingin mempertahankan anggaran belanja yang sesuai maka akan dilakukan pendanaan baru yang dapat berasal dari pencetakan uang. Jika jumlah uang yang beredar semakin banyak maka akan berdampak pada meningkatnya inflasi. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dua arah maka dilakukan uji kausalitas sebagai berikut.

D. Uji Stasioner (Akar Unit)

Data yang akan digunakan untuk estimasi VAR perlu dilakukan uji stasioneritasnya terlebih dahulu. Suatu data dikatakan stasioner jika nilai rata-rata dan variannya untuk berbagai lag yang berbeda nilainya adalah konstan sepanjang waktu (Gujarati, 2003).

Pengujian akar-akar unit untuk semua variabel yang digunakan dalam analisis runtun waktu perlu dilakukan guna mengetahui keabsahan kestasioneran data yang akan dianalisis. Data yang digunakan dalam model harus bersifat stasioner (tidak memiliki akar unit) yaitu data yang memiliki varians yang tidak terlalu besar dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya. Dengan menggunakan data derajat nol dan tingkat lag 7 sebagai lag optimal karena menghasilkan R adjusted tertinggi yaitu sebesar 0,932629, diperoleh bahwa terdapat data yang tidak stasioner seperti di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji Akar Unit dengan Tingkat Lag Optimal 7

Root	Modulus
1.614867	1.614867
-0.841091 + 0.585024i	1.024542
-0.841091 - 0.585024i	1.024542
-0.308512 - 0.944321i	0.993439
-0.308512 + 0.944321i	0.993439
0.957717 - 0.226924i	0.984234
0.957717 + 0.226924i	0.984234
0.419304 - 0.872629i	0.968141
0.419304 + 0.872629i	0.968141
-0.529557 + 0.805359i	0.963864

-0.529557 - 0.805359i	0.963864
-0.875872 + 0.401080i	0.963337
-0.875872 - 0.401080i	0.963337
-0.021716 + 0.957169i	0.957415
-0.021716 - 0.957169i	0.957415
0.746865 + 0.582409i	0.947105
0.746865 - 0.582409i	0.947105
-0.940075	0.940075
0.482916 + 0.490340i	0.688216
0.482916 - 0.490340i	0.688216
0.016732	0.016732

Warning: At least one root outside the unit circle.
VAR does not satisfy the stability condition.

Sumber: Data diolah.

Pendekatan VAR sangat sensitif terhadap jumlah lag data yang digunakan, maka perlu ditentukan jumlah lag yang optimal. Penentuan panjang lag dimanfaatkan untuk mengetahui lamanya periode keterpengaruhannya suatu variabel terhadap variabel masa lalunya maupun terhadap variabel endogen lainnya (Rosadi, 2012). Penentuan lag optimal dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan antara lain Likelihood Ratio (LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC) dan Schwarz Information Criterion (SC). Hasil VAR Lag Order Selection secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari hasil uji penentuan lag, diperoleh lag optimal yang digunakan adalah lag 5 karena menghasilkan AIC terendah.

Tabel 2. Pengujian Penentuan Lag Optimum

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-206.9329	NA	3948.664	16.79464	16.94090	16.83520
1	-190.5734	27.48403	2209.587	16.20587	16.79093*	16.36814
2	-181.1953	13.50446	2226.276	16.17562	17.19948	16.45960
3	-162.2100	22.78237*	1102.199*	15.37680	16.83945	15.78248
4	-155.8143	6.139844	1651.689	15.58515	17.48659	16.11253
5	-140.8715	10.75882	1487.917	15.10972*	17.44996	15.75880*

* indicates lag order selected by the criterion

Sumber: Data diolah

Dengan adanya data yang tidak stasioner pada derajat nol maka pengujian data dilanjutkan pada tingkat *first difference* dengan tingkat lag optimal adalah lag 5 dengan nilai R-adjusted 0,855839.

Tabel 3. Hasil Uji Akar Unit dengan Tingkat Lag Optimal 5

Root	Modulus
-0.166206 - 0.905102i	0.920236
-0.166206 + 0.905102i	0.920236
-0.615454 - 0.672637i	0.911715
-0.615454 + 0.672637i	0.911715
0.323211 - 0.849123i	0.908557
0.323211 + 0.849123i	0.908557
-0.743630 - 0.504556i	0.898645
-0.743630 + 0.504556i	0.898645
-0.890525	0.890525
0.840444 - 0.235120i	0.872713
0.840444 + 0.235120i	0.872713
0.647493 - 0.549299i	0.849103
0.647493 + 0.549299i	0.849103

-0.249642 - 0.540740i	0.595585
-0.249642 + 0.540740i	0.595585
No root lies outside the unit circle.	
VAR satisfies the stability condition.	

Sumber: Data diolah

E. Uji Granger Causality

Uji kausalitas Granger digunakan untuk melihat arah hubungan suatu variabel dengan variabel yang lain dengan cara melihat nilai historisnya serta untuk mengetahui hubungan antar variabel merupakan hubungan searah atau dua arah. Hasil uji Granger dengan tingkat $\alpha=5\%$ adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
D(PERTUMBUHAN) does not Granger Cause			
D(INFLASI)	25	1.11524	0.3963
D(INFLASI) does not Granger Cause D(PERTUMBUHAN)		0.89596	0.5102
D(PENGANGGURAN) does not Granger			
Cause D(INFLASI)	25	18.8240	9.E-06
D(INFLASI) does not Granger Cause D(PENGANGGURAN)`		0.09145	0.9923
D(PENGANGGURAN) does not Granger			
Cause D(PERTUMBUHAN)	25	12.7907	8.E-05
D(PERTUMBUHAN) does not Granger Cause			
D(PENGANGGURAN)		0.30743	0.9003

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji Granger antara inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran disebutkan bahwa dalam persamaan pertama antara pertumbuhan dan inflasi tidak terjadi hubungan dua arah. Pada persamaan kedua antara tingkat pengangguran dan inflasi terjadi hubungan searah, dimana tingkat pengangguran mempengaruhi nilai inflasi sedangkan perubahan nilai inflasi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran. Pada persamaan ketiga disebutkan bahwa tingkat pengangguran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebaliknya kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada tingkat pengangguran.

V. PENUTUP

SIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas telah ditemukan bahwa di Indonesia, hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran bukan lagi sebuah *tradeoff* melainkan berjalan searah, artinya inflasi yang tinggi juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Inflasi sebagai bentuk kenaikan harga-harga di semua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawai atau tenaga kerja. Hal tersebut mengakibatkan angka pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari dan berakibat perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Sementara itu, sebaran antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia, terlihat bahwa hasilnya menunjukkan kecenderungan yang sesuai dengan hukum Okun yaitu memiliki hubungan yang negatif, meskipun angka perbandingan yang dihasilkan tidak tepat bahwa setiap penurunan tingkat pertumbuhan 2% akan diikuti kenaikan pengangguran 1%.

Berdasarkan hasil uji Granger antara inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran disebutkan bahwa antara pertumbuhan dan inflasi tidak terjadi hubungan dua arah. Sementara itu antara tingkat pengangguran dan inflasi terjadi hubungan searah, dimana tingkat pengangguran mempengaruhi nilai inflasi sedangkan perubahan nilai inflasi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran. Pada hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dinyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya, kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada tingkat pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosadi, Dedi. 2012. *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan E-views*. Andi. Yogyakarta.
- Prasetyo, Eko. 2009. *Fundamental Makroekonomi*. Beta Offset. Yogyakarta.
- Blanchard, Olivier. 2009. *Macroeconomics*. Pearson Prentice Hall. United States of America.
- Prachowny, Martin. 1993. Okun's Law: Theoretical Foundations and Revised Estimates. *Review of Economics and Statistics*, 75, 331–36
- Abel, Andrew B., dan Ben Bernanke. 2005. *Macroeconomics*. Pearson/Addison Wesley. USA
- Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, dan Richard Startz. 2008. *Makroekonomi*. McGraw-Hill. Americas, New York.
- Winarno, Wing Wahyu. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics*. McGraw-Hill. New York.
- Alghofari, Farid. 2010. *Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007*. Undip. Semarang.
- Rizki, Perdana Kranti. 2012. *Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Pengangguran (Studi Kasus Kota Kabupaten se-Jawa Timur Tahun 2006-2010)*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya. Malang.
- Amir, Amri, Prof. Dr. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia. Universitas Jambi.
- Nota Keuangan dan UU APBN 2011-2015